

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN  
SARANA DAN PRASARANA RUMPUT LAUT  
MELALUI PROGRAM PUMP PB  
DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2012**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**S U A E D I**

**NIM. 500893901**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2016**

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Rumpuk Laut Melalui Program PUMP-PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat). Maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Jakarta, Mei 2016  
Yang Menyatakan



(Suaedi)

NIM 500893901

## ABSTRACT

### EVALUATION OF THE POLICY OF FACILITIES AND INFRASTRUCTURE SEAWEED GRANTING THROUGH PUMP PB PROGRAM IN NUNUKAN DISTRICT 2012

Suaedi  
email: suaedi.af11@gmail.com

Graduate Studies Program  
Indonesia Open University

The lives of fishermen still held the fate of the marine products and still in the stage of simple patterns of livelihood using traditional technology. Based on these conditions, the Government release the granting policy through the Mina Development Business in Rural - fishery cultivation program (PUMP-PB).

This study aims to find out more about the implementation of government policy and local government regarding the provision of facilities and infrastructure rocks seaweed through the PUMP - PB in Nunukan 2012. Methods of data collection is by interview, observation and documentation. Data analysis techniques used in this research is a comparative descriptive method.

Based on the results of data analysis can be concluded that the economic empowerment of rural communities through the PUMP - PB Program in Nunukan 2012 had a positive impact directly felt by fishermen as increased yield. Fishermen were also given infrastructure funding and given the assistance during the program. One of the obstacles in the implementation of PUMP - PB programs for increase the fisherman's income is their market price fluctuations of seaweed. Efforts should be made to optimizethis policy program is astrategy to increase the successful implementation of the program by following the optimistic scenario, namely: (1) Increase the use of technology facilities by farmers as optimal as possible; (2) Encourage accelerated training programs for farmers; and (3) Increasing support from relevant institutions for market expansion of seaweed products produced.

Keyword: Evaluation, Policy, *PUMP-PB*

## ABSTRAK

### **EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA RUMPUT LAUT MELALUI PROGRAM PUMP PB DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2012**

Suaedi  
email: suaedi.af11@gmail.com

Program Pasca Sarjana  
Universitas Terbuka

Kehidupan nelayan masih menggantungkan nasib kepada hasil laut masih dalam taraf sederhana dengan pola mata pencaharian menggunakan teknologi tradisional. berdasarkan kondisi ini Pemerintah menetapkan kebijakan pemberian bantuan melalui program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang implementasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah tentang pemberian bantuan sarana dan prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB di Kabupaten Nunukan Tahun 2012. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif.

Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan melalui Program PUMP-PB di Kabupaten Nunukan tahun 2012 memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh nelayan berupa peningkatan hasil panen. Nelayan juga diberi bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk pendanaan dan diberi pendampingan selama program berlangsung. Salah satu kendala dalam pelaksanaan program PUMP-PB untuk meningkatkan penghasilan nelayan yaitu adanya fluktuasi harga pasar dari rumput laut. Upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi kebijakan pemberian bantuan rumput laut melalui program PUMP-PB adalah dengan menyusun strategi peningkatan keberhasilan pelaksanaan program dengan mengikuti skenario optimis, yaitu: (1) Meningkatkan fasilitas pemanfaatan teknologi oleh pembudidaya seoptimal mungkin; (2) Mendorong akselerasi program pelatihan untuk pembudidaya; dan (3) Meningkatkan dukungan dari institusi terkait untuk perluasan pasar produk rumput laut yang dihasilkan.

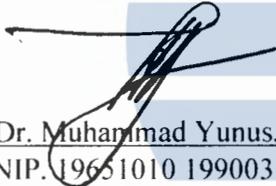
Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, PUMP-PB

## PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Rumput Laut Melalui Program PUMP-PB di Kabupaten Nunukan Tahun 2012**

Penyusun TAPM : Suaedi  
 NIM : 500893901  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Hari/Tanggal : Sabtu / 18 Juni 2016

**Menyetujui:**

<p><b>Pembimbing I</b></p>  <p><u>Dr. Muhammad Yunus, M.Si</u> NIP. 19651010 199003 1 026</p>	<p><b>Pembimbing II</b></p>  <p><u>Dr. Sri Sedyaningsih, M.Si</u> NIP. 19620131 198812 2 001</p>
---	---

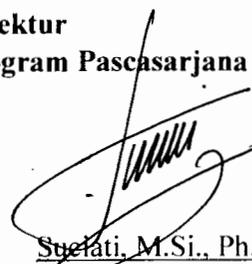
**Mengetahui:**

**Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Magister Administrasi Publik**



Dr. Darmanto, M.Ed.  
NIP. 19591027 198603 1 003

**Direktur  
Program Pascasarjana**



Stelati, M.Si., Ph.D.  
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : Suaedi  
 NIM : 500893901  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Judul TAPM : **Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Rumput Laut Melalui Program PUMP-PB di Kabupaten Nunukan Tahun 2012**

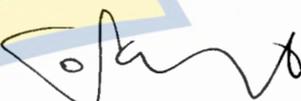
Telah dipertanggungjawabkan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Juni 2016  
 Waktu : 16.00 – 18.00

Dan telah Dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**

**Ketua Komisi Penguji**  
**Dr. Darmanto, M.Ed.**

:   
 .....

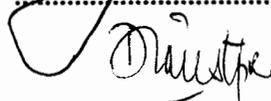
**Penguji Ahli**  
**Prof.Dr. Endang Wirjatmi Trilestari, M.Si.**

:   
 .....

**Pembimbing I**  
**Dr. Muhammad Yunus, M.Si.**

:   
 .....

**Pembimbing II**  
**Dr. Sri Sedianingsih, M.Si**

:   
 .....

## KATA PENGANTAR

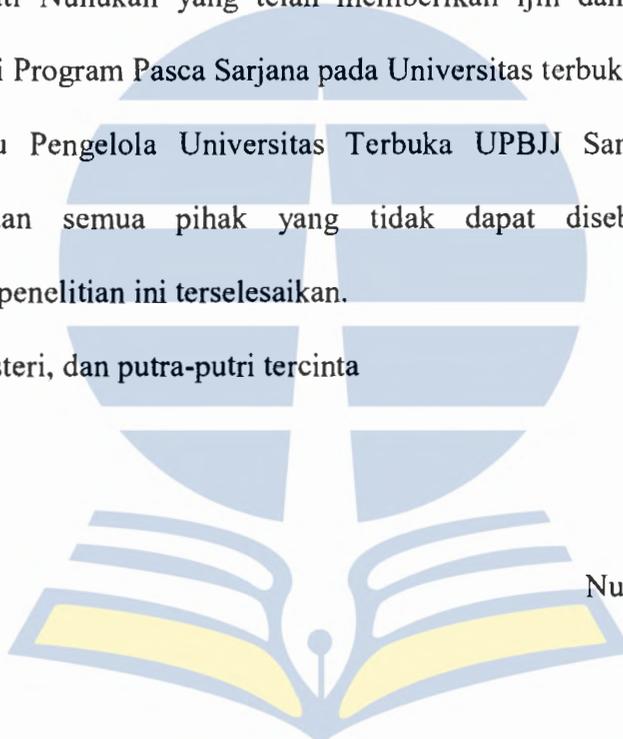
Puji syukur pada Allah SWT atas Berkah dan RakhmatNya, Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dimana penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang merupakan kewajiban dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta. Adapun judul penelitian yang Penulis buat dalam TAPM ini adalah “Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Rumput Laut Melalui Program PUMP-PB di Kabupaten Nunukan Tahun 2012”.

Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB tahun 2012 di Kabupaten Nunukan dan untuk mengetahui tata cara dan prosedur penyaluran pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.

Dalam penyusunan TAPM ini, Penulis banyak mengalami hambatan khususnya keterbatasan referensi dan waktu dalam pengumpulan data-data yang diperlukan. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian TAPM ini, tidak terlepas dari bimbingan dan arahan Dr. Muhammad Yunus Abbas, M.Si. selaku pembimbing pertama dan Dr. Sri Sedyaningsih, M.Si. selaku pembimbing kedua. Pada kesempatan ini, tak lupa Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Rektor Universitas Terbuka.

3. Ibu Suciati, M.Si., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka.
4. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed., selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik.
5. Bapak Dr. M. Taufiq, DEA., selaku Penguji Ahli.
6. Ibu Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si., Bapak Dr. Hardi Warsono, Bapak Dr. Suharno, Dr. Samudra Wibawa, Dr. Entang, Dr. Ridwan, selaku pengajar yang telah banyak memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya.
7. Ibu Bupati Nunukan yang telah memberikan ijin dan kesempatan dalam mengikuti Program Pasca Sarjana pada Universitas terbuka.
8. Bapak/Ibu Pengelola Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda Kalimantan Timur dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu sehingga penelitian ini terselesaikan.
9. Ibunda, Isteri, dan putra-putri tercinta



Nunukan, 12 Mei 2016

Penulis

Suaedi

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Suaedi  
NIM : 500893901  
Program Studi : Magister Adminidtrasi Publik (MAP)  
Tempat / Tanggal Lahir : Samarinda / 2 Desember 1969

Riwayat Pendidikan : 1. Lulus Sekolah Dasar (SD) Negeri 012 di Tanjung Aru pada tahun 1989;  
2. Lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 di Nunukan pada tahun 1992;  
3. Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 di Tarakan pada tahun 1995; dan  
4. Lulus S1 Universitas Mulawarman di Samarinda pada tahun 2000.

Riwayat Pekerjaan : 1. Desember tahun 2000, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;  
2. Januari tahun 2002, sebagai kepala PPI Sebatik;  
3. Agustus tahun 2005, sebagai Kasi. Pesisir Pantai dan Pulau Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan;  
4. Oktober tahun 2008, sebagai Kasi Konsumsi dan Kerawanan  
5. Mei tahun 2009, sebagai PJ Sekretaris Camat merangkap Dit. Camat Sebatik  
6. April tahun 2010, sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Nunukan, 12 Mei 2016

Suaedi  
NIM. 500893901

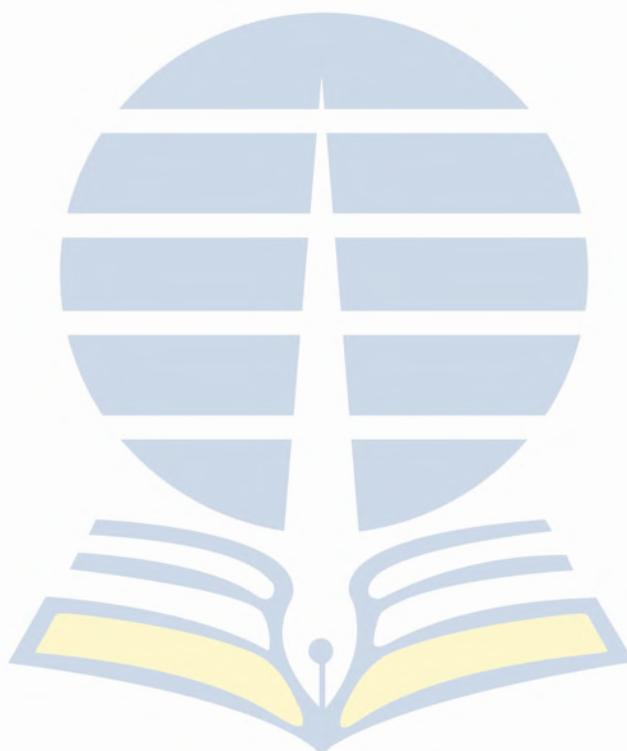
## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Landasan Teori .....	14
1. Defnisi Kebijakan Publik .....	14
2. Arti Penting Kebijakan Publik .....	15
3. Perumusan Kebijakan .....	16
4. Implementasi Kebijakan .....	18
5. Evaluasi Kebijakan .....	20
6. Evaluasi Program .....	25
7. Tinjauan Pemerintah .....	26
8. Pemberdayaan Masyarakat .....	28
9. Rumput Laut Komoditas yang Potensial .....	33
C. Kerangka Berpikir .....	42
D. Definisi Konsep dan Operasional .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	45
B. Fokus dan Dimensi Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian .....	46
D. Sumber Data dan Informan Penelitian .....	47

E. Metode Pengumpulan Data .....	48
F. Analisis Data .....	49
G. Teknik keabsahan Data .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Hasil .....	52
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
2. Deskriptif Objek Penelitian .....	58
3. Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan PUMP-PB Tahun 2012.....	59
B. Pemaparan Hasil .....	70
1. Proses Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Rumput Laut melalui PUMP-PB Tahun 2012 di kabupaten Nunukan .....	70
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Rumput Laut Melalui Program PUMP-PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.....	102
3. Upaya-Upaya untuk Optimalisasi Kebijakan Pemberian Bantuan Rumput Laut Melalui Program PUMP-PB Tahun 2012 ...	104
B. Pembahasan Hasil .....	105
1. Proses Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Rumput Laut melalui PUMP-PB Tahun 2012 di kabupaten Nunukan .....	113
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Rumput Laut Melalui Program PUMP-PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.....	115
3. Upaya-Upaya untuk Optimalisasi Kebijakan Pemberian Bantuan Rumput Laut Melalui Program PUMP-PB Tahun 2012 ...	121
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Rantai perdagangan rumput laut antar pulau.....	37
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir .....	40



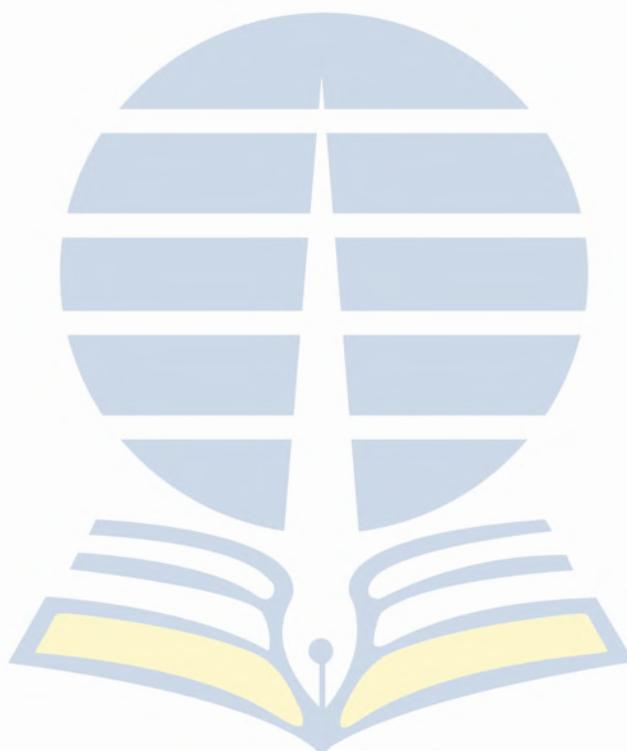
## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Perbedaan dan Kesamaan Rencana Penelitian dengan Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2.2 Persyaratan Ekspor Rumput Laut Jenis Kotoni .....	45
Tabel 4.1 Kondisi Topografi di Kabupaten Nunukan.....	53
Tabel 4.2 Kondisi Kelerengan di Kabupaten Nunukan .....	53
Tabel 4.3 Perkiraan Penggunaan Lahan di Kabupaten Nunukan.....	54
Tabel 4.4 Daftar Nama kelompok Penerima Bantuan .....	57
Tabel 4.5 Perkembangan Usaha Kelompok Penerima Bantuan (Pokdakan) Ilham Jaya .....	88
Tabel 4.6 Perkembangan Usaha Kelompok Penerima Bantuan (Pokdakan) Wahana Hijau.....	93
Tabel 4.7 Perkembangan Usaha Kelompok Penerima Bantuan (Pokdakan) Anugrah.....	98
Tabel 4.8 Perkembangan Usaha Kelompok Penerima Bantuan (Pokdakan) Liang Bunyu Pantai I.....	102



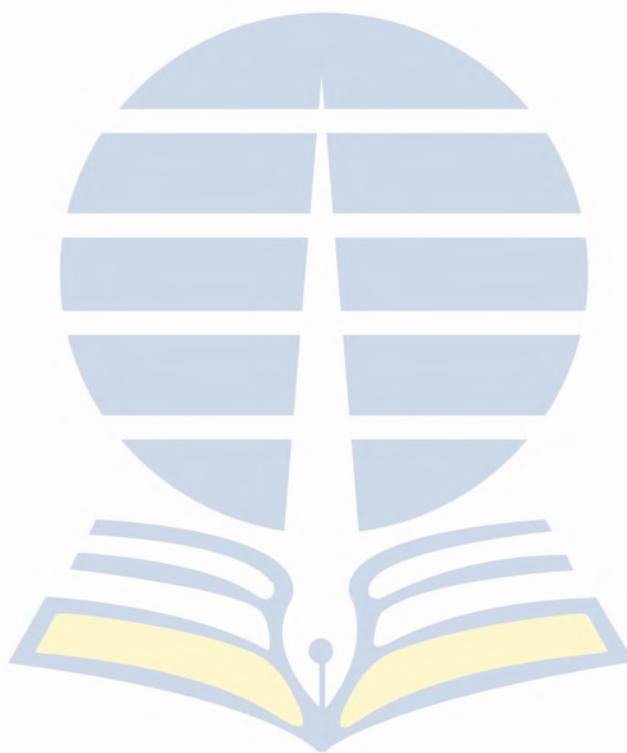
## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. ....	00



**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Rantai perdagangan rumput laut antar pulau .....	37
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	40



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Perbedaan dan Kesamaan Rencana Penelitian dengan Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2.2 Persyaratan Ekspor Rumput Laut Jenis Kotoni .....	45
Tabel 4.1 Kondisi Topografi di Kabupaten Nunukan.....	53
Tabel 4.2 Kondisi Kelerengan di Kabupaten Nunukan .....	53
Tabel 4.3 Perkiraan Penggunaan Lahan di Kabupaten Nunukan .....	54
Tabel 4.4 Daftar Nama kelompok Penerima Bantuan .....	57
Tabel 4.5 Perkembangan Usaha Kelompok Penerima Bantuan (Pokdakan) Ilham Jaya .....	88
Tabel 4.6 Perkembangan Usaha Kelompok Penerima Bantuan (Pokdakan) Wahana Hijau.....	93
Tabel 4.7 Perkembangan Usaha Kelompok Penerima Bantuan (Pokdakan) Anugrah.....	98
Tabel 4.8 Perkembangan Usaha Kelompok Penerima Bantuan (Pokdakan) Liang Bunyu Pantai I .....	102



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kebijakan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah merupakan suatu kebijakan nasional yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Kewenangan Daerah dalam mengelola kawasan pesisir perlu ditingkatkan implementasinya, masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan seringkali tersisih dari pembangunan, sebab prioritas kebijakan pemerintah lebih terfokus pada sektor pertanian.

Kehidupan nelayan yang masih menggantungkan nasib kepada hasil laut masih dalam taraf sederhana dengan pola mata pencaharian menggunakan teknologi tradisional disamping alat tangkap yang sudah ketinggalan zaman, para nelayan juga melaut pada area penangkapan yang terbatas di wilayah pesisir.

Nelayan Indonesia umumnya memanfaatkan hasil laut untuk bertahan hidup, akibatnya masyarakat nelayan selama ini dianggap sebagai kelompok masyarakat miskin.

Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang tertinggal secara sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan akses pelayanan kesehatan), ekonomi, dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. "Nelayan identik dengan keterbatasan aset, lemahnya kemampuan modal dan posisi tawar, serta kesulitan akses pasar" (Siswanto, 2008: 85). Hal ini ditegaskan oleh Ariansyach (2009) mengatakan bahwa sebagian besar nelayan di Indonesia keuangannya sangat terbatas, hal ini disebabkan karena rendahnya akses masyarakat pesisir terhadap lembaga permodalan dan pasar.

Maka berdasarkan kondisi ini Pemerintah Melalui Menteri Perikanan telah menetapkan kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Perikanan Budidaya Nomor : KEP.45/DJ-PB/2012 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2012. Pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-PB) dengan pola dasar pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya dirancang untuk meningkatkan kemampuan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) dalam mengembangkan usaha produktif dibidang pembudidaya ikan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, kemampuan dan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan wirausaha (pengembangan usaha) dibidang perikanan budidaya.

Adapun Komponen utama pelaksanaannya pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-PB): (1) Keberadaan kelompok, (2) Keberadaan tenaga pendamping, (3) Sosialisasi dan pelatihan, (4) Penyaluran dan

pemanfaatan bantuan dan (5) Pemantauan, evaluasi, pelaporan, dengan Strategi pengembangan; (1) Peningkatan kemampuan kelembagaan kelompok dalam mengelola bantuan; (2) Optimalisasi potensi usaha perikanan budidaya di pedesaan; (3) Fasilitasi bantuan usaha bagi kelompok; (4) Peningkatan sumberdaya manusia tenaga pendamping dan (5) Pendampingan kelompok

Program tersebut telah diimplementasikan pada tiap daerah, termasuk Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten pelaksana program tersebut. PUMP-PB yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha yang diperuntukkan bagi pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Pokdakan merupakan salah satu kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan dibidang dibidang perikanan budidaya. Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan untuk mendukung kegiatan tersebut menerbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor : 188.4/022/DKP/IV/2012 Tanggal 27 April 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana PUMP-PB Tahun 2012. Adapun Program PUMP-PB Kabupaten Nunukan adalah "*rumput laut*" sebagai komoditas yang dikembangkan. Rumput laut di Kabupaten Nunukan telah menjadi komoditas unggulan, ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya mudah dikerjakan oleh masyarakat (massal), bernilai ekonomis, tersedianya pasar, penerapan teknologi bersifat sederhana, dan adanya daya dukung lingkungan.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kaltim tahun 2011 produksi rumput laut kaltim mencapai 138.489 ton, 84% diantaranya berasal dari Nunukan (116.731 ton). Produksi rumput laut di Nunukan menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2010 produksi rumput laut Nunukan 56.542 ton. Jadi

peningkatan produksi 2010 ke 2011 lebih dari 100%. Meningkatnya produksi, meningkat pula volume-volume ekspornya. Pasar rumput laut tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Pada tahun 2011, nilai ekspor rumput laut dari Kalimantan Timur sebesar US\$63.000, sedangkan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan signifikan menjadi US\$231.000. Dengan kata lain, peningkatan nilai ekspor sebesar 265,17% (Bank Indonesia, 2013), rumput laut juga dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, ini dapat dilihat banyak masyarakat beralih profesi menjadi rumput laut. Produksi rumput laut Indonesia sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan baku rumput laut kering (row material) atau produk setengah jadi. Walaupun demikian produksi karaginan berupa refined karaginan mulai memperlihatkan peningkatan. Pangsa pasar rumput laut dimanca negara semakin cerah, seperti Hongkong, Korea Selatan, Perancis, Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Jepang serta beberapa negara maju lainnya, menjadikan negara produsen utama penghasil rumput laut seperti Indonesia dapat menjadikan komoditas andalan penghasil devisa negara. Pada tahun 2006 volume ekspor rumput laut dalam bentuk row material 1.507.944 ton dengan nilai ekspor US \$ 50 Juta. Dan tiap tahun mengalami peningkatan. Besar permintaan dari beberapa negara maju dikarenakan sebagai bahan utama untuk industri makanan, farmasi, kosmetik, tekstil, dan pupuk organik. Jumlah kebutuhan rumput laut internasional lebih ditentukan oleh negara-negara maju dan keadaan ekonomi dunia. (Andi Parenrengi, dkk, 2012). Kedepan pemerintah akan mengatur jumlah ekspor rumput laut yang merupakan salah satu komoditas andalan sektor kelautan dan perikanan sesuai pasokan dan kebutuhan pasar dunia, sedangkan dalam jangka panjang pemerintah juga akan menyusun road map dan

tata niaga rumput laut yang menyertakan kepentingan pemangku kepentingan rumput laut dari hulu sampai hilir. Dalam waktu dekat akan memanfaatkan sistem resi gudang guna membantu menyerap rumput laut hasil budidaya (Susi Pudjiastuti, 2015).

Namun berdasarkan kondisi dan fakta tersebut diatas masih banyak masalah yang dijumpai diantaranya sulitnya mengembangkan usaha rumput laut. hal ini dapat dilihat dari luas areal potensial untuk dikembangkan 6.000 ha, baru dapat kurang lebih 3.200 ha yang termafaatkan, dan dari 132 kelompok, karena terbatasnya modal yang dimiliki masyarakat, rendahnya kualitas rumput laut, harga tidak menentu, sarana prasarana terbatas, masih terdapat masyarakat yang memiliki kemampuan dan pemahaman tentang rumput laut yang minim, serta masih terdapat mekanisme pasar sistem tengkulak.

Maka berdasarkan fakta dan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang implementasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan prasarana rumput laut melalui Program PUMP-PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan yang terkait tata cara dan prosedur penyaluran; (1) prinsip penyaluran; (2) Besaran bantuan; dan (3) Tata cara penyaluran, dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Rumput Laut melalui Program PUMP-PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB tahun 2012 di Kabupaten Nunukan?
2. Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana rumput laut melalui program pump-pb tahun 2012 di Kabupaten Nunukan ?
3. Upaya – upaya apa yang dilakukan untuk optimalisasi kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana rumput laut melalui program pump-pb tahun 2012 di Kabupaten Nunukan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana rumput laut melalui program pump-pb tahun 2012 di Kabupaten Nunukan .
3. Mendeskripsikan upaya – upaya yang dilakukan untuk optimalisasi kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana rumput laut melalui program pump-pb tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan pengetahuan dan teori-teori

khususnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui Program PUMP-PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah kepustakaan pendidikan khususnya tentang implementasi kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui Program PUMP-PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.

## 2. Manfaat secara praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi aparat pemerintah yang terkait dalam pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui Program PUMP-PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait, terutama digunakan sebagai bahan pertimbangan memberikan bantuan sarana prasarana rumput laut melalui Program PUMP-PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

##### **1. Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Lewolema ( Study Kasus Kegiatan Simpanan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di Desa Hading dan desa Balukhering ) disusun oleh Yohanes Ibi Hurint (2013).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Nasional Pemberdaya Masyarakat mandiri pedesaan pada kegiatan simpanan pinjam untuk kelompok Perempuan di desa Sinar Hading dan desa Balukhering. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai hasil jangka menengah kegiatan Simpanan pinjam untuk kelompok Perempuan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dalam Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yaitu Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kepada kaum perempuan meningkat kan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usha dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Disamping itu penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menggambarkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan simpanan pinjam untuk kelompok perempuan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi sebagai dampak pelaksanaan sebuah program dan merupakan penelitian terapan berupa penelitian evaluatif.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa tujuan jangka menengah program yaitu mempercepat proses pemenuhan pendanaan usaha dan ataupun sosial dasar

dapat tercapai dengan baik yang ditandai dengan peningkatan usaha anggota kelompok dan terpenuhinya kebutuhan sosial dasar mereka. Evaluasi terhadap memberikan keselamatan kepada kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dinilai berhasil yang ditandai dengan peningkatan usaha ekonomi rumah tangga terhadap penguatan kelembagaan simpan pinjam kelompok Sistem Pinjam untuk Kelompok Perempuan tidak tercapai. Untuk itu diharapkan pelaku program dapat memanfaatkan faktor pendukung dan meminimalisir faktor penghambat yang ada sehingga pelaksanaan Simpan Pinjam untuk Kelompok dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Manfaat penelitian ini terhadap penelitian saya adalah menggunakan pendekatan yang sama, yaitu kualitatif.

## **2. Studi Evaluasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Propinsi Kepulauan Riau, disusun oleh Hasmiarti (2012).**

Penelitian ini dilakukan untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan, sehingga masyarakat luas, khususnya kelompok sasaran dan penerima, dapat mengetahui manfaat kebijakan secara lebih teratur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluasi dan dilakukan untuk: (1) Mendeskripsikan program-program yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Propinsi Kepulauan Riau dan (2) Mengevaluasi kendala dan hambatan dalam proses pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi kepulauan Riau.

Subyek penelitian adalah aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Propinsi Kepulauan Riau, karyawan rumah singgah engku Puteri, Perwakilan LSM dan masyarakat anggota Industri Rumah tangga. Data

dikumpulkan melalui observasi dan wawancara untuk data primer, serta telaah dokumen untuk data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan selama ini sesuai dengan tupoksi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Propinsi Kepulauan Riau yang sebelumnya diadakan pembahasan intensif dengan berbagai pihak.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Propinsi Riau Kepulauan dapat berhasil apabila ada kerjasama diantara para *stakeholder* yang secara bersama-sama memberikan input guna peningkatan peran serta perempuan untuk merespon kondisi yang ada terkait dalam gender laki-laki dan perempuan dalam mencapai tujuan pemberdayaan perempuan yang mandiri. Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya kerjasama diantara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar program pemberdayaan perempuan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Manfaat penelitian ini terhadap penelitian saya adalah sebagai bahan referensi dan memiliki tujuan yang hampir sama.

### **3. Evaluasi Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama Kota Pangkal Pinang, disusun oleh Haryadi (2011).**

Penelitian ini dilakuakn untuk mengetahui manfaat atau hasil program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama, tingkat keberhasilannya, dan efektifitas program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin. Implementasi program dilakukan melalui proses komunikasi, disposisi pengelolaan sumberdaya manusia, struktur

birokrasi. Sosialisasi dan koordinasi merupakan kata kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program. Pemahaman terhadap program juga sangat mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan atau monitoring yang dilaksanakan merupakan bentuk kendali dan evaluasi terhadap program.

Penelitian ini menggunakan metode evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan tentang pelaksanaan program, mengenai keberhasilan, dan kendala atau hambatan – hambatan yang terjadi selama program tersebut dilaksanakan.

Subjek penelitian ini adalah dinas kesejahteraan sosial propinsi kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini adalah para pelaksana program yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan program, yang terdiri dari kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, dan staf serta kelompok usaha bersama dengan sampel yang dipilih sebanyak 50 (lima puluh) kelompok yang produktif dan 5 (lima) kelompok yang tidak produktif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor kurangnya pemahaman program, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan terhadap implementasi program menyebabkan buruknya tata kelola program. Sehingga berdasarkan hasil analisis secara umum tujuan pelaksanaan program tidak tercapai. Terlihat bahwa program yang dijalankan hanya mengejar target. Tidak ada data pasti tentang keberhasilan program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial mereka.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan sosial masyarakat melalui kelompok usaha bersama belum memberikan manfaat yang signifikan dan belum menunjukkan keberhasilan.

Sehingga disimpulkan bahwa program tersebut belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Pangkalpinang. Manfaat penelitian ini terhadap penelitian saya adalah sebagai referensi dan memiliki subyek penelitian hampir sama yaitu berkaitan dengan evaluasi.

#### **4. Dampak Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan, disusun Reski (2013).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi program pengembangan budidaya rumput laut ini membawa dampak peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut, menganalisis kelayakan usaha budidaya rumput laut dan faktor – faktor yang mendukung pembudidaya melakukan usaha budidayanya dan menganalisis margin pemasaran dan efisiensi. Penelitian ini adalah penelitian mixing kualitatif dan kuantitatif, dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif yaitu metode yang menjelaskan atau mendeskripsikan fakta yang ada sebelum dan sesudah adanya kegiatan dinas kelautan dan perikanan terhadap hasil produksi maupun nilai hasil produksi pembudidaya rumput laut.

Subjek penelitian ini adalah pembudidaya rumput laut yang ada di kecamatan nunukan selatan dan kecamatan nunukan serta pedagang pengumpul yang terlibat dalam pemasaran rumput laut di daerah tersebut. Selanjutnya penentuan sampel pembudidaya dan pedagang pengumpul dipilih secara purposif pada tiap-tiap lokasi budidaya dan lembaga pemasaran. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan mei 2013. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada peningkatan pendapatan bersih pembudidaya per bentang per siklus sebesar 222,58% dari Rp.19.318,57 menjadi Rp.62.318,57. Kelayakan usaha budidaya rumput laut juga mengalami peningkatan dari 1,69

pada tahun 2011 menjadi 3,25 pada tahun 2012. Karena R/C ratio lebih dari 1 maka usaha budidaya rumput laut layak untuk diusahakan atau menguntungkan. Berdasarkan perhitungan margin dan efisiensi pemasaran ternyata saluran pemasaran di lokasi penelitian sudah efisien, hal ini dapat dilihat dari nilai EMP 9,52 dibandingkan sebelum tahun program yang mencapai 59,57 yang berarti tidak efisien. Manfaat penelitian ini terhadap penelitian saya adalah sebagai referensi dan memiliki komoditas penelitian yang sama, yaitu rumput laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan dan Kesamaan Rencana Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
2	Yohanes Ibi Hurint (2013)	Kualitatif	Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Lewolema ( Study Kasus Kegiatan Simpanan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di Desa Hading dan desa Balukhering )	Evaluasi Kebijakan	Aspek Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
3	Hasmiarti (2011).	Kualitatif	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Propinsi Kepulauan Riau	Evaluasi Kebijakan	Aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4	Haryadi (2011)	Kualitatif	Program Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama Kota Pangkal Pinang	Evaluasi Kebijakan	Aspek Pemberdayaan social
5	Reski (2013)	Kualitatif	Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan	Isu Aktual (rumput laut)	Aspek Dampak Pengembangan

## B. Landasan Teori

### 1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah *an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal or informal*. Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi “publik bukanlah *umum, rakyat, masyarakat, atau sekedar stakeholders*. Publik juga adalah *a sphere where people become citizen, a space where citizens interact, where state and society exist*. Jadi, public policy adalah:

*“any of State or Government (as the holder of the authority) decision to manage public life (as the sphere) in order to reach the mission of the nation (remember, nation is consist of two institutions: state and society)”*

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah:

*“...setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.”*

Dengan demikian, kebijakan publik adalah sebuah *fakta strategis* daripada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah *strategi*, maka didalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari pada aktor yang terlibat didalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah *strategi*, maka kebijakan publik tidak saja bersifat *positif*, namun juga *negatif*, didalam arti pilihan keputusan selalu bersifat *menerima salah satu dan menolak yang lain*. Meskipun terdapat ruang bagi *win-win* dimana sebuah tuntutan dapat diakomodasi, namun pada akhirnya ruang bagi *win-win* sangat terbatas, sehingga kebijakan publik lebih banyak pada ranah *zero-sum-game*, yaitu menerima *yang ini*, dan menolak *yang lain*. Dalam pemahaman ini, istilah “keputusan” termasuk juga ketika Pemerintah memutuskan untuk “tidak

mengurus” isu terkait. Dengan demikian, pemahaman disini mengacu kepada pemahaman Dye, bahwa kebijakan publik adalah *segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.*

Hal yang sama kemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71) Kebijakan Publik *sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu (a projected program of goals, values, and practices).* David Easton (1965, 212) mendefinisikannya sebagai *akibat dari aktivitas pemerintah (the impact of government activity).* Dengan demikian mengemukakan hal yang sama James Lester dan Robert Steward (2000, 18) mendefinisikannya sebagai *a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined.* Maka Daniel C. McCool (1995: 4) mengemukakan *bahwa while the study of politics has a long history, the systematic study of public policy, on the other hand, can be said to be a twentieth century creation. It dates to 1922, when political scientist Charles Merriam sought to connect the theory and practices of politics to understanding the actual activities of government, that is public policy.*

## **2. Arti Penting Kebijakan Publik**

Donald F. Kettl (1996, 9-15) dalam Ryant Nugroho (2014) mengemukakan bahwa memasuki milenium ketiga, administrasi publik menghadapi tiga isu kritikal yaitu berkenaan dengan struktur administrasi publik dengan tantangan menguatnya swasta dan menyusutnya pemerintahan (*best government is least government*); proses administrasi publik yang memperhadapkan kenyataan bahwa sumber defisit terbesar disetiap negara adalah

proses penyelenggaraan administrasi publik; nilai, yaitu yang berkenaan antara lain dengan munculnya ikon *enterpreneurial government*; dan kapasitas yang berkenaan dengan isu kecakapan dari administrator publik memanejemeni urusan-urusan publik. Disini hendak ditambahkan satu faktor: *kebijakan publik*.

Michael E. Porter (1998) mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif dari setiap negara ditentukan seberapa mampu negara tersebut mampu menciptakan lingkungan yang menumbuhkan daya saing dari setiap aktor didalamnya, khususnya aktor ekonomi. Dalam konteks persaingan global, maka tugas sektor publik adalah membangun lingkungan yang memungkinkan setiap sektor, baik bisnis maupun nirbala, untuk mampu mengembangkan diri menjadi pelaku-pelaku yang kompetitif, bukan hanya secara domestik, melainkan global. Lingkungan ini *hanya dapat diciptakan oleh kebijakan publik*, tidak lain. Kebijakan publik yang terbaik adalah yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan kedalam pola ketergantungan.

Inilah makna strategis dari administrasi publik, dan kenapa administrasi publik menjadi teramat strategis dalam menghadapi milenium ketiga. Jika kita telah memahami administrasi publik, maka pada bagian ini kita akan mencoba memahami tentang arti penting *kebijakan publik* itu sendiri. Pemahaman ini diperlukan sebelum memasuki tiga hal yang penting didalam kebijakan publik, yaitu: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

### **3. Perumusan Kebijakan**

Menurut Ryant Nugroho (2014) Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakanitu sendiri.

Kebijakan publik senantiasa ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan itu sendiri. Jadi, core dari kebijakan publik adalah “intervensi”, meskipun kebijakan publik adalah apa yang dipilih untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan pemerintah, namun sebenarnya yang menjadi fokus adalah apa yang dikerjakan pemerintah karena bersifat aktif. Pemerintah melakukan tugas pokok mememanajemeni organisasi negara. Sebagaimana dikatakan oleh Peter F. Drucker (1993) dalam Ryant Nugroho (2014) *for management has to manage. And managing is not just passive, adaptive behavior; it is means taking action to make the desired results come to pass.*

Paradigma kegiatan pemerintah sebenarnya mulai bersifat interventif pada akhir tahun 1930-an ketika Keynes dalam Ryant Nugroho (2014) memperkenalkan kebijakan pemerintah untuk mengatasi *economic malaise* yang dialami oleh Amerika Serikat di tahun 1932. Kebijakan Keynes pada intinya adalah bahwa pemerintah harus melakukan intervensi-intervensi melalui kebijakan-kebijakan publik untuk menjaga kesinambungan kehidupan bersama, khususnya yang menjadi fokus Keynes dan para pengikutnya dibidang ekonomi. Karena fokusnya adalah intervensi, maka yang harus menjadi perhatian dari kebijakan publik adalah kebijakan publik mengarah kepada tindakan-tindakan yang dapat dilakukan pada wilayah-wilayah yang memang dapat diintervensi.

Sebuah pemerintahan yang mengedepankan penyiapan SDM adalah organisasi pemerintahan yang berpikir untuk masa kini dan masa depan. Jepang, Singapura, Malaysia adalah contoh dari negara negara yang berhasil karena yakin

bahwa sukses akan dimulai dari membangun manusia, baru kemudian membangun produk.

Formulasi kebijakan publik tidaklah sederhana, melainkan memerlukan kecerdasan ekstra. Karena itulah, kita tidak bisa mempercayakan formulasi kebijakan publik hanya kepada figur yang tidak kompeten. Dalam membuat keputusan, pasti kita melakukan terlebih dulu identifikasi permasalahan, dilanjutkan dengan memilih kriteria untuk mengevaluasi permasalahan untuk menuju kepada pilihan-pilihan pemecahan masalah yang kita sebut sebagai pilihan atau alternatif kebijakan. Langkah selanjutnya adalah menilai seluruh alternatif tersebut, termasuk memberikan bobot dan ranking dari masing – masing alternatif. Penilaian tersebut menghasilkan satu alternatif yang terbaik dibanding yang lain untuk kemudian dipilih sebagai keputusan atau kebijakan. Langkah selanjutnya, implementasikan kebijakan tersebut, keseluruhan tugas ini biasanya dilakukan oleh analisis – analisis kebijakan yang memang mempunyai spesialisasi didalam analisa permasalahan, pemilihan alternatif. Perumusan masalah adalah hal pertama yang terpenting. Bagi analisis kebijakan inti dari tugas yang dijalannya adalah memastikan untuk menemukan pokok dari permasalahan.

#### **4. Implementasi Kebijakan**

Menurut Ryant Nugroho (2014) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang. Maka ada dua pilihan langka yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplemtasikan, karena

implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam kehidupan nyata. Artinya pelaksanaan kebijakan publik berusaha menghasilkan *outcome* yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat bahkan sebuah kebijakan handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan tidak optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Wahab (1997:53) dalam Reski (2014) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur / mengatur proses implementasinya. Demikian pentingnya implementasi kebijakan, sehingga dalam tahapan ini sangat membutuhkan kerjasama antar semua pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam kerangka mencapai optimalisasi dari implentasi kebijakan itu sendiri. Wahab (1998:10) dalam Reski (2014:14) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada

pembuatan kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan hanya merupakan rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip atau bahkan bisa hanya menjadi suatu angan – angan jika tidak diimplementasikan dengan baik.

## 5. Evaluasi Kebijakan

Dilihat dari sudut pandang siklus kebijakan, evaluasi biasanya dianggap sebagai sebuah proses aktivitas yang berusaha menyoroti apa yang terjadi sesudah kebijakan publik tertentu diimplementasikan atau ditransformasikan dalam berbagai bentuk tindakan rutin birokrasi. Selintas, anggapan demikian tampak tidak terlalu salah. Namun perlu kiranya diingat bahwa hendaknya jangan sekali kali membiarkannya hingga tiba pada tahapan tersebut sebelum pada akhirnya kita menetapkan bagaimana akan mengevaluasi sebuah kebijakan publik. Sebab, jika hal ini dilakukan, kemungkinan kita akan menemukan bahwa evaluasi itu tidak lagi memiliki nilai praktis atau membuahkan hasil-hasil yang tidak konklusif. Saat yang tepat untuk mempertimbangkan perlunya melakukan evaluasi justru sejak dini. Lebih lanjut, pendekatan analisis kebijakan untuk melakukan evaluasi tidak hanya bersangkut paut dengan evaluasi yang secara teknis dianggap benar, melainkan juga berkaitan dengan persoalan bagaimana hasil-hasil evaluasi itu dikonsumsi dan dimanfaatkan.

Dalam perbincangan sehari-hari, konsep evaluasi sering dianggap sinonim dengan memonitoring. Keduanya kendati berkaitan, sebenarnya dapat dan bahkan seharusnya dibedakan. Ada sejumlah definisi evaluasi yang karena relevansinya, akan ditampilkan disini. Agar paparan mengenai hal ini cukup komprehensif, maka definisi yang dikemukakan para ahli diupayakan menjangkau rentang waktu yang beragam: mulai tahun 1960-an, 1970-an, 1980-an, 1990-an.

Dalam arti yang seluas-luasnya, evaluasi menurut Suchman, (1967) dalam Solichin Abdul Wahab (1997) ialah:

*The process of assigning value to some objective and then determining the degree of success in attaining this valued objective.*

Dengan demikian kalau diikuti alur pikiran Suchman, evaluasi merupakan proses melekatkan sesuatu nilai pada beberapa tujuan tertentu dan dari situ kemudian dapat ditentukan derajat keberhasilannya dalam mencapai nilai-nilai yang sudah dilekatkan pada tujuan-tujuan tadi. Persoalannya sekarang, karena dalam kenyataan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat itu beragam dan satu sama lain boleh jadi bertentangan, maka nilai tolak ukur dan basis guna menaksir apakah sesuatu tujuan tercapai atau tidak.

Mirip dengan pandangan Suchman diatas adalah pendapat yang dikemukakan oleh Jenkin (1978) dalam Solichin Abdul Wahab (1997) yang menganggap evaluasi sebagai tak lebih dari sekedar persoalan teknis. Ia misalnya, merumuskan evaluasi itu sebagai berikut:

*"the means of determining the extent to which a program is yielding its objectives, using available methods to give evidence that is objective, systematic and comprehensive"(Jenkins, 1978:222).*

Sosiologi Marshall dalam Solichin Abdul Wahab (1997), agaknya merupakan satu-satunya orang yang dari berbagai kutipan yang dimuat disini merumuskan evaluasi dalam kaitannya dengan penelitian kebijakan. Ia merumuskan evaluasi sebagai berikut:

*a type of policy research devoted to assessing the consequences, intended and unintended, of a new policy programme or of an existing set of policies and practices, including measurement of the extent to which stated goals and objectives are being met, and measurement of displacement and substitution effects (Marshall, 1994: 161).*

Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan fungsional. Artinya evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan publik, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Salah satu prasyarat bagi pelaksanaan evaluasi yang baik, dan karenanya sering dianggap oleh para pakar kebijakan publik sebagai unsur esensial bagi berhasilnya implementasi kebijakan, ialah bahwa kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam *policy delivery* (pemberlakuan kebijakan) haruslah dispesifikasikan dan keluaran-keluaran yang diharapkan sedapat mungkin diidentifikasi. Disinilah terletak arti penting monitoring yang *ajek* (*continuous monitoring*). Sebab, sudah banyak fakta menunjukkan bahwa sebuah program gampang sekali mengalami perubahan, dan dalam praktik para pejabat birokrasi, dengan alasan-alasan tertentu, bisa saja melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbeda dari apa yang semula diharapkan. Dengan demikian, dalam mengevaluasi suatu program kalau hanya dilakukan dengan menfokuskan diri pada tujuan awal atau tujuan-tujuan asli (*original objectives*) kemungkinan akan mengantarkan kita pada kesimpulan (yang bisa jadi keliru) bahwa kebijakan itu telah gagal. Penarikan kesimpulan yang demikian jelas terlalu tergesa-gesa, bahkan menyesatkan karena kebijakan yang digariskan semula mungkin saja tidak pernah

secara sungguh-sungguh dilaksanakan. Oleh karenanya, dalam evaluasi penting kiranya untuk dibedakan secara tegas antara apa yang disebut sebagai kegagalan implementasi (*implementation failure*) yang justru menjadi tujuan monitoring untuk menghindarinya dan apa yang disebut sebagai kegagalan kebijakan (*policy failure*).

Studi evaluasi, menurut van Dusseldorp (1990), dapat dibedakan berdasarkan 2 (dua) kriteria pokok: siapa yang melaksanakan studi evaluasi itu dan pada tahapan perencanaan pembangunan yang manakah evaluasi tersebut dilaksanakan. Siapakah yang melaksanakan studi evaluasi? Secara singkat dapat dikatakan bahwa studi evaluasi yang dilaksanakan oleh orang-orang yang terlibat langsung dalam persiapan atau implementasi sebuah proyek, disebut sebagai evaluasi internal. Sedangkan evaluasi yang dilaksanakan oleh orang-orang yang terlibat langsung dalam persiapan desain proyek ataupun implementasinya disebut evaluasi eksternal. Pada tahapan perencanaan pembangunan yang manakah studi evaluasi itu dilaksanakan? Apabila evaluasi itu berlangsung sebelum kegiatan tertentu dilaksanakan, maka evaluasi itu disebut evaluasi *ex ante*. Sedangkan evaluasi tersebut berlangsung sesudah kegiatan tertentu dilaksanakan maka disebut evaluasi *ex post*. Evaluasi *ex post* paling tepat jika dilakukan dengan cara meninjau secara menyeluruh dan sistematis terhadap proyek yang ada. Ditengah-tengah kedua tipe evaluasi ini ada yang disebut evaluasi interim (Van Dusseldorp, 1990).

Menurut Subarsono (2013), evaluasi memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa kriteria atau indikator evaluasi yang dikembangkan oleh William N. Dunn, yaitu :

1. Efektifitas. Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai ?
2. Efisiensi. Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?

3. Kecukupan. Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?
4. Perataan. Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda ?
5. Responsivitas. Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu ?
6. Ketepatan. Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?

## 6. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program (Yohanes Ibi Hurint, 2013:34). Melakukan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan kegiatan yang direncanakan (Suharsimi Arikunto, 1993:297) dalam Yohanes Ibi Hurint (2013). Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan data dan informasi ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan.

Menurut Endang Mulyatiningsih (2011:114-115) mengemukakan bahwa evaluasi program bertujuan untuk :

- a) Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain.
- b) Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki, dihentikan.

Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif. Oleh sebab itu, dalam evaluasi program, pelaksanaan berfikir menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian. Dalam setiap rancangan program terdapat tahap evaluasi. Kenyataan itu menunjukkan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam rangkaian sebuah program. Casley dan Kumar (1987) dalam Yohanes Ibi Hurint (2013) "*evaluation is a periodic assesment of relevance, performance, efficiency and impact of the project in context of is stated objective*". Hal ini berarti evaluasi merupakan penilaian berkala terhadap relevansi, kinerja, efisiensi dan dampak dari suatu proyek dikaitkan dengan tujuan – tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pengertian evaluasi program menurut Patton dalam Yohanes Ibi Hurint (2013) adalah "*program evaluation is the collective information of system about the activities, characteristic and outcomes of program to make judgement about the program, improve program effectiveness and/or decision about the future programming*". Yang berarti evaluasi program merupakan kumpulan informasi yang sistematis tentang aktivitas, karakteristik dan hasil program untuk membuat penilaian tentang program, untuk meningkatkan efektifitas program, dan/atau menginformasikan tentang keputusan program yang akan datang.

## **7. Tinjauan Pemerintah**

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan "pe" menjadi kata "pemerintah" yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara. Secara ilmiah,

pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif (Kansil, 1984:21) dalam Rezki (2014:33).

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan dan harapan yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia berhak menerima layanan sipil (civil) tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya. Pemerintah maupun masyarakat berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hal inilah yang membentuk hubungan pemerintahan.

Berbagai konsep tentang pemerintah antara lain :

- a) Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
- b) Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945, dimana dinyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden

dilimpahkan “*concentration of power and responsibility*” (terpusat pada kekuasaan dan tanggung jawab).

- c) Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
- d) Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Samuel Finer (Syafi'ie 2004:) dalam Reski (2014:34) mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), harus mempunyai Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), mempunyai pejabat pemerintah (*the duty*) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (*manner, method, and system*) terhadap rakyatnya.

## **8. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat menurut Krishna (2003) dalam Eko Prasajo didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas perseorangan atau kelompok untuk mempengaruhi pengembangan (*development*) dan pilihan (hidup) dan mentransformasikan pilihan tersebut kedalam tindakan yang diinginkan dan kedalam hasil bagi pengembangan komunitas mereka. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kehidupan mereka. Berdasarkan pengertian ini, pada prinsipnya masyarakat diharapkan

mengkaji tantangan utama pembangunan mereka lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah ini. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan akan meningkatkan relevansi program pembangunan (pemerintah) terhadap masyarakat lokal dan meningkatkan kesinambungannya. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga diharapkan memiliki kontribusi dalam meningkatkan kinerja staf pemerintah dan kepuasan pelanggan atas pelayanan pemerintah. Berdasarkan pemahaman tersebut, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan perikehidupan mereka.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Otonomi) adalah kuatnya upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi secara utuh kepada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk

merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Upaya untuk melakukan pemberdayaan tersebut harus membuka akses bagi rakyat terhadap sumberdaya strategis yang dimiliki daerah baik yang berupa sumberdaya alam, pendapatan asli daerah (PAD), APBN dan sebagainya. Terbuka akses tersebut sebagai upaya untuk saling memiliki maupun sebagai kemanfaatan serta dilibatkannya dalam suatu perencanaan program program kerja. Dengan demikian ada partisipasi masyarakat terhadap sejumlah sumberdaya yang strategis yang ada, partisipasi disini meliputi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi serta pengontrol. Dalam pemberdayaan masyarakat yang perlu diperhatikan agar efektifitas program atau kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka harus tepat sasaran dalam arti mereka yang benar-benar dilapisan bawah ruang lingkungnya berada pada tingkat lokal (Harris, 2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional termasuk di daerah. Sistem perencanaan pembangunan di daerah dengan metode bottom-up bukan lagi top-down yang lazim kita kenal dengan sebutan “Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrebang)” tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Mekanisme ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui sistem perencanaan.

Menurut Ryant Nugroho (2014), syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam konteks kepentingan negara dan pemerintahan antara lain : 1) ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan). 2) ada ketelibatan secara emosional. 3) memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Partisipasi masyarakat sebagai salah satu elemen dalam mendorong terciptanya *good governance*, dalam hal ini pemerintah sebagai institusi pemerintah, menetapkan aturan serta kebijakan tentang partisipasi dengan ketentuan-ketentuannya, salah satunya dijelaskan dalam permendagri Nomor 7 Tahun 2007 yaitu partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan. Dalam setiap tahapan kegiatan partisipasi hendaknya harus menggunakan metode yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terlibat secara aktif, sehingga bisa terlihat bahwa partisipasi yang tujuannya dimaksudkan untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan partisipasi masyarakat (Wasistiono dalam Syamsuddin Haris, 2007).

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani, pada hakekatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disamping itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan, sebaiknya mengantarkan pada proses kemandirian. Pemberdayaan masyarakat terkait secara erat dengan tiga hal pokok, yaitu kearifan lokal, institusi, dan individu. Ketiga komponen ini harus saling mendukung dan melengkapi (Pheni Chalid, 2010). Masyarakat Indonesia selama berabad-abad berproses dengan nilai-nilai lokal yang menjadi pedoman hidup, dimana nilai-nilai lokal itu tercermin antara lain dalam pengelolaan tanah, pengolahan hutan, sistem irigasi, sistem gotong royong, dan sebagainya. Di masa orde baru keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan tanah dan hutan diabaikan, ini dapat dilihat dengan pemberian izin HPH tanpa dilibatkan masyarakat, dimasa

sekarang pengakuan hak-hak atas masyarakat diakui yang diperkuat adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, partisipasi masyarakat melalui pengawasan, pengendalian dapat dirasakan manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung, seperti pada pengelolaan sumberdaya alam pada lingkungan sekitar masyarakat, sebuah keharusan rekomendasi dari masyarakat tentang pemanfaatan sumberdaya disekitarnya atau partisipasi masyarakat dalam pemberian izin lokasi/prinsip, keterbukaan dan akuntabilitas rencana pengelolaan lebih lanjut keterlibatan masyarakat mutlak menjadi prasyarat seperti studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan keharusan tiap perusahaan memperhatikan masyarakat sekitar melalui “*Program Corporate Social Responsibility (CSR)*” yang dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 menjelaskan aturan program kemitraan seperti program/kegiatan pendidikan dan latihan, sarana prasarana umum dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 74 menerangkan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemerintah Daerah di hampir tiap kabupaten terdapat institusi khusus yang memiliki peranan yang besar terhadap program pemberdayaan masyarakat, yaitu Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa yang dikepalai setingkat eselon II. Dalam pelaksanaan roda pemerintahan, secara institusi sistem pemerintahan yang dikenal dengan istilah “*Good Governance*” dengan ciri pemerintahan yang didalamnya memasukkan unsur partisipasi masyarakat sipil yang sangat luas. Ciri-ciri *good governance* menurut *World Bank* :

a) Akuntabilitas politik

- b) Bebas berkumpul dan berpartisipasi
- c) Jaminan hukum
- d) Akuntabilitas Demokrasi
- e) Ketersediaan dan validasi informasi
- f) Manajemen publik yang efektif dan efisien.

Unsur-unsur yang penting adalah partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.

### 9. Rumput Laut, Komoditas yang Potensial

Menurut Jana T. Anggadireja dkk (2011) rumput laut tergolong tanaman berderajat rendah, umumnya tumbuh melekat pada substrat tertentu, tidak mempunyai akar, batang maupun daun sejati; tetapi hanya menyerupai batang yang disebut thallus. Rumput laut tumbuh di alam dengan melekatkan dirinya pada karang, lumpur, pasir, batu, dan benda keras lainnya. Selain benda mati, rumput laut pun dapat melekat pada tumbuhan lain secara epifitik.

#### a) Biologi dan Ekologi Rumput Laut

Pertumbuhan dan penyebaran rumput laut sangat tergantung dari faktor-faktor oseanografi (fisika, kimia, dan pergerakan atau dinamika air laut) serta jenis substrat dasarnya. Untuk pertumbuhannya, rumput laut mengambil nutrisi dari sekitarnya secara difusi melalui dinding thallusnya. Perkembangbiakan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara kawin antara gamet jantan dan gamet betina (generatif) serta secara tidak kawin dengan melalui vegetatif dan konjugatif.

Secara taksonomi, rumput laut dikelompokkan kedalam Divisio *Thallophyta*. Berdasarkan kandungan pigmennya, rumput laut dikelompokkan menjadi 4 kelas (Othmer, 1968; Anonim, 1997), yaitu sebagai berikut.

- 1) *Rhodophyceace* (ganggang merah)
- 2) *Phaeophyceace* (ganggang cokelat)
- 3) *Chlorophyceace* (ganggang hijau)
- 4) *Cyanophyceace* (ganggang biru-hijau)

Berdasarkan jenis rumput laut di Indonesia yang bernilai ekonomis dan sejak dulu sudah diperdagangkan yaitu *Eucheuma sp.*, *Hypnea sp.*, *Gracilaria sp.*, dan *Gelidium sp.* dari kelas *Rhodophyceace* serta *Sargassum sp.* dari kelas *Phaeophyceace*. *Eucheuma sp.* dan *Hypnea sp.* menghasilkan metabolit primer senyawa hidrokoloid yang disebut agar. Sementara, *Sargassum sp.* menghasilkan metabolit primer senyawa hidrokoloid yang disebut alginat. Rumput laut yang menghasilkan karaginan disebut pula *carageenophyte* (karaginofit), penghasil agar disebut *agarophyte* (agarofit), dan penghasil alginat disebut *alginophyte* (alginofit).

b) Habitat rumput laut

Pertumbuhan dan penyebaran rumput laut-seperti halnya biota perairan lainnya-sangat dipengaruhi oleh toleransi fisiologi dari biota tersebut untuk beradaptasi terhadap faktor-faktor. Lingkungan, seperti substrat, salinitas, temperatur, intensitas cahaya, tekanan, dan nutrisi. Secara umum, rumput laut dijumpai tumbuh didaerah perairan yang dangkal (*intertidal dan sublitoral*). Kondisi dasar perairan berpasir, sedikit lumpur, atau campuran keduanya. Rumput laut memiliki sifat *benthic* (melekat) hidup sebagai fitobentos dengan cara melekatkan thallus pada substrat pasir, lumpur berpasir, karang, fragmen karang mati, kulit kerang, batu, atau kayu. Ciri-ciri dan habitat beberapa rumput laut di perairan Indonesia sebagai berikut.

1) *Eucheuma cottonii*, *Eucheuma alvarezii*, atau *Kappaphycus alvarezii*

a. Nama daerah

Nama daerah (dagang) yang lebih dikenal untuk jenis ini yaitu *E. Cottoni*.

b. Ciri-ciri

Ciri-ciri *E. Cottoni* yaitu thallus silindris; permukiman licin; *cartilagineus* (menyerupai tulang rawan/muda); serta berwarna hijau terang, hijau *olive*, dan coklat kemerahan. Percabangan thallus berujung runcing atau tumpul, ditumbuhi nodulus (tonjolan-tonjolan), dan duri lunak/tumpul untuk melindungi gametangia. Percabangan bersifat alternatus (berseling), tidak teratur, serta dapat bersifat *dichotomus* (percabangan dua-dua) atau *trichotomus* (sistem percabangan tiga-tiga).

c. Habitat

Rumput laut *E. Cottoni* memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Oleh karena itu, rumput laut jenis ini hanya mungkin hidup pada lapisan fotik, yaitu kedalaman sejauh sinar matahari masih mampu mencapainya. Di alam, jenis ini biasanya hidup berkumpul dalam satu komunitas atau koloni dan indikator jenisnya (*species indicator*) antara lain jenis-jenis *Caulerpa*, *Hypnea*, *Turbibaria*, *Padina*, *Gracilaria*, dan, *Geladium*. *E. Cottoni* tumbuh dirataan terumbu karang dangkal sampai kedalaman 6 m, melekat di batu karang, cangkang karang, dan benda keras lainnya. Faktor yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan jenis ini yaitu cukup arus dengan salinitas (kadar garam) yang stabil, yaitu berkisar 28-34 per mil. Oleh karenanya rumput laut jenis ini akan hidup baik bila jauh dari muara sungai.

Jenis ini telah dibudidayakan dengan cara diikat pada tali sehingga tidak perlu melekat pada substrat karang atau benda lainnya.

Secara umum, beberapa faktor keberhasilan yang perlu diperhatikan dalam budidaya rumput laut sebagai berikut.

- 1) Pemilihan lokasi yang memenuhi persyaratan bagi jenis rumput laut yang akan dibudidayakan
- 2) Pemilihan atau seleksi bibit yang baik, penyediaan bibit, dan cara pembibitan yang tepat
- 3) Metode budi daya yang tepat
- 4) Pemeliharaan tanaman
- 5) Metode panen dan perlakuan pascapanen yang benar
- 6) Pembinaan dan pendampingan secara kontinu kepada petani

Rumput laut *Eucheuma sp.* mulai dibudidayakan secara masal pada tahun 1984, di Nusa Dua, Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Bali, serta Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat). Jenis rumput laut yang dibudidayakan adalah jenis *Eucheuma spionsum* dengan bibit lokal dan *Eucheuma cottonii* dengan bibit asal Filipina. Sesuai dengan perkembangan pasar, saat ini yang lebih banyak dibudidayakan adalah *Eucheuma cottonii*. Sebenarnya, budi daya genus (marga) *Eucheuma* relatif tidak sulit. Namun, bila pelaksanaannya tidak memperhatikan persyaratan serta teknik yang tepat maka hasil yang diperoleh tidak akan seperti yang diharapkan, terutama dari segi kualitas produk.

#### c) Pemilihan Lokasi

Keberhasilan budidaya rumput laut sangat ditentukan sejak penentuan lokasi. Hal ini dikarenakan produksi dan kualitas rumput laut dipengaruhi oleh

faktor-faktor ekologi yang meliputi kondisi substrat perairan, kualitas air, iklim, dan geografis dasar perairan. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam penentuan lokasi yaitu faktor kemudahan (aksesibilitas), risiko (masalah keamanan), serta konflik kepentingan (pariwisata, perhubungan, dan taman laut nasional).

#### 1) Kondisi dasar perairan

Umumnya, dasar perairan berupa pasir yang bercampur dengan pecahan karang. Kondisi substrat dasar seperti ini menunjukkan adanya pergerakan air yang baik sehingga cocok untuk budidaya rumput laut *Eucheuma sp.*

#### 2) Tingkat kejernihan air

Untuk budidaya rumput laut *Eucheuma sp.*, keadaan perairan sebaiknya relatif jernih dengan tingkat kecerahan tinggi, dan tampakan (jarak pandang kedalaman) dengan alat *sechidisk* mencapai 2-5 m. Kondisi seperti ini dibutuhkan agar cahaya matahari dapat mencapai tanaman untuk proses fotosintesis.

#### 3) Salinitas

Salinitas (kandungan garam NaCl dalam air) untuk pertumbuhan rumput laut *Eucheuma sp.* yang optimal berkisar 28-33 per mil. Oleh karena itu, lokasi budidaya diusahakan yang jauh dari sumber air tawar seperti dekat muara sungai karena dapat menurunkan salinitas air.

#### 4) Suhu Air

Suhu air yang optimal disekitar tanaman yaitu berkisar 26-30° C.

#### 5) Pergerakan air (arus dan ombak)

Lokasi untuk budi daya rumput laut *Eucheuma sp.* harus terlindung dari arus (pergerakan air) dan hempasan ombak yang terlalu kuat. Apabila hal ini terjadi, arus dan ombak akan merusak dan menghanyutkan tanaman. Pergerakan air berkisar 0,2-0,4 m/ detik. Dengan kondisi seperti ini, akan mempermudah penggantian dan penyerapan hara yang diperlukan oleh tanaman, tetapi tidak sampai merusak tanaman.

6) Pencemaran air

Hindari lokasi yang berdekatan dengan sumber pencemaran air, seperti industri dan tempat berstandarnya kapal-kapal.

7) Kedalaman air

Lokasi budidaya dengan kedalaman air pada saat surut terendah minimal 0,40 m sampai kedalaman dimana sinar matahari masih dapat mencapai tanaman dan petani mampu melakukan kegiatan. Metode budidaya yang akan digunakan akan sangat ditentukan oleh kedalaman air di lokasi budidaya

8) Aman dari predator dan kompetitor

Lokasi budidaya bukan merupakan tempat berkumpulnya predator rumput laut, seperti ikan, penyu, bulu babi, dan herbivora lainnya. Dengan demikian, kerusakan tanaman dapat ditekan, disamping juga dapat menghemat biaya pemeliharaan dan perlindungan terhadap hama tanaman.

9) Bukan merupakan jalur pelayaran

Untuk keamanan dan keberlanjutan budidaya maka lokasi yang dipilih bukan merupakan tempat yang menjadi jalur pelayaran.

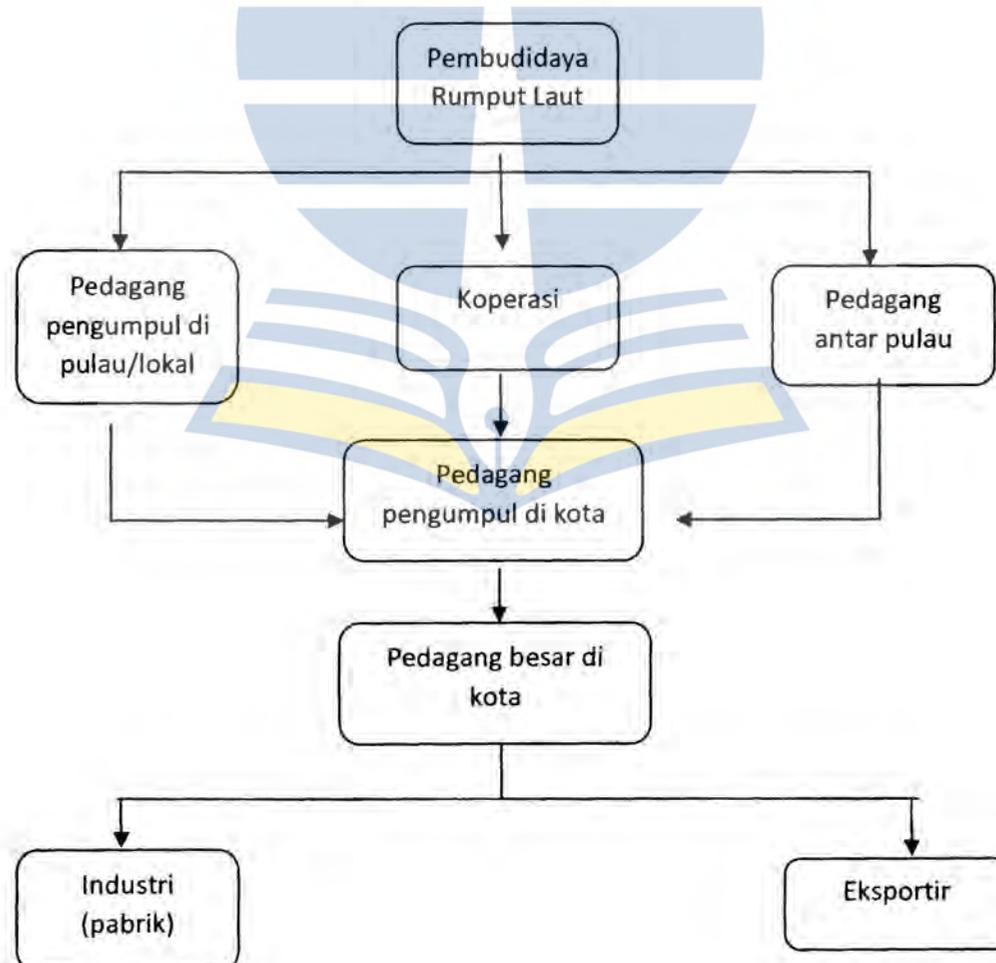
Rumput laut merupakan komoditas yang memiliki potensi untuk dikembangkan karena rumput laut sangat dibutuhkan dalam dunia industri baik dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya dalam industri makanan (agar-agar), kosmetik, pakaian, elektronik, perabot rumah tangga, kesehatan, dll. Kebutuhan industri yang tinggi dan iklim ekonomi yang baik menyebabkan kegiatan usaha rumput laut mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia termasuk di Kabupaten Nunukan, masyarakat sudah dapat mengolah menjadi olahan rumah tangga seperti kue, es rumput laut, dodol semuanya berbahan dasar rumput laut. Indonesia tercatat sebagai penghasil rumput laut terbesar di dunia. Ekonomi rakyat sekarang ini banyak digerakkan oleh kegiatan rumput laut, berdasarkan informasi beberapa bank di Kabupaten Nunukan puluhan milyar uang masuk ke Kabupaten Nunukan merupakan pembayaran rumput laut, seperti Kepala Bank BNI Nunukan pernah mengatakan ada Rp. 8 (delapan) Milyar uang yang berputar melalui kegiatan rumput laut dalam satu minggu. Rumput laut merupakan salah satu komoditas perikanan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara. Untuk Kabupaten Nunukan sebagai *locus* penelitian jenis rumput laut yang dikembangkan adalah *Eucheuma cottoni* / *Kappaphycus alvarezii* yang merupakan karaginan sebagai produk olahannya. Mekanisme pasar rumput laut di Kabupaten Nunukan terdiri dari simpul-simpul pedagang lokal, antar pulau, dan eksportir. Pembudidaya akan menjual hasil panennya pada pedagang lokal sebagai pengumpul/pengepul di pulau atau koperasi. Dari pedagang lokal atau pedagang antar pulau dijual ke pedagang kota. Selanjutnya oleh pedagang kota rumput laut dijual ke industri dalam negeri atau ke eksportir (surabaya dan makassar). Setiap

simpul ada yang memproses rumput laut dengan tujuan memperbaiki kualitas dan ada pula yang tidak. Pada tingkat eksportir mengecek ulang kondisi rumput laut yang mereka terima dari pengumpul atau pedagang antar kota untuk memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan Importir atau negara tujuan yang menjadi tujuan pengiriman rumput laut, umumnya negara tujuan ekspor rumput laut Indonesia adalah Cina dan Philipina. Persyaratan ekspor rumput laut jenis koton (*Eucheuma sp.*), seperti tabel berikut ini:

**Tabel 2.2 Persyaratan ekspor rumput laut jenis koton**

Uraian	Standarisasi
Kadar air (moisture content)	35 %
Kotoran dan garam (Impurity)	2 %

Sumber : Industri Rumput Laut PT.Gumindo



**Gambar 2.1. Rantai perdagangan rumput laut antarpulau**

Budidaya rumput laut sebagai suatu usaha perlu memperhatikan aspek-aspek manfaat dari sisi ekonomi. Pada bagan 1 tersebut diatas merupakan mekanisme pasar yang terjadi di Kabupaten Nunukan. Kota tujuan pengiriman rumput laut Kabupaten Nunukan, yaitu Makassar dan Surabaya. Jarak dari Nunukan ke kota tersebut sangat jauh, menjadikan biaya pengiriman cukup tinggi, ini tidak efisien dan jumlah yang dapat diangkut melalui kontener juga terbatas (tidak efektif). Sehingga pengiriman terkadang tidak lancar dan biaya mahal, ini sudah barang tentu mempengaruhi harga pada tingkat pembudidaya. Ada peluang mekanisme pasar yang diharapkan kedepan dengan memanfaatkan letak geografis Nunukan, yang menjadi negara tujuan ekspor adalah China dan Philipina, pelabuhan tawau (Malaysia) memiliki konektivitas dengan beberapa pelabuhan laut internasional seperti Negara China dan Philipina. Kedepan diharapkan pengiriman rumput laut (ekspor) dari nunukan ke negara tujuan ekspor melalui pelabuhan Tawau dengan sistem tranship di pelabuhan Tawau. Ini dapat menghemat biaya pengiriman dan waktu relatif cepat.

d) Sarana Prasarana Rumput Laut di Kabupaten Nunukan umumnya sarana prasarana yang digunakan, antara lain :

- 1) Tali pondasi, menggunakan tali 12
- 2) Tali bentang, menggunakan tali 5 atau tali 6
- 3) Tali bibit, menggunakan tali nilon biasa
- 4) Bibit rumput laut, tentunya bibit yang digunakan bibit berkualitas
- 5) Pelampung
- 6) Perahu untuk angkutan pemasangan bibit rumput laut, dan hasil panen

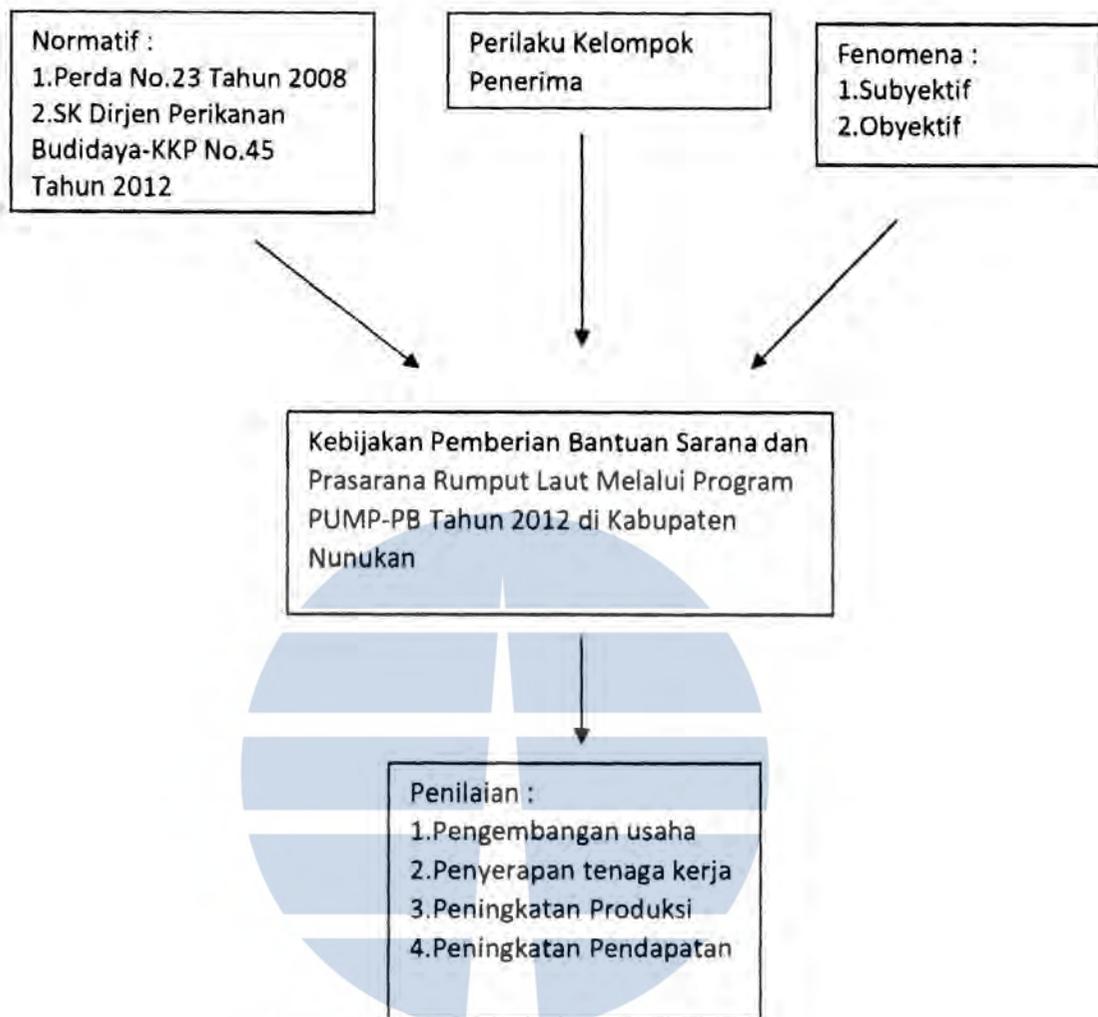
- 7) Alkon, digunakan untuk membersihkan rumput laut saat panen (untuk menghilangkan kotoran yang melengket pada rumput laut)
- 8) Para – para penjemuran rumput laut
- 9) Terpal, untuk menutup saat hujan, dapat juga berfungsi ssebagai memperbaiki kualitas (pewarnaan)
- 10) Tempat Penyimpanan, seperti gudang, dll.

Sarana prasarana rumput laut di Kabupaten Nunukan mungkin sedikit berbeda dengan daerah lain.

### **C. Kerangka Berpikir**

Kebijakan pemberian bantuan sarana prasana rumput laut di Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor Nomor 23 Tahun 2008. Indikator yang dijadikan tolok ukur dalam kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut di Kabupaten Nunukan, antara lain; (1) pengembangan usaha, (2) penyerapan tenaga kerja, (3) peningkatan produksi, (4) peningkatan pendapatan.

Setiap kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut di Kabupaten Nunukan berpedoman kepada indikator yang ada tujuannya untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang telah dijalankan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan. Evaluasi kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan dapat memberikan manfaat secara langsung pada masyarakat yang merupakan sasaran program.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

#### D. Definisi Konsep

Adapun konsep yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Konsep Kebijakan. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat atas nama pemerintah selaku penyelenggara negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari pemerintahan (negara).
2. Konsep Kelompok Pembudidaya. Dapat diartikan himpunan dari anggota pembudidaya (rumput laut) yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal

dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, pemenuhan kebutuhan anggotanya, memecahkan masalah bersama dan menjadi wadah usaha bersama.

3. Konsep Bantuan Sarana Prasarana Rumput Laut. Dapat diartikan sesuatu yang dapat diberikan berbentuk barang atau lainnya untuk memenuhi keperluan dalam melakukan kegiatan usaha pembudidayaan rumput laut.
4. PUMP-PB. Dapat diartikan sebagai Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya. Sebuah program yang dirancang oleh pemerintah pusat (nasional) dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pembudidaya dengan pendekatan pengembangan usaha, peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan.
5. Konsep Pemberdayaan. Pemberdayaan adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah, kurang mampu menjadi berdaya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sehingga peneliti dapat secara jelas dan rinci mendapatkan data yang mendalam dari fokus penelitian tersebut. Penggunaan metode kualitatif dilakukan secara intensif. Peneliti juga berada dilapangan yang cukup, guna mencatat secara hati-hati secara detail mengenai apa yang terjadi, menganalisis berbagai dokumen apa yang ditemukan dilapangan. Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dan terlibat secara langsung dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan, yaitu terdiri dari: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Barat, Kelompok Penerima, Tenaga Pendamping, Penyuluh Lapangan setempat dan unsur-unsur yang terlibat langsung dalam pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut di Kabupaten Nunukan. Peneliti memberikan pertanyaan yang terkonsentrasi pada fokus yang diteliti, bersikap netral dan obyektif sehingga rancang bangun penelitian dapat dideskripsikan dengan baik.

#### **B. Fokus dan Dimensi Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Agar penelitian lebih terarah perlu ditentukan Fokus penelitian. Fokus penelitian memberikan batasan ruang lingkup penelitian yang bertujuan untuk membatasi wilayah pengamatan dengan memberikan batasan konseptual terhadap fenomena yang diteliti dan selanjutnya menguraikan

dimensi-dimensi dan subdimensi (kriteria) apa saja yang diamati untuk dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan penelitian yang diajukan. Adapun fokus dan dimensi penelitian yang telah dilakukan yaitu evaluasi proses penilaian kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB Tahun 2012 :

1. Proses kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana rumput laut melalui program pump-pb tahun 2012 di Kabupaten Nunukan ;
  - a. Tujuan kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana rumput laut melalui program pump-pb tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.
  - b. Pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana rumput laut melalui program pump-pb tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.
  - c. Hasil kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana rumput laut melalui program pump-pb tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.
  - d. Perkembangan usaha kelompok penerima manfaat (pokdakan).
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana rumput laut melalui program pump-pb tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.
3. Upaya – upaya yang dilakukan untuk optimalisasi kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana rumput laut melalui program pump-pb tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah lokasi kelompok penerima bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan, yaitu di Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat, Kelurahan

Nunukan Utara Kecamatan Nunukan, Kelurahan Mansapa dan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan. Selanjutnya penentuan sampel anggota pembudidaya yang tergabung dalam kelompok penerima bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.

#### **D. Sumber Data dan Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

##### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Data primer didapat dari kunjungan langsung ke lapangan melalui wawancara yang dilakukan peneliti. Data primer tersebut antara lain berupa:

- 1) Catatan hasil wawancara
- 2) Hasil observasi lapangan
- 3) Data-data mengenai informan

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada maupun dari hasil dokumentasi. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu seperti bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dokumentasi dan lain sebagainya.

Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, ia “berkewajiban” secara sukarela menjadi anggota tim dalam penelitian walaupun bersifat informal. Informan penelitian ini

adalah anggota kelompok penerima bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan, staf dinas kelautan dan perikanan yang membidangi, tenaga penyuluh lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan informan triangulasi yang berfungsi sebagai sumber informasi untuk meninjau kembali dengan membandingkan antara sumber informasi yang satu dengan sumber informasi lainnya, seperti data hasil dari wawancara dengan staf dinas kelautan dan perikanan dengan anggota kelompok penerima maupun dengan data hasil studi dokumen dan observasi, ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih baik dan lengkap. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu relatif singkat banyak informasi terjangkau, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, ataupun membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek yang satu dengan subyek lainnya (Bogdan & Biklen, 1992).

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pada banyak program, pendekatan pengumpulan data yang paling baik untuk tujuan pengamatan yaitu observasi langsung. Menurut Shatzman dan Strauss dalam Riyadi Soeprapto, 1998) bagian penting dari usaha observasi adalah suatu rencana untuk pembuatan catatan observasi yang sistematis. Karakteristik dari penelitian kualitatif adalah peneliti atau dengan bantuan pihak lain merupakan instrumen dalam pengumpulan data. Karena, salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah bahwa manusia merupakan instrumen dalam pengumpulan data. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data langsung dalam bentuk tanya jawab dengan informan. Berpedoman pada daftar pertanyaan. Dengan pokok pertanyaan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb tahun 2012 di Kabupaten Nunukan, yaitu melakukan wawancara langsung pada anggota kelompok penerima bantuan (pokdakan) yang terpilih (pokdakan wahana hijau, ilham jaya, liang bunyu pantai 1 dan anugrah)

## 2. Pengamatan

Pengamatan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati secara langsung pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump\_pb Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan pada kelompok penerima yaitu pokdakan wahana hijau, ilham jaya, liang bunyu pantai 1 dan anugrah

## 3. Dokumentasi

Data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai pihak sesuai kebutuhan.

## **F. Analisis Data**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif yaitu metode yang menjelaskan atau mendeskripsikan fakta yang ada tentang kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.

## **G. Teknik Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif harus memiliki kriteria atau standar validitas dan reliabilitas yang memiliki spesifikasi tersendiri. Menurut Lincoln dan Guba

(dalam Ani Juhairiah,2015), paling sedikit ada empat standar atau kriteria utama guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, yaitu:

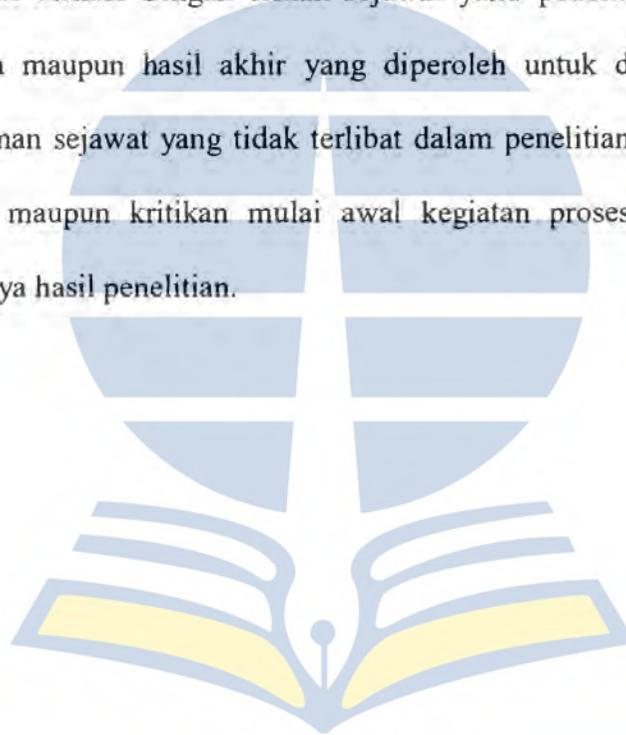
1. Standar kredibilitas yaitu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.
2. Transferabilitas yaitu pada prinsipnya pertanyaan empirik tidak dijawab oleh peneliti sendiri tetapi dinilai oleh para pembaca laporan penelitian.
3. Dependabilitas yaitu adanya pengecekan atau penilaian akan ketepatan peneliti dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti, dan
4. Konfirmabilitas yaitu lebih terfokus pada audit (pemeriksaan) kualitas dan kepastian hasil penelitian benar berasal dari pengumpulan data di lapangan.

Untuk memenuhi standar kriteria diatas yang ditujukan untuk menjamin kepercayaan data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan teknik keabsahan data yaitu :

1. Memperpanjang keikutsertaan langsung peneliti dalam pengumpulan data di lapangan. Hal ini mengingat karena dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen utama, dengan semakin lamanya peneliti terlibat dalam pengumpulan data maka semakin memungkinkan meningkatnya derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
2. Melakukan observasi secara terus menerus dan sungguh-sungguh terhadap subjek yang diteliti guna memahami secara mendalam tentang fenomena yang diteliti seperti apa adanya sehingga peneliti dapat mengetahui aspek yang penting, terfokus dan relevan dengan penelitiannya. Dalam melakukan observasi, peneliti melakukan secara terbuka, berusaha menyatukan diri tanpa ada penghalang dengan informan dan melakukannya secara cermat serta tidak

tergesa-gesa dalam memberikan penafsiran guna mengumpulkan data yang lebih banyak serta menghindari tafsiran yang keliru.

3. Melakukan Triangulasi yaitu proses *check and recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya yang ditujukan untuk memahami satu fenomena. Triangulasi ini merujuk pada pengumpulan data sebanyak mungkin dari berbagai sumber, seperti data yang diperoleh melalui studi dokumen, hasil wawancara dan observasi.
4. Melakukan diskusi dengan teman sejawat yaitu peneliti mengkespos hasil sementara maupun hasil akhir yang diperoleh untuk didiskusikan dengan teman-teman sejawat yang tidak terlibat dalam penelitian untuk memberikan masukan maupun kritikan mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Nunukan awalnya berdiri pada Tahun 1999 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah paling utara dari propinsi Kalimantan Utara. Posisi Kabupaten Nunukan berada didaerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang menjadikannya sebagai daerah strategis dalam peta lalu lintas antar negara. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.263.68 km<sup>2</sup> dan memiliki 10 sungai dan 23 pulau. Kabupaten Nunukan terletak diantara 115°33' sampai dengan 118°3' Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara. Adapun batasan wilayah administratif kabupaten adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Malaysia Timur Sabah.

Sebelah Timur : Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.

Sebelah Barat : Malaysia Timur – Serawak

Kecamatan Lumbis Ogong merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yang ada di Kabupaten Nunukan, yaitu sebesar 3.357,01 km<sup>2</sup>, Kecamatan Lumbis dengan luas 290,23 km<sup>2</sup>, Kecamatan Sembakung dengan luas 1.764,94 km<sup>2</sup>, Kecamatan Sembakung Atulai dengan luas 227,72 km<sup>2</sup>, Kecamatan Nunukan sebesar 564,50 km<sup>2</sup>, Kecamatan sei Menggaris dengan luas 850,48 km<sup>2</sup>, Kecamatan Nunukan Selatan dengan luas 181,77 km<sup>2</sup>, Kecamatan Sebuku dengan

luas 1.608,48 km<sup>2</sup>, Kecamatan Tulin Onsoi dengan luas 1.513,36 km<sup>2</sup>, Kecamatan Sebatik 51,07 km<sup>2</sup>, Kecamatan Sebatik Timur dengan luas 39,17 km<sup>2</sup>, Kecamatan Sebatik Tengah dengan luas 47,71 km<sup>2</sup>, Kecamatan Sebatik Utara dengan luas 15,39 km<sup>2</sup>, Kecamatan Sebatik Barat dengan luas 93,27 km<sup>2</sup>. atau, diikuti Kecamatan Sembakung sebesar 2.055,90 km<sup>2</sup> (14,41%), Kecamatan Krayan sebesar 1.834,74 km<sup>2</sup>, Kecamatan Krayan Selatan sebesar 1.757,646 km<sup>2</sup>, Kecamatan Nunukan sebesar 1.421,98 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Nunukan Selatan sebesar 174,79 km<sup>2</sup>.

a. Iklim

Kabupaten Nunukan dan sekitarnya beriklim panas dengan suhu rata-rata tertinggi 31.1°C dan suhu rata-rata terendah 23.20°C. Curah hujan tertinggi berkisar 194.6mm pada bulan Desember dan terendah 100.9 mm pada bulan September, kelembaban udara berkisar antara 55-99 persen dengan kecepatan angin antara 5-7 knots. Sedangkan intensitas penyinaran matahari rata-rata 49%, penyinaran matahari terendah 32% pada bulan Agustus dan penyinaran matahari tertinggi 62% pada bulan Februari.

b. Topografi

Kondisi Topografi Kabupaten Nunukan terutama terutama kecamatan Sembakung pada umumnya terdiri dari Rawa hingga pegunungan dengan ketinggian tempat antara 500 – 3.000 meter. Keadaan topografi perbukitan memiliki sudut kelerengan hingga sampai lebih dari 30 persen untuk daerah perbukitan, sedangkan daerah daratan tinggi mempunyai mempunyai kemiringan berkisar antara 8 – 15 persen, sedangkan untuk daerah yang merupakan perbukitan kemiringan sangat terjal bisa mencapai 15% untuk Pulau Sebatik dan

Pulau Nunukan tofografinya sedikit brgelombang dan sebagian besar datar dengan kemiringan 0-3%. Wilayahnya sebagian besar didominasi oleh satuan fisiografi gunung (mountain) dan daratan (plain). Kondisi topologi dan kelerengan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2.

**Tabel 4.1. Kondisi Topografi di Kabupaten Nunukan**

No	Ketinggian	Luas	%
1		716808	50.25372
2	100-500	155122	10.87524
3	500-1000	284981	19.97935
4	1000-1500	269221	18.87445
5	1500-2000	246	0.017246
<b>TOTAL</b>		<b>1426378</b>	<b>100</b>

Sumber: Nunukan Dalam Angka (2015)

**Tabel 4.2. Kondisi Kelerengan di Kabupaten Nunukan**

No	Kemiringan	Luas	%
1		474984	33.30001
2	2-8	86733	6.080646
3	8-15	126511	8.869388
4	15-25	125594	8.805099
5	25-40	110502	7.747035
6	> 40	502054	35.19782
<b>TOTAL</b>		<b>1426378</b>	<b>100</b>

Sumber : Nunukan Dalam Angka (2015)

c. Tanah

Pada umumnya tanah di Kabupaten Nunukan, terutama dibagian Selatan Kecamatan Sembakung terdiri dari tanah podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan relatif rendah karena memiliki lapisan "top soil" yang tipis. Kondisi daerah daratan tinggi relatif mudah terkena erosi khususnya daerah-daerah yang kondisi hutannya gundul. Tanah dataran rendah yang merupakan tanah-tanah sedimen pada tepi sungai dan laut sangat dipengaruhi oleh naik turun air sungai.

Struktur tanah pada umumnya sub angular blocky dengan PH tanah berkisar antara 3.5 – 4.5.

d. Geologi

Kondisi Geologi Kabupaten Nunukan sebagian besar didominasi tanah liat berlempung terutama daerah bagian barat, disamping itu terdapat pula kandungan batuan yang meliputi pasir kwarsa dan batuan liat. Dan struktur geologi daerah ini banyak dijumpai patahan dan lipatan yang pada umumnya terdapat di daerah pantai karena adanya beberapa pulau-pulau kecil yang berada di sekitar Kabupaten Nunukan.

e. Guna Lahan

Pola penggunaan lahan terdiri dari lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan dan kehutanan. Sebagian besar pemukiman penduduk berada di kawasan pesisir menepati daerah-daerah rendah, di tepi pantai, muara-muara kecil dan bantaran sungai. Jenis-jenis penggunaan lahan terdiri atas permukiman, pertanian yang meliputi penggunaan lahan untuk perkebunan dan persawahan, kehutanan, perikanan. Lokasi konsesi untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, serta lahan untuk fasilitas umum.

**Tabel 4.3. Perkiraan Penggunaan Lahan di Kabupaten Nunukan**

No	Uraian	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Permukiman	17.21	0.118
2	Pertanian	615.95	4.223
3	Padang rumput	0	0.000
4	Semak/alang-alang	0.15	0.001
5	Hutan	13.264.67	90.943
6	Lahan Kritis	-	-
7	Lahan Lainnya	36.61	0.251
8	Waduk/rawa/danau	651.11	4.464
<b>TOTAL</b>		<b>14.585.70</b>	<b>100</b>

Sumber : Nunukan Dalam Angka (2015)

Pembangunan pada kawasan perkotaan dan pedesaan merupakan aspek penting dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional. Pembangunan disini bisa berarti suatu langkah peningkatan prasarana dan sarana suatu kawasan dari sisi kualitas (mutu), kuantitas (jumlah) dan jenisnya. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan dititik-beratkan pada keselarasan pembangunan dan keserasian pertumbuhan wilayah regional perkotaan dan pedesaan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kawasan perkotaan dan pedesaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif dan berkelanjutan, serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan perekonomian dan pengembangan wilayah.

Untuk merumuskan kebijakan pembangunan disuatu daerah administrasi maka diperlukan data-data awal yang lengkap sehingga skala prioritas dapat diambil sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi wilayah yang dikembangkan. Ketersediaan data terutama yang terkait dengan akses sarana dan prasarana potensi yang sangat berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat adalah menitik beratkan pada sarana yang paling potensial adalah jalan yang layak guna memperlancar aspek sosial ekonomi maupun budaya daerah yang akan dikembangkan di daerah yang lain setelah itu berpikir tentang pengembangan ekonomi maupun hunian yang layak bagi warga sekitar.

a. Kependudukan

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan pada Tahun 2014 sebanyak 170.042 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 11,93 jiwa/km<sup>2</sup>

yang terdiri dari laki-laki sebanyak 90.824 jiwa dan perempuan sebanyak 79.218 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 114,65.

b. Potensi Perikanan

Luas wilayah laut Kabupaten Nunukan yang mencapai 1.408.758 km<sup>2</sup>, Nunukan memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. Total produksi perikanan pada 2 tahun terakhir mencapai sekitar 6.558 ton. Sebagian besar merupakan hasil tangkapan ikan yang berpusat di Perairan Laut Sulawesi di Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat dan Kec. Nunukan. Sementara untuk budidaya perikanan berupa tambak dan perikanan darat lainnya difokuskan pada budidaya tambak udang, kepiting, tiram dan beberapa jenis ikan air tawar. Peluang investasi disektor perikanan sangat terbuka luas bagi industri galangan kapal, industri pengolahan hasil perikanan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan. Produksi perikanan pada tahun 2008 tercatat 46.433,77 ton, yang terdiri atas 2.492,62 ton produksi perikanan penangkapan dan 43.951,15 ton perikanan budidaya. Pada tahun 2009 jumlah rumah tangga perikanan penangkapan tercatat 2.589 rumah tangga atau turun sebesar 9,57 persen dibandingkan tahun 2008. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk perikanan, maka pengembangan industri pengolahan hasil perikanan sangat strategis dan mempunyai prospek yang sangat cerah, mengingat sebagian besar hasil tangkapan saat ini diolah secara tradisional seperti teri dan udang kering (ebi) dengan produksi masing-masing mencapai 120 Ton dan 1,3 Ton/tahun. Sedangkan produksi ikan segar mencapai 4.692 Ton, Udang 301,6 Ton dan Tiram.

## 2. Deskriptif Objek Penelitian

Kelompok penerima bantuan atau yang disebut juga pokdakan penerima bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan terdiri 4 kelompok. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda. Jumlah anggota kelompok berbeda bergantung pada luas area lokasi budidaya rumput laut. Semakin besar luas area yang digunakan dalam budidaya rumput laut, maka akan semakin banyak pula jumlah anggota kelompok tersebut. Daftar nama-nama kelompok yang menerima bantuan PUMP-PB tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.4.

**Tabel 4.4. Daftar Nama Kelompok Penerima Bantuan**

No	Nama Kelompok	Alamat	Pengurus
1	Ilham Jaya	Jl. Dewi Sartika Rt.05	Ketua : Aje Sekretaris : Mappi Jampi Bendahara : Jusri Pegawas : Halim Anggota : Aras, Husni, Rusdi, salmia, Rahma, Saharudin, Junaidi, Amir, Suryanti, Sabri, Suprianto, Muh. Tang, Juna, Jaenuddin, Yusup, Hasanuddin, Murni
2	Wahana Hijau	Jl. Yos Sudarso RT. 02	Ketua : Abidin Sekretaris : Budi Rozhandi Bendahara : Sudirman Pengawas : Syamsul Alam Anggota : Syarifuddin, Tandra A, Jusman S, Madereman, Usman N, Dedy Rahim, Selle, Sabilu, Aco N, Hasbi, Ismail, Mansur M, Sire Bin Bacotang, Ahmad Tahir.
3	Anugerah	Jl. Mansapa Rt. 02	Ketua : Suardi Sekretaris : Hasma Bendahar : Kasman Pengawas : Dhian Wahyudi Anggota : Simbo, Jumiati, Sarifuddin, Susi, Muliati, Ira S.M, Mahmud E.

No	Nama Kelompok	Alamat	Pengurus
4	Liang Bunyu Pantai I	Jl. Daming Rt. 07 Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat	Ketua : Alimuddin Sekretaris : Wahe R Bendahara : Muh. Yusuf Pengawas : Eko Syahrudin Anggota : Mistang, Muh. Neng, Musliadi, Langsang, Kamaruddin, Kanna, Amiruddin,

Berdasarkan data dari empat kelompok penerima bantuan dana PUMP-PB, jumlah anggota penerima bantuan Ilham Jaya memiliki jumlah anggota yang paling banyak terdiri dari 21 orang. Hal ini dipengaruhi karena area yang digunakan kelompok Ilham Jaya lebih luas. Jumlah anggota kelompok Wahana Hijau terdiri 19 orang. Sedangkan pada kelompok Anugerah dan Liang Bunyu Pantai I memiliki jumlah anggota yang sama yaitu 11 orang.

### 3. Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan PUMP-PB Tahun 2012

#### a. Teknis Pelaksanaan Kegiatan

##### 1) Perencanaan

Kegiatan PUMP-PB alokasi dananya berasal dari APBN Pusat melalui Satuan Kerja (Satker) Direktorat Usaha Perikanan Budidaya TA. 2012, diperuntukkan guna membiayai penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUMP-PB yang akan disalurkan kepada pokdakan sebanyak 3.000 paket dan 600 paket pendukung PKN yang tersebar di 393 kabupaten/kota di 33 provinsi.

Disamping itu dialokasikan juga anggaran APBN Pusat, APBN Dekonsentrasi dan APBD TA. 2012 yang digunakan untuk mendukung atau menunjang kegiatan lainnya seperti honor tim, pelaksanaan identifikasi, seleksi dan verifikasi, penyusunan dokumen, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

Berdasarkan alokasi anggaran yang ada tersebut, Dinas KP Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan, dapat melakukan perencanaan kegiatan PUMP-PB untuk masing-masing lokasi, jenis dan jadwal pelaksanaan kegiatan, jumlah pokdakan yang akan menerima BLM, jenis komoditas budidaya yang akan dikembangkan dan lain-lain.

Setelah perencanaan selesai, maka tahap selanjutnya adalah sosialisasi, yaitu memberikan penjelasan tentang kegiatan PUMP-PB kepada pelaksana di daerah dan masyarakat calon sasaran, terutama mengenai tata cara penyaluran BLM PUMP-PB, tujuan, sasaran, pemanfaatan BLM PUMP-PB, hak dan kewajiban serta hal-hal terkait lainnya.

## 2) Identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) BLM PUMP-PB

### a) Identifikasi Calon Penerima (CP) BLM PUMP-PB

Untuk dapat menentukan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) calon penerima BLM yang sesuai dan tepat sasaran, maka perlu dilakukan identifikasi pokdakan di lapangan, identifikasi calon penerima PUMP-PB diawali dengan pengumpulan data dan informasi anggota pokdakan sebagai berikut:

- a. Pembudidaya ikan pemula dan tenaga terdidik.
- b. Pembudidaya ikan yang sudah tergabung dalam kelompok.
- c. Pembudidaya ikan di daerah marjinal (perbatasan, pulau terluar dan tertinggal).
- d. Pembudidaya ikan yang merupakan aspirasi masyarakat.

- e. Untuk PKN, peserta adalah buruh nelayan, keluarga nelayan, nelayan musiman, masyarakat pesisir yang berada di sekitar PP/PPI atau di sekitar perkampungan nelayan.

**b) Identikasi Calon Lokasi (CL)**

Untuk mempersiapkan lokasi yang tepat dan memenuhi kriteria, maka perlu dilakukan identifikasi calon lokasi dengan cara meninjau ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai berikut:

- a. Potensi dan kondisi lahan serta perairan yang cocok dan layak untuk kegiatan usaha budidaya ikan, sesuai jenis budidaya dan komoditas yang akan dibudidayakan.
- b. Mempunyai aksesibilitas atau dapat dijangkau.
- c. Masyarakatnya mendukung dilaksanakannya kegiatan PUMP-PB.
- d. Alamat lengkap dan titik koordinat.
- e. Lokasi PKN diarahkan ke PP/PPI dan sekitarnya atau perkampungan nelayan.

Secara rinci format identifikasi CL dapat dilihat pada lampiran 3. Data dan informasi dari hasil identifikasi lapangan tersebut selanjutnya dikompilasi dan diverifikasi keabsahannya untuk dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dan seleksi kelayakan lokasi kegiatan PUMP-PB.

**3) Seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) BLM PUMP-PB**

**a) Seleksi Calon Penerima (CP) BLM PUMP-PB**

Seleksi calon penerima BLM PUMP-PB perlu dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kriteria dan persyaratan penerima BLM PUMP-PB sebagai berikut:

- 1.1 Kriteria Umum Pokdakan Calon Penerima (CP) BLM PUMP-PB
- a. Usaha pokdakan termasuk kategori usaha mikro.
  - b. Pengurus dan anggota pokdakan bukan perangkat desa/kelurahan, PNS, TNI/Polri dan Penyuluh/PPTK.
  - c. Anggota pokdakan berdomisili/berada di desa yang sama atau desa yang berdekatan dengan lokasi usahanya.
  - d. Terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota.
  - e. Diutamakan pokdakan yang belum menerima bantuan dari Ditjen Perikanan Budidaya.
  - f. Kelompok tidak boleh menerima lebih dari 1 (satu) paket BLM PNPM Mandiri KP.
- 1.2 Kriteria Teknis Pokdakan Calon Penerima (CP) BLM PUMP-PB
- a. Merupakan penduduk setempat yang tidak mampu dan belum mempunyai penghasilan tetap (KTP/identitas lain dan alamat yang jelas)
  - b. Mempunyai usaha budidaya ikan milik sendiri, sewa, penggarap atau wirausaha pemula
  - c. Bersedia bergabung dalam kelompok dengan jumlah anggota minimal 10 orang per kelompok
  - d. Berusaha dibidang budidaya ikan dengan komoditas yang sama dalam satu kelompok
  - e. Pokdakan mengusulkan untuk memperoleh BLM PUMP-PB kepada Dinas Kabupaten/Kota

- f. Bersedia menandatangani dokumen administrasi penyaluran BLM PUMP-PB seperti RUK/RUB, kwitansi, PKS, SPK, Berita Acara Serah Terima BLM dan lain-lain serta memanfaatkan bantuan tersebut untuk pengadaan wadah, sarana produksi dan peralatan budidaya untuk pengembangan usaha budidaya ikan.
- g. Bersedia mengikuti ketentuan penerapan CPIB/CBIB, teknologi anjuran dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala
- h. Bersedia mengikuti bimbingan, pembinaan, dan pendampingan teknologi budidaya ikan yang efisien dan produktif, agar usahanya berhasil dan menguntungkan

b) Seleksi Calon Lokasi (CL)

Seleksi dilakukan terhadap calon lokasi sasaran kegiatan PUMP-PB agar lokasi terpilih memenuhi persyaratan teknis budidaya ikan. Kriteria memilih lokasi yang tepat dengan memperhatikan:

- a. Kondisi tanah dan kualitas air cocok dan layak untuk budidaya ikan.
- b. Kepemilikan lahan jelas (milik sendiri, sewa atau garapan) dan tidak dalam sengketa.
- c. Lingkungan tidak tercemar.

Berdasarkan hasil identifikasi dan hasil seleksi tersebut, Tim Teknis menyusun daftar nominasi lokasi dan kelompok pembudidaya ikan calon penerima BLM PUMP-PB dengan dilengkapi Berita Acara sesuai lampiran 4 sebagai bahan usulan penetapan pokdakan yang akan menerima PUMP-PB.

#### 4) Pengusulan dan Penetapan Pokdakan Calon Penerima (CP) BLM PUMP-PB

Pengusulan pokdakan CP BLM PUM-PB dilakukan berjenjang, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tim Teknis dan tenaga pendamping melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi usulan pokdakan CP BLM PUM-PB.
2. Berdasarkan hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi pokdakan CP BLM PUM-PB, Tim Teknis mengusulkan CP BLM PUM-PB tersebut kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, yang selanjutnya diusulkan kepada Tim Pembina Dinas KP Provinsi.
3. Tim Pembina memverifikasi ulang usulan pokdakan CP BLM PUM-PB sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis untuk selanjutnya diusulkan kepada Pokja. Apabila persyaratan tidak sesuai atau tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke Tim Teknis untuk diperbaiki dan diusulkan kembali jika sudah lengkap dan benar.
4. Pokja memverifikasi ulang calon pokdakan CP BLM PUM-PB untuk selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk ditetapkan. Apabila berkas tidak sesuai persyaratan atau tidak lengkap, maka dikembalikan ke Tim Pembina untuk diperbaiki dan diusulkan kembali jika sudah lengkap dan benar.
5. Direktur Jenderal selaku penanggungjawab program dan kegiatan menetapkan pokdakan penerima BLM PUMP-PB melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

6. Direktur Jenderal selaku penanggungjawab program dan kegiatan melaporkan penetapan pokdakan penerima BLM PUMP-PB kepada Tim Koordinasi.

Dalam rangka percepatan realisasi penyaluran BLM PUM-PB kepada pokdakan, batas akhir pengusulan pokdakan calon penerima BLM PUM-PB dijadwalkan pada bulan April, agar pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan pada bulan Mei, sehingga calon penerima BLM PUM-PB dapat ditetapkan paling lambat pada bulan Juni 2012, kemudian dilanjutkan dengan proses pencairan dan penyaluran. Dengan demikian, pemanfaatan BLM PUM-PB oleh pokdakan diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun berjalan dan seluruh dana bantuan yang dikeluarkan untuk usaha budidaya ikan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pengadaan atau pembelian (kwitansi, nota, faktur, dll) sesuai yang ditetapkan.

#### 5) Pendampingan

Proses pendampingan kepada pokdakan penerima BLM PUM-PB merupakan kegiatan yang penting dan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya pendampingan maka kemampuan dan keterampilan pembudidaya dapat meningkat, wawasan manajemennya berkembang, pola kerjanya lebih efisien, serta usahanya lebih produktif dan keuntungan diharapkan dapat lebih meningkat. Oleh karena itu, pokdakan penerima BLM PUM-PB senantiasa perlu didampingi oleh Tenaga Pendamping untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dibidang budidaya ikan serta sikap perilaku yang baik agar usahanya bisa berkembang, maju dan mandiri. Proses pendampingan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

### 1. Sosialisasi Kegiatan PUMP-PB

Pelaksanaan sosialisasi merupakan kegiatan lapangan guna memberikan penjelasan tentang tujuan dilaksanakannya PUMP-PB kepada masyarakat kelompok pembudidaya ikan peserta kegiatan ini. Disamping itu, disampaikan juga informasi lainnya seperti ketentuan dan persyaratan menjadi peserta PUMP-PB, cara memperoleh dan memanfaatkan dana BLM PUMP-PB untuk usaha budidaya ikan, sosial kemasyarakatan dan kearifan lokal serta motivasi untuk bekerja keras agar usahanya berhasil sehingga masalah kemiskinan dapat teratasi.

### 2. Penumbuhan Kelompok

Upaya penumbuhan kelompok dilakukan dengan berbagai metode diantaranya dengan memfasilitasi dinamika kelompok. Pada tahap ini dilakukan fasilitasi pertemuan antar pembudidaya ikan sebagai wujud untuk rasa kebersamaan diantara sejumlah masyarakat pedesaan misalnya melalui forum musyawarah desa/ajang diskusi, walimahan atau perkumpulan warga dan kepentingan lainnya. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut pembudidaya ikan calon peserta PUMP-PB diajak untuk mau bergabung dalam wadah kelompok dengan tujuan untuk usaha bersama, pembelajaran berorganisasi, penumbuhan minat berwirausaha dan lain-lain. Melalui kelompok, dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) para pembudidaya rumput laut dalam berusaha.

### 3. Pembinaan

Kegiatan usaha memerlukan keterampilan dalam mengelola usahanya secara baik sesuai dengan kaidah manajemen, untuk itu kelompok

pembudidaya ikan perlu mendapatkan pembinaan termasuk manajemen usaha. Manajemen usaha yang akan diterapkan antara lain pengelolaan input produksi, pemeliharaan, pemberian pakan, pengaturan tenaga kerja, pembukuan keuangan, pengendalian kualitas air dan lingkungan, pemberantasan hama penyakit dan sistem pencatatan semua transaksi dan tahapan pelaksanaan dengan dilengkapi Standar Operasi dan Prosedur (SOP) budidaya ikan. Demikian juga pembudidaya ikan sedapat mungkin dianjurkan melakukan pembukuan sederhana dan mencatat semua transaksi dalam proses pengelolaan usaha budidaya ikan.

#### 4. Pemupukan Modal Usaha

Pendampingan dan pembinaan terkait pengelolaan keuangan usaha kepada pokdakan merupakan hal yang berat dan perlu upaya yang terus menerus agar usahanya dapat berkembang, yaitu dengan memotivasi untuk memupuk modal usaha dengan cara menabung sebagian keuntungan dari hasil usahanya untuk dapat digunakan sebagai modal usaha siklus berikutnya. Tabungan dapat melalui kelompok atau bank sebagai pembelajaran bertransaksi dengan lembaga keuangan perbankan. Kelompok membuat rekening tabungan dengan nama PUMP-PB pokdakan (nama kelompok) di bank umum.

##### a. Penyaluran BLM PUMP-PB

###### 1. Penetapan Kelompok Sasaran

Berdasarkan hasil yang telah diidentifikasi, seleksi dan verifikasi oleh Tim Teknis, maka pokdakan calon penerima BLM PUMP-PB diusulkan kepada Tim Pembina dan selanjutnya diteruskan ke Pokja untuk ditetapkan

sebagai penerima dana BLM PUMP-PB melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

## 2. Pelaksanaan Penyaluran BLM PUMP-PB

BLM PUMP-PB yang diberikan kepada pokdakan yang telah ditetapkan, disalurkan secara langsung melalui transfer dana dari Satker Direktorat Usaha Perikanan Budidaya TA. 2012 ke rekening pokdakan. Penyaluran BLM PUMP-PB berpedoman pada peraturan PNPM Mandiri KP, yang pelaksanaannya direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok itu sendiri dengan bimbingan dan pembinaan dari Tenaga Pendamping serta dipantau oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

### b. Pemanfaatan BLM PUMP-PB

Dana BLM PUMP-PB yang sudah diterima oleh pokdakan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan usaha budidaya ikan selama periode pemeliharaan yang telah direncanakan. Pembatalan BLM PUMP-PB yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian sarana usaha budidaya seperti wadah/unit budidaya, perbaikan tambak/kolam, benih/induk ikan, pakan, prebiotik, obat-obatan dan lain-lain agar sesuai dengan RUK/RUB dan dilengkapi dengan bukti-bukti pembelanjaan yang sah seperti nota, kwitansi, faktur dan sejenisnya, dibukukan dan disimpan oleh pokdakan.

Kegiatan hasil usaha budidaya yang diperoleh dari hasil panen agar diatur dan dikelola oleh kelompok sebagai keuntungan untuk anggota, biaya operasional, perawatan dan penambahan modal untuk pengembangan usaha selanjutnya yang dilakukan secara bersama.

### c. Pemantauan dan Evaluasi

#### 1. Pemantauan

Pemantauan terhadap penggunaan BLM PUMP-PB untuk pengembangan usaha budidaya ikan dilakukan oleh Tenaga Pendamping dan Tim Teknis mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan usaha budidaya, meliputi Pemantauan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan. Pemantauan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan. Beberapa faktor pemantauan pekerjaan lapangan terdiri:

1. Pemantauan terhadap bahan seperti pengadaan, dan pemakaian bahan input produksi.
2. Pemantauan terhadap penggunaan peralatan di lapangan;
3. Pemantauan pekerjaan konstruksi sederhana seperti, pembuatan wadah budidaya, perbaikan tambak/kolam, kolam terpal, dll.
4. Pelaksanaan kegiatan budidaya ikan.

Apabila dari hasil pemantauan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan berupa sanksi sesuai kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Surat Perintah Kerja (SPK), berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan alur pelaporan PUMP-PB. Pemantauan hasil produksi panen setiap pokdakan penerima bantuan dan dilaporkan setiap bulan ke Dinas KP Kabupaten/Kota

#### 2. Evaluasi

- a. Tim Teknis melakukan evaluasi setiap bulan terhadap pelaksanaan PUMP-PB yang meliputi:

1. Pengadaan dan penggunaan bahan input produksi.
2. Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja.
3. Pembuatan wadah budidaya atau rehab tambak/kolam, kolam terpal.
4. Pelaksanaan kegiatan budidaya ikan.
5. Produksi hasil panen.
6. Pendapatan.

Dari hasil evaluasi Tim Teknis memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan budidaya selanjutnya yang dilakukan oleh pokdakan. Evaluasi dilakukan secara berjenjang.

d. Pelaporan

Pelaporan pemanfaatan dana BLM PUMP-PB, produksi hasil panen, pendapatan dan kemajuan usaha, dilakukan secara berkala 2 minggu sekali oleh pokdakan kepada Tenaga Pendamping, sedangkan untuk Tenaga Pendamping, Tim Teknis, Tim Pembina dan Pokja laporan disampaikan perbulan secara berjenjang.

**B. Pemaparan Hasil**

**1. Proses pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB tahun 2012 di Kabupaten Nunukan**

a. Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana rumput laut melalui program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya

nelayan. Tujuan pelaksanaan program ini telah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil observasi pemberian bantuan mampu menambah jumlah sarana dan prasarana seperti jumlah tali bentangan, jumlah unit penjemuran, dan jumlah mesin temple. Pemberian bantuan melalui program PUMP-PB ini juga mampu meningkatkan produksi hasil budidaya rumput laut. Bertambahnya hasil produksi rumput laut akan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara merupakan instansi pelaksana yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan PUMP-PB. Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan hasil observasi di lapangan, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan sosialisasi kepada kelompok pembudidaya dan selanjutnya memberikan bantuan kepada empat kelompok yang aktif serta memenuhi persyaratan administrasi.

Tujuan kebijakan yang sudah berjalan optimal ini didukung hasil wawancara, sebagaimana yang disampaikan oleh informan Reski, S.Pi selaku pelaksana Tim Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Nunukan sebagai berikut:

Program PUMP-PB sangat membantu pengembangan budidaya ikan/rumput laut, yang pada dasarnya sangat memberikan manfaat kepada penerima bantuan. Adapun manfaat yang dirasakan adalah meningkatnya produksi budidaya sehingga pendapatan masyarakat meningkat serta capaian target kesejahteraan masyarakat secara perlahan dapat dicapai walaupun tidak secara signifikan, selain itu usaha budidaya ikan/rumput laut juga memberikan dampak yang baik untuk perekonomian daerah maupun target produksi budidaya perikanan secara nasional. (Wawancara 22 April 2016).

Pernyataan ini diperkuat oleh informan triangulasi Abidin selaku ketua kelompok PUMP-PB Wahana Hijau yang mengatakan:

Awalnya saya hanya memiliki 320 tali bentangan dan 1 lantai penjemuran dan untuk kelompok mempunyai 1 mesin tempel 15 pk dan 1 unit perahu dan itulah yang digunakan bersama dalam kelompok yang jumlahnya 18 orang namun setelah mendapat bantuan saya memiliki bentangan sampai saat ini 1400 bentangan dan 2 unit penjemuran 1 mesin tempel 15 pk dan perahu sendiri sedangkan untuk kelompok sudah memiliki 2 mesin tempel 15 PK dan 2 perahu dan 2 unit penjemuran, 8 unit alkon, 12 terpal penjemuran dan waring 10 gulung. Produksi rumput laut awalnya mencapai 150 kg- 200 kg setelah menerima bantuan produksi meningkat menjadi 400 kg - 600 kg. Awalnya rata-rata 1 kali panen menghasilkan Rp 2.000.000,- s/d Rp 3.000.000,-, Setelah menerima bantuan itu bertambah kira-kira 1 kali panen menjadi Rp 6.000.000,- s/d Rp 8.000.000,-. (Wawancara 22 April 2016).

Dampak program PUMP di Kabupaten Nunukan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dapat tercermin dengan peningkatan pendapatan dan kemudahan dalam melakukan budidaya rumput laut. Hal ini dapat juga terlihat saat dilakukan observasi kondisi nelayan pada kelompok binaan dari keadaan sebelum dan sesudah menerima program PUMP.

Hal yang sama terkait meningkatnya kesejahteraan anggota kelompok binaan juga disampaikan oleh Hasma Sekretaris Kelompok Budidaya rumput laut Anugerah yang menyatakan:

Awalnya saya hanya memiliki 500 tali bentangan dan 1 lantai penjemuran dan untuk kelompok mempunyai 1 mesin tempel 15 pk dan 1 unit perahu dan itulah yang digunakan bersama dalam kelompok yang jumlahnya 10 orang namun setelah mendapat bantuan saya memiliki bentangan sampai saat ini 1300 bentangan dan 2 unit penjemuran sedangkan untuk kelompok sudah memiliki 2 mesin tempel 15 PK , 2 perahu dan 2 unit penjemuran, 7 unit alkon, 17 terpal penjemuran dan waring 6 gulung. Hasil produksi awal kira-kira 350 kg - 550 kg setelah menerima bantuan menjadi 800 kg – 1.000 kg. Awalnya rata-rata 1 kali panen menghasilkan Rp 3.000.000,- s/d Rp 4.000.000,- . Setelah menerima bantuan pendapatan bertambah kira-kira 1 kali panen Rp 8.000.000 s/d Rp 9.000.000,-. (Wawancara 22 April 2016).

Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menilai potensi lahan untuk pengembangan rumput laut di Indonesia sangat luas dan dapat berkontribusi

dalam penyerapan tenaga kerja. Namun di sisi lain, isu pelarangan ekspor dan bea keluar ekspor rumput laut dinilai dapat menghambat pelaku usaha mengembangkan bisnis di sektor itu. Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar rumput laut. Kebutuhan rumput laut bagi industri Indonesia masih bisa terpenuhi karena penyerapannya kecil. Sehingga produksi rumput laut yang berlebihan bisa diekspor ke negara- negara yang selama ini memerlukan bahan baku rumput laut dari Indonesia.

Selanjutnya Alimuddin Ketua Kelompok Liang Bunyu Pantai I juga mengungkapkan hal yang sama mengenai peningkatan hasil panen yang diperoleh serta sarana dan prasarana dengan mengatakan demikian:

Awalnya saya hanya memiliki 140 tali bentangan dan untuk kelompok mempunyai 1 mesin tempel 15 pk dan 1 unit perahu dan itulah yang digunakan bersama dalam kelompok yang jumlahnya 10 orang namun setelah mendapat bantuan saya memiliki bentangan sampai saat ini 800 bentangan dan 1 unit penjemuran sedangkan untuk kelompok sudah memiliki 2 mesin tempel 15 PK dan 3 perahu dan 3 unit penjemuran, 6 unit alkon, 12 terpal penjemuran dan waring 8 gulung. Produksi rumput yang dihasilkan awalnya kira-kira 250 kg- 400 kg setelah menerima bantuan menjadi 600 kg – 750 kg. Awalnya rata-rata 1 kali panen menghasilkan Rp 2.000.000,- s/d Rp 3.500.000,-. Setelah menerima bantuan pendapatan bertambah kira-kira 1 kali panen menjadi Rp 4.000.000 s/d Rp 6.000.000,-. Tergantung dari harga pada saat menjualnya. (Wawancara 22 April 2016).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Aje Ketua Kelompok Ilham Jaya, yang menyatakan demikian:

Awalnya saya hanya memiliki 80 tali bentangan dan 1 lantai penjemuran, namun setelah mendapat bantuan saya memiliki bentangan sampai saat ini 300 bentangan dan 1 mesin tempel 15 PK serta perahu sendiri sedangkan untuk kelompok sudah memiliki 2 mesin tempel 5 PK, 1 perahu, 1 unit penjemuran, 4 unit alkon, 17 terpal penjemuran dan waring 17 gulung. Sebelum mendapat bantuan hasil produksi berkisar antara 60 kg- 100 kg, setelah menerima bantuan hasil produksi meningkat menjadi 200 kg - 300 kg. Awalnya 1 kali panen menghasilkan Rp 1.500.000,- s/d Rp 2.000.000,-. Setelah menerima bantuan penghasilan bertambah menjadi

Rp 3.000.000,- s/d Rp 4.000.000,- sekali panen. (Wawancara 22 April 2016).

Maka dengan demikian pemberian bantuan kepada kelompok tani dan nelayan melalui program PUMP-PB di Kabupaten Nunukan tahun 2012 dapat menambah jumlah sarana dan prasarana untuk produksi serta mampu meningkatkan hasil produksi rumput laut. Kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila hasil panen/produksi rumput laut setiap kelompok dapat meningkat. Sehingga dapat dikatakan tujuan pemberian bantuan melalui program PUMP-PB tahun 2012 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar pelaksanaan penilaian berjalan lancar sesuai yang diharapkan perlu dilakukan persiapan dengan baik. Berkaitan dengan tujuan dan tata cara penilaian kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan telah melakukan sosialisasi dan pemberian bantuan kepada empat kelompok budidaya rumput laut. Keempat kelompok budidaya rumput laut tersebut mendapatkan besaran bantuan dana yang sama, walaupun setiap kelompok memiliki luas area dan jumlah anggota yang jumlahnya berbeda.

#### b. Persiapan Kebijakan

Pemberian bantuan melalui program PUMP-PB merupakan kebijakan publik, yaitu sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu. Setelah selesai perumusan kebijakan perlu dilakukan persiapan sebelum kebijakan tersebut dijalankan. Salah satu persiapan yang telah dilakukan adalah sosialisasi program dan seleksi calon penerima bantuan sebagaimana yang disampaikan oleh informan Reski, S.Pi. selaku pelaksana Tim Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan sebagai Berikut:

Setiap tahun program ini disosialisasikan oleh Pokjaya berupa Pedoman Teknis (Pednis) PUMP-PB. Seleksi dan identifikasi serta verifikasi kelompok calon penerima bantuan dilakukan oleh tim teknis Kabupaten Nunukan yang terdiri dari PPTK, Dinas Kelautan dan Perikanan dan PPL. Adapun syaratnya adalah :

1. Minimal kelompok yang sudah berdiri 2 tahun sebelum dicalonkan menjadi penerima bantuan
2. Belum menerima bantuan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
3. Aktif dalam berkelompok yaitu administrasi kelompok berupa laporan produksi, iuran wajib anggota kelompok, rapat bulanan maupun rapat tahunan kelompok, warga miskin berdasarkan data kemiskinan BAPPEDA Kabupaten Nunukan minimal 3 orang dalam kelompok yang diusulkan.
4. Pekerjaan utamanya sebagai pembudidaya ikan/rumput laut
5. Kelompok membuat proposal usulan berupa RAB kelompok
6. Kelompok memiliki Rencana Usaha Bersama (RUB)
7. Kelompok merupakan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan dan terdaftar/terregistrasi pada kelembagaan DKP Kab. Nunukan. (Wawancara 22 April 2016).

Salah satu upaya tercapainya tujuan pemberian bantuan melalui program PUMP-PB adalah pemberian bantuan tepat sasaran bagi pembudidaya rumput laut yang tergabung dalam suatu Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan sangat membutuhkan pengembangan usaha budidaya rumput laut mereka namun memiliki keterbatasan dalam masalah dana dan peralatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan hubungan kerjasama antara pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan masyarakat pesisir khususnya pembudidaya rumput dalam mencapai ketepatan sasaran program tersebut. Sasaran utama program bantuan PUMP-PB adalah masyarakat pesisir yang kurang mampu dan memiliki jenis usaha sebagai pembudidaya rumput laut. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pemberian sasaran program bantuan ini sangat diperlukan ketelitian dan monitoring secara terus-menerus oleh pihak DKP dengan pemerintah.

Pernyataan Reski, S.Pi. terkait proses persiapan pelaksanaan kebijakan tersebut diperkuat oleh informan triangulasi Aje selaku ketua kelompok PUMP-PB Ilham Jaya yang mengatakan:

Program ini pernah di sosialisasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang di hadiri oleh penyuluh dan ada juga yang di undang dari kelompok pembudidaya rumput laut yang lain. Adapun syarat kelompok calon penerima bantuan yaitu aktif dalam berkelompok dan membuat laporan kelompok tiap bulan. (Wawancara 22 April 2016).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Alimuddin, ketua Liang Bunyu Pantai I dan Hasma , ketua kelompok Anugerah, yang menyatakan demikian:

Program PUMP-PB pernah disosialisasikan sebelumnya, waktu itu disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang dihadiri oleh penyuluh negeri dan Penyuluh Pendamping dan tim teknis kegiatan PUMP PB 2012, ada juga yang diundang dari kelompok pembudidaya rumput laut waktu itu dihadiri oleh ketua kelompok. Adapun syarat sebagai kelompok calon penerima bantuan minimal aktif 2 tahun sebelum dicalonkan menjadi penerima bantuan dan memiliki administrasi yang aktif dalam kelompok. (Wawancara 22 April 2016).

Berdasarkan data yang didapatkan, persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan PUMP-PB 2012 di kabupaten Nunukan telah dilakukan dengan baik. Faktor kurangnya pemahaman program, sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan terhadap implementasi program menyebabkan buruknya tata kelola program.

Haryadi (2011) mengungkapkan bahwa implementasi program dilakukan melalui proses komunikasi, disposisi pengelolaan sumberdaya manusia, struktur birokrasi. Sosialisasi dan koordinasi merupakan kata kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program. Pemahaman terhadap program juga sangat mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Sedangkan pengaswasan atau monitoring yang dilaksanakan merupakan bentuk kendali dan evaluasi terhadap program.

c. Pelaksanaan Kebijakan.

Keberadaan penyuluh pendamping dalam pelaksanaan program kebijakan pemberian bantuan melalui program PUMP–PB sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program agar terhindar dari faktor-faktor penghambat. Pada pelaksanaan program PUMP-PB di Kabupaten Nunukan tahun 2012, telah diterjunkan beberapa penyuluh pendamping yang diberi bertugas sebagai pendamping kelompok binaan dalam melaksanakan budidaya rumput laut dalam rangka menjalankan program PUPM-PB ini.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari informan Reski, S.Pi. selaku pelaksana Tim Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Nunukan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Budidaya yaitu menugaskan Penyuluh Pendamping Tenaga Kontrak (PPTK) yang secara khusus mendampingi kegiatan ini. PPTK selain melakukan pendampingan kepada penerima bantuan juga melakukan atau membua tlaporan bulanan yang diketahui atau disetujui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Nunukan. Petugas ini juga akan mendampingi kelompok penerima bantuan membuat laporan produksi, administrasi kelompok serta memonitoring dan mengevaluasi kelompok penerima bantuan bersama tim teknis Kabupaten Nunukan dan Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan. (Wawancara 22 April 2016).

Tenaga pendamping yang diberikan oleh PUMP ini nantinya tidak hanya melakukan pendampingan secara teknis, namun juga memberikan bimbingan manajemen usaha kelautan dan perikanan. Mereka ini juga akan membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi serta pasar. Tugas tenaga pendamping juga melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada Kepala Dinas sesuai Pedoman Teknis, Meskipun PUMP ini merupakan dana bantuan langsung kepada masyarakat, Tim Teknis dapat terus

memberikan pendampingan serta bimbingan agar masyarakat mampu memanfaatkan dana yang ada.

Pernyataan Reski, S.Pi. diperkuat oleh informan triangulasi Aje selaku ketua kelompok PUMP-PB Ilham Jaya, Alimuddin, ketua Liang Bunyu Pantai I dan Hasma, anggota kelompok Anugerah yang menyatakan hal serupa demikian:

Ada penyuluh pendamping dari pemerintah yang datang kepada kami, bahkan pendampingnya setiap minggu selalu datang untuk menanyakan kabar dan perkembangan rumput laut di kelompok kami dalam bentuk laporan produksi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan dan juga dari propinsi pernah berkunjung dan mengevaluasi perkembangan kegiatan PUMP PB. Juga pernah ada tang datang dari kementerian KKP pusat untuk menanyakan, monitoring dan evaluasi perkembangan kegiatan ini. (Wawancara 22 April 2016).

Penetapan Tenaga Pendamping PUMP adalah orang yang mempunyai keahlian/pendidikan di bidang perikanan dan berpengalaman dalam pembinaan kelompok nelayan sebagai penyuluh PNS/ swasta/swadaya. Tenaga Pendamping tinggal di lokasi penerima BLM -PUMP dan mendampingi KUB secara terus menerus selama berlangsungnya PUMP. Tenaga Pendamping diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, diprioritaskan dan direkrut dari Tenaga Pendamping PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan. Peningkatan kapasitas pembudi daya juga sangat diperlukan terutama pemberian motivasi, peningkatan pengetahuan, teknologi dan ketrampilan, perbaikan etos kerja.

Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa penyuluh pendamping yang ditempatkan bagi tiap kelompok dalam pelaksanaan kebijakan PUMP-PB telah melakukan tugasnya masing-masing dengan baik sesuai peraturan dari pemerintah yaitu mendampingi kelompok penerima bantuan

membuat laporan produksi, administrasi kelompok serta memonitoring dan mengevaluasi kelompok penerima bantuan

d. Hasil Kebijakan.

1). Tata cara dan prosedur pemberian bantuan sarana dan prasarana rumput laut

Berdasarkan data yang didapatkan, tata cara dan prosedur pemberian bantuan sarana dan prasarana program PUMP-PB di Kabupaten Nunukan tahun 2012 sudah dilakukan sesuai kesepakatan yang telah diatur sebelumnya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Informan Sofyan Ali, S.Pi. sebagai Penyuluh Pendamping yang mengatakan demikian:

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP. 68/DJ-PB/2012 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya Tahun 2012. Prosedur penyaluran bantuan yang berupakegiatan PUMP PB yaitu kelompok yang telah di SK kan sebagai penerima bantuan akan menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan Dirjen Budidaya, dan surat pernyataan kesanggupan menjalankan kegiatan oleh kelompok penerima bantuan serta menandatangani kwitansi penerimaan anggaran yang kemudian disalurkan melalui rekening kelompok. (Wawancara 22 April 2016).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan triangulasi Alimuddin, ketua Liang kelompok Bunyu Pantai I yang mengatakan:

Pertama mengajukan proposal melalui PPL ke DKP dan diusulkan ke pusat untuk mendapatkan bantuan, kemudian diverifikasi oleh tim teknis, bantuan melalui rekening kelompok kemudian dibelikan barang sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang diusulkan. (Wawancara 22 April 2016).

Wahe, selaku sekretaris kelompok Liang Bunyu pantai I juga mengatakan hal yang sama demikian:

Yang saya ketahui kelompok membuat permohonan bantuan atau proposal kemudian diverifikasi oleh DKP nunukan. (Wawancara 22 April 2016).

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi di lapangan, implementasi tata cara dan prosedur pemberian bantuan sarana dan

prasarana rumput laut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Wahab (1998:10) dalam Reski (2014:14) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan hanya merupakan rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip atau bahkan bisa hanya menjadi suatu angan-angan jika tidak diimplementasikan dengan baik.

## 2). Kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana rumput laut

Kebijakan dalam pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah dalam program PUMP-PB ini sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dan dirasa cukup bagi kelompok binaan untuk digunakan sebagai sarana dan prasarana dalam mengembangkan budidaya rumput laut di kelompoknya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari informan Ali, S.Pi. sebagai Penyuluh Pendamping sebagai berikut:

Sesuai, semuanya sesuai, barang yang diberikan dikelompok berdasarkan usulan kelompok itu serta dan merupakan kebutuhan utama dalam melakukan budidaya. Kegiatan PUMP PB tahun 2012 pada dasarnya adalah kegiatan usulkan sesuai jadi sebenarnya kegiatan PUMP PB tahun 2012 adalah kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang jumlahnya 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang langsung diterima dari Direktur Jenderal Budidaya Kelautan dan perikanan dan berdasarkan SK penetapan kelompok penerima BLM di Kabupaten Nunukan melalui rekening kelompok penerima BLM, yang selanjutnya uang tersebut harus dibelanjakan dalam bentuk barang kebutuhan kelompok melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB) kelompok yang diusulkan. Adapun jumlah yang diterima oleh kelompok yaitu sebesar Rp. 65.000.000,- dengan waktu perbelanjaan kebutuhan maksimal 1 bulan setelah diterimanya uang tersebut sekitar bulan Oktober 2012. (Wawancara 22 April 2016).

Program yang dilakukan PUMP memberikan bantuan pendanaan, pencairan dana dilakukan secara bertahap yaitu 40%, 30% dan 30%, maka pelaksanaan saat ini mengacu pada Surat Edaran dari Ditjen Perbendaharaan No.

S-4219/PB/2011 tertanggal 27 April 2011 di mana pencairan dana dapat dilakukan dengan satu kali tahapan penuh tanpa ada pemotongan. Kemudian Pemberdayaan yang harus diacu dalam Proses pemberdayaan yang dilaksanakan melalui PUMP yaitu Fasilitasi/Pendampingan. Fasilitasi PUMP dilakukan oleh Tenaga Pendamping baik Penyuluh perikanan maupun Penyuluh Pendamping Tenaga Kontrak (PPTK) mulai dari mengidentifikasi/menumbuhkan kelompok, memfasilitasi kelompok dalam penyusunan menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB), melakukan pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis/manajemen usaha kelautan dan perikanan selama kegiatan usaha berlangsung, dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Hal yang sama mengenai kebijakan pemberian bantuan juga disampaikan informan triangulasi, Wahe R. selaku sekretaris kelompok Liang BunyuPantai I yang mengatakan:

Iya sesuai, uang yang diterima di kelompok melalui rekening kelompok yaitu senilai Rp. 65.000.000,-. Kemudian dari uang tersebut ketua kelompok dan beberapa teman-teman membelikan barang sesuai yang diusulkan dalam rapat kelompok sebelumnya. Itu pun didampingi oleh pendamping dan penyuluh. (Wawancara 22 April 2016).

Informan Abidin selaku Ketua Kelompok PUMP-PB Wahana Hijau juga memberikan keterangan yang sama dengan mengatakan demikian:

Barang yang kami usulkan sesuai. Jadi sebenarnya kegiatan PUMP PB tahun 2012 adalah kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang jumlahnya 65.000.000,- (EnamPuluh Lima Juta Rupiah) yang langsung diterimadari KKP melalui rekening kelompok, yang selanjutnya uang tersebut kami belanjakan berdasarkan barang yang diusulkan melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB) kelompok dan harus terbelanjakan secara keseluruhan sesuai jumlah uang yang masuk dalam rekening kelompok yaitu sebesar Rp. 65.000.000,- Adapun waktunya yaitu 1 bulan setelah diterimanya uang tersebut sekitar bulan Oktober 2012. (Wawancara 22 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan program PUMP-PB terkait pemberian bantuan sarana dan prasarana rumput laut telah sesuai peraturan dari pemerintah seperti jumlah dana yang diberikan, penerima dana, spesifikasinya, kondisi dan waktu pemberian dana.

Tingkat efektivitas jumlah penerimaan bantuan tersebut sudah sesuai dengan permintaan jumlah dana bantuan yang diajukan oleh masing-masing kelompok pembudidaya. Dimana kebutuhan dan permintaan kelompok pembudidaya rumput laut tersebut sudah dirapatkan dan disepakati bersama sebelumnya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan telah disesuaikan dengan jumlah dana bantuan yang akan diterima seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa jenis bantuan yang diberikan adalah berupa uang tunai sebesar Rp 65.000.000,- yang selanjutnya dari uang tersebut oleh masing masing kelompok membelikan barang sesuai yang diusulkan dalam rapat kelompok sebelumnya.

Pelaksanaan kebijakan program PUMP-PB di kabupaten Nunukan tahun 2012 dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan hasil panen rumput laut dan penghasilan nelayan. Berdasarkan hasil tercapainya sasaran/tujuan program ini menunjukkan bahwa jumlah bantuan program merupakan salah satu faktor penunjang terhadap peningkatan pembudidayaan rumput laut. Namun, tidak terlalu diprioritaskan dibandingkan dengan faktor penunjang lainnya karena faktor yang lainnya lebih penting untuk mendukung keberhasilan budidaya rumput laut pada kelompok pembudidaya. Dalam artian bahwa jumlah bantuan yang diberikan dari program PUMP-PB sudah efisien terhadap peningkatan keberhasilan budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan tahun 2012.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, biaya dan manfaat yang didistribusikan pun sudah merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Dari hasil wawancara kepada beberapa anggota kelompok binaan, hasil kebijakan cukup memuaskan dan tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkan serta sangat berguna dan bernilai bagi masyarakat sasaran.

e. **Perkembangan Usaha Kelompok Penerima Bantuan (Pokdakan)**

Pelaksanaan PUMP PB Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah sukses melaksanakan dan merealisasikan kegiatan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kegiatan PUMP PB di Kabupaten Nunukan masih terus dilaksanakan dengan jumlah pokdakan penerima BLM PUMP PB 2012 menjadi 4 (Empat) Pokdakan yaitu:

- a. Pokdakan Ilham Jaya
- b. Pokdakan Wahana Hijau
- c. Pokdakan Anugrah
- d. Pokdakan Liang Bunyu Pantai 1

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PUMP PB digalakan kepada seluruh pihak-pihak terkait agar dapat memanfaatkan BLM berdasarkan peruntukannya. Untuk lebih jelasnya akan di uraikan sebagai berikut:

**a. Pokadakan Ilham Jaya**

Hasil observasi dilakukan didapatkan Kelompok Pembudidaya Perikanan (POKDAKAN) Ilham Jaya merupakan salah satu kelompok pembudidaya rumput laut yang berada di Lancang Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Pokdakan ini merupakan salah satu Pokdakan yang

berada pada sentra kawasan budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan. Wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya disektor perikanan.

Kelompok Ilham Jaya beranggotakan 23 (dua puluh tiga) orang dengan susunan pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas dan Anggota. Kelompok ini didirikan pada tanggal 25 April 2008 dengan pendidikan anggota rata-rata tamatan Sekolah Dasar.

Kawasan Budidaya Kelompok ini berada di daerah perairan Lancang, hingga ke Laut Sulawesi. Dengan komposisi penduduk yang sangat majemuk dan terdiri dari beberapa suku bangsa dengan kakteristik wilayahnya merupakan pesisir pantai dimana kawasan perumahan berada diatas air, daya dukung sarana dan prasarana kemasyarakatan cukup memadai, baik sarana umum, sekolah dasar, hingga rumah ibadah untuk warga Muslim juga tersedia.

## 2. Pemanfaatan PUMP PB Tahun 2012

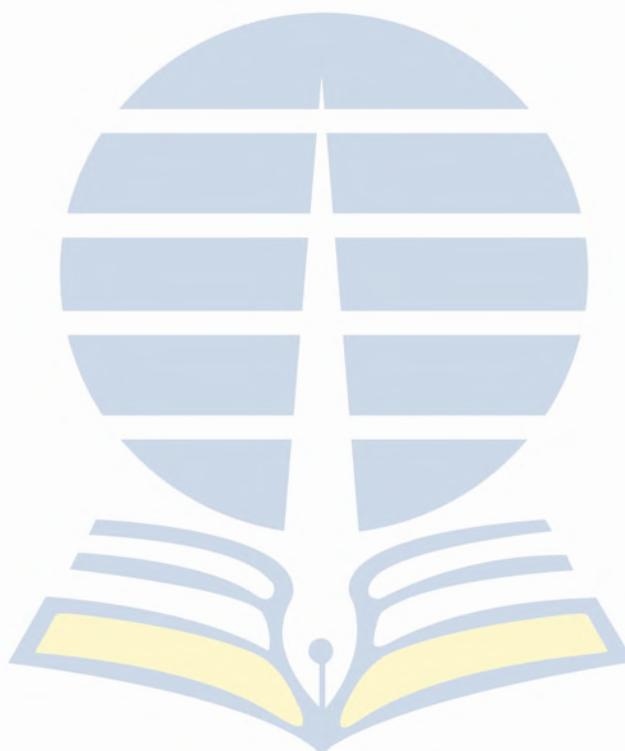
Penyaluran Dana PUMP PB Tahun 2012 untuk Kelompok Ilham jaya telah selesai Sebelum masa Anggaran 2012 selesai. Proses dan jadwal penyaluran Dana BLM PUMP PB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pemanfaatan bantuan BLM tersebut diatas disesuaikan dengan kebutuhan yang telah dirapatkan oleh anggota kelompok sebelumnya, dan telah sesuai dengan Rencana Umum Kelompok (RUK) dan Rencana Umum Bersama (RUB). Proses pemanfaatan Dana PUMP-PB digunakan untuk membeli sarana dan prasarana Rumput seperti Bibit, Tali, Perahu, mesin perahu, mesin pompa air dan kelengkapan lainnya.

## 3. Hasil yang Dicapai

Kelompok Budidaya Perikanan (Pokdakan) Ilham Jaya, merupakan salahsatu Kelompok Budidaya yang mendapatkan manfaat dari Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) Tahun 2012 yang dalam perkembangannya mengalami pasang surut, yang diakibatkan oleh fluktuasi harga yang sangat tajam diawal tahun 2013, namun mereka mampu bertahan mengingat budidaya rumput laut adalah mata pencaharian utama mereka. Pokdakan Bintang Ilham Jaya mulai memproduksi sejak awal 2009 dengan jumlah bentangan rata rata sekitar 200 bentang rumput laut dengan panjang 25 meter, dari sebelumnya 170 bentang.( Februari 2008), dengan produksi rata rata perbulan mencapai 15 ton kering.

Budidaya Rumput Laut juga memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat dan penduduk sekitarnya, Para Petani Rumput laut juga mengupahkan pengisian rumput laut ke tali bentangan dengan nilai Rp 5.000 hingga Rp 6.000,- setiap bentangan. Dari Hasil pemantauan dilapangan, untuk sekarang ini segala bentuk pembelian yang menggunakan Dana PUMP PB masih berfungsi dengan baik dan digunakan sebagai inventaris kelompok. Hubungan kerjasama untuk Pokdakan ini belum berjalan dengan baik, dan masih belum adanya keinginan pokdakan ini pada akses permodalan yang telah disiapkan oleh pihak perbankan, selalu beranggapan bahwa berurusan dengan pihak perbankan sangat sulit dan bertele –tele dan mereka dianggap kurang dipercaya. Pembudidaya berusaha lebih cenderung untuk mengembangkan usaha mereka dengan biaya mereka sendiri, hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Pada saat tertentu Kelompok ini diberikan subsidi bibit Rumput laut yang baru yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Nunukan yang berasal dari Kebun Bibit

Rumput Laut yang bibitnya berasal dari Loka Budidaya Air Payau Takalar, Sulawesi Selatan, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas rumput laut anggota kelompok dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perkembangan Pokdakan Ilham Jaya berikut ini :



Tabel 4.5 Perkembangan Usaha Kelompok Penerima Bantuan (Pokdakan) Ilham Jaya

Pokdakan		Jenis Kelamin	Umur Tahun	Pendidikan	Pekerjaan	Usaha Budidaya		Jumlah Bentang Sebelum PUMP PB	Jumlah Bentang Setelah / Saat Ini	Luas Lahan
		L/P				Jenis Budidaya	Komoditas			
Kelompok	Ilham Jaya									
Ketua	Aje	Laki-Laki	55	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	80	200	0,25 ha
Sekretaris	Mappa Janci	Laki-Laki	34	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	100	250	0,31 ha
Bendahara	Jusri	Laki-laki	32	SMP	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	100	250	0,31 ha
Pengawas	Halim		40	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	100	230	0,28 ha
Anggota	19 Orang									
1	Aras	Laki-Laki	46	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	200	420	0,52 ha
2	Husni	Laki-Laki	24	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	-	-	
3	Rusdi	Laki-Laki	28	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	100	220	0,27 ha
4	Salmia	Perempuan	31	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	-	-	
5	Rahmah	Laki-Laki	53	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	-	-	
6	Saharuddin	Laki-Laki	30	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	150	300	0,37 ha
7	Junaida	Perempuan	47	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	-	-	
8	Amir	Laki-laki	49	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	300	470	0,58 ha

Pokdakan		Jenis Kelamin	Umur Tahun	Pendidikan	Pekerjaan	Usaha Budidaya		Jumlah Bentang Sebelum PUMP PB	Jumlah Bentang Setelah / Saat Ini	Luas Lahan
		L/P				Jenis Budidaya	Komoditas			
9	Suryanti	Perempuan	20	SMP	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	-	-	
10	Sabri	Laki-laki	21	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	100	300	0,37 ha
11	Suprianto	Laki-Laki	23	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	200	430	0,53 ha
12	Muh. Tang	Laki-Laki	29	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	100	290	0,36 ha
13	Juna	Laki-laki	50	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	100	290	0,36 ha
14	Jaenuddin	Laki-laki	25	SMP	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	100	300	0,37 ha
15	Yusup	Laki-laki	29	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	130	230	0,28 ha
16	Hasnuddin	Laki-laki	30	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	150	250	0,31 ha
17	Murni	Perempuan	39	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	-	-	
18	Amin	Laki-laki	40	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	200	280	0,35 ha
19	Gumaha	Laki-laki	60	SD	Pembudidaya	Euchema C	Rumput Laut	150	320	0,28 ha
Jumlah Aset Pokdakan Sebelumnya						Jumlah Aset Pokdakan Saat ini				
1. Alkon 1 Unit						1. Alkon 4 Unit 2. Mesin Tempel 15 PK 2 Unit 3. Perahu 2 Unit 4. Penjemuran 3 Unit				

## **B. Pokdakan Wahana Hijau**

Berdasarkan hasil observasi dilapangan didapatkanKelompok Pembudidaya Perikanan (POKDAKAN) wahana hijau merupakan salah satu kelompok pembudidaya rumput laut yang berada di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Pokdakan ini merupakan salah satu Pokdakan yang berada pada salah satu sentra terbesar kawasan budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan. Wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya disektor perikanan dan di sektor pertanian.

Kelompok Wahana Hijau beranggotakan 21 (dua puluh satu) orang dengan susunan pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengawas dan Anggota. Kelompok ini didirikan pada tanggal 16 Januari 2004 dengan pendidikan anggota rata-rata tamatan Sekolah Dasar. (Data Pokdakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini).

Kawasan Budidaya Kelompok ini berada di daerah perairan Tanjung Harapan, hingga ke Laut Sulawesi. Dengan komposisi penduduk yang sangat majemuk dan terdiri dari beberapa suku bangsa dengan kakteristik wilayahnya merupakan pesisir pantai dimana kawasan perumahan berada diatas air, daya dukung sarana dan prasarana kemasyarakatan cukup memadai, baik sarana umum, sekolah dasar, hingga rumah ibadah untuk warga Muslim juga tersedia.

### **2. Pemanfaatan PUMP PB Tahun 2012**

Penyaluran Dana PUMP PB Tahun 2012 untuk Kelompok Wahana Hijau telah selesai Sebelum masa Anggaran Tahun 2012 selesai. Proses dan jadwal

penyaluran Dana BLM PUMP PB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pemanfaatan bantuan BLM tersebut diatas disesuaikan dengan kebutuhan yang telah dirapatkan oleh anggota kelompok sebelumnya, dan telah sesuai dengan Rencana Umum Kelompok (RUK) dan Rencana Umum Bersama (RUB). Proses pemanfaatan Dana PUMP-PB digunakan untuk membeli sarana dan prasarana Rumpit seperti Bibit, Tali, Perahu, mesin perahu, mesin pompa air dan kelengkapan lainnya.

### 3. Hasil yang Dicapai

Kelompok Budidaya Perikanan (Pokdakan) Wahana Jaya, merupakan salahsatu Kelompok Budidaya yang mendapatkan manfaat dari Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) Tahun 2012 yang dalam perkembangannya mengalami pasang surut, yang diakibatkan oleh fluktuasi harga yang sangat tajam diawal tahun 2013, namun mereka mampu bertahan mengingat budidaya rumput laut adalah mata pencaharian utama mereka. Pokdakan Bintang Ilham Jaya mulai berproduksi sejak awal 2009 dengan jumlah bentangan rata rata sekitar 200 bentang rumput laut dengan panjang 25 meter, dari sebelumnya 170 bentang.( Februari 2004), dengan produksi rata rata perbulan mencapai 15 ton kering.

Budidaya Rumput Laut juga memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat dan penduduk sekitarnya, Para Petani Rumput laut juga mengupahkan pengisian rumput laut ke tali bentangan dengan nilai Rp 5.000 hingga Rp 6.000,- setiap bentangan. Dari Hasil pemantauan dilapangan, untuk sekarang ini segala bentuk pembelian yang menggunakan Dana PUMP PB masih berfungsi dengan baik dan digunakan sebagai inventaris kelompok.

Hubungan kerjasama untuk Pokdakan ini belum berjalan dengan baik, dan masih belum adanya keinginan pokdakan ini pada akses permodalan yang telah disiapkan oleh pihak perbankan, mengingat mereka lebih cenderung untuk mengembangkan usaha mereka dengan biaya mereka sendiri. Pada saat tertentu Kelompok ini diberikan subsidi bibit Rumput laut yang baru yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Nunukan yang berasal dari Kebun Bibit Rumput Laut yang bibitnya berasal dari Loka Budidaya Air Payau Takalar, Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perkembangan Pokdakan Wahana Hijau berikut ini.



Tabel 4.6 Perkembangan Usaha Kelompok Penerima Bantuan (Pokdakan) Wahana Hijau

Pokdakan		Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Usaha Budidaya		Jumlah Bentang Sebelum PUMP PB	Jumlah Bentang Setelah/Saat Ini	Luas Lahan
		L/P				Jenis Budidaya	Komoditas			
Kelompok	Wahana Hijau									
Ketua	Abidin	Laki-Laki	55 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	400	560	0,70 ha
Sekretaris	Budi Rozhandi	Laki-Laki	41 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	300	400	0,50 ha
Bendahara	Sudirman	Laki-laki	59 thn	SMP	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	200	400	0,50 ha
Pengawas	Syamsul .A	Laki-Laki	32 thn	SMP	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	100	230	0,28 ha
Anggota	14 orang									
1	Syuarifuddin	Laki-Laki	24 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	120	250	0,31 ha
2	Tandra. A	Laki-Laki	44 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	120	247	0,30 ha
3	Jusman. S	Laki-Laki	42 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	300	400	0,50 ha
4	Maderemang	Laki-Laki	63 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	250	400	0,50 ha
5	Usman. N	Laki-Laki	54 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	200	360	0,45 ha
6	Dedy Rahim	Laki-	29 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput	250	450	0,56 ha

Pokdakan	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Usaha Budidaya		Jumlah Bentang Sebelum PUMP PB	Jumlah Bentang Setelah/Saat Ini	Luas Lahan	
					Jenis Budidaya	Komoditas				
	Laki					laut				
7	Selle	Laki-Laki	34 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	250	400	0,50 ha
8	Sabilu	Laki-Laki	54 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	100	320	0,40 ha
9	Aco. N	Laki-Laki	40 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	400	560	0,70 ha
10	Hasbi	Laki-Laki	36 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	100	300	0,37 ha
11	Ismail	Laki-Laki	33 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	200	300	0,37 ha
12	Mansur . M	Laki-Laki	34 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	120	180	0,22 ha
13	Sire Bin Bacotang	Laki-Laki	38 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	100	240	0.30 ha
14	Ahmad Tahir	Laki-Laki	42 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	100	210	0,26 ha
Jumlah Aset Pokdakan					Jumlah Aset Pokdakan Saat Ini					
1. Penjemuran 1 Unit 2. Perahu 1 Unit					1. Penjemuran 3 Unit 2. Perahu 2 Unit 3. Mesin Tempel 2 Unit 4. Mesin Alkon 3 Unit					

### C. Pokdakan Anugrah

Sesuai hasil observasi didapatkan Kelompok Pembudidaya Perikanan (POKDAKAN) Anugrah adalah salah satu kelompok yang ada di Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan yang didirikan pada tanggal 01 Februari 2011. Kelompok yang berjumlah 10 orang ini merupakan salah satu Pokdakan yang telah sukses dalam melakukan usaha budidaya rumput pada awalnya mengalami pasang surut.

Kawasan Budidaya Kelompok ini berada di daerah perairan Tanjung Harapan, hingga ke perairan lancang. Usaha budidaya rumput laut pokdakan Anugrah mengalami peningkatan usaha dari tahun ke tahun hal ini membuat anggota kelompok terus menggalakan usahanya .

#### 2. Pemanfaatan PUMP PB Tahun 2012

Penyaluran Dana PUMP PB Tahun 2012 untuk Kelompok Anugrah telah selesai Sebelum masa Anggaran Tahun 2012 selesai. Proses dan jadwal penyaluran Dana BLM PUMP PB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pemanfaatan bantuan BLM tersebut diatas disesuaikan dengan kebutuhan yang telah dirapatkan oleh anggota kelompok sebelumnya, dan telah sesuai dengan Rencana Umum Kelompok (RUK) dan Rencana Umum Bersama (RUB). Proses pemanfaatan Dana PUMP-PB digunakan untuk membeli sarana dan prasarana Rumput seperti Bibit, Tali, Perahu, mesin perahu, mesin pompa air dan kelengkapan lainnya.

#### 3. Hasil yang Dicapai

Kelompok Budidaya Perikanan (Pokdakan) Anugrah, merupakan salahsatu Kelompok Budidaya yang mendapatkan manfaat dari Kegiatan Pengembangan

Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) Tahun 2012 yang dalam perkembangannya mengalami pasang surut, yang diakibatkan oleh fluktuasi harga yang sangat tajam diawal tahun 2013, namun mereka mampu bertahan mengingat budidaya rumput laut adalah mata pencaharian utama mereka. Pokdakan Bintang Ilham Jaya mulai memproduksi sejak awal 2009 dengan jumlah bentangan rata rata sekitar 200 bentang rumput laut dengan panjang 25 meter, dari sebelumnya 170 bentang, dengan produksi rata rata perbulan mencapai 15 ton kering.

Budidaya Rumput Laut juga memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat dan penduduk sekitarnya, Para Petani Rumput laut juga mengupahkan pengisian rumput laut ke tali bentangan dengan nilai Rp 5.000 hingga Rp 6.000,- setiap bentangan. Dari Hasil pemantauan dilapangan, untuk sekarang ini segala bentuk pembelian yang menggunakan Dana PUMP PB masih berfungsi dengan baik dan digunakan sebagai inventaris kelompok.

Hubungan kerjasama untuk Pokdakan ini belum berjalan dengan baik, dan masih belum adanya keinginan pokdakan ini pada akses permodalan yang telah disiapkan oleh pihak perbankan, mengingat mereka lebih cenderung untuk mengembangkan usaha mereka dengan biaya mereka sendiri. Pada saat tertentu Kelompok ini diberikan subsidi bibit Rumput laut yang baru yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Nunukan yang berasal dari Kebun Bibit Rumput Laut yang bibitnya berasal dari Loka Budidaya Air Payau Takalar, Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perkembangan Pokdakan Anugrah berikut ini :

Tabel 4.7 Perkembangan Usaha Kelompok Penerima Bantuan (Pokdakan) Anugerah

Pokdakan		Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Usaha Budidaya		Jumlah Bentang Sebelum PUMP PB	Jumlah Bentang Setelah/Saat Ini	Luas Lahan
		L/P				Jenis Budidaya	Komoditas			
Kelompok	Anugerah									
Ketua	Suardi	Laki-Laki	47 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	200	400	0,50 ha
Sekretaris	Hasma	Perempuan	30 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	500	600	0,75 ha
Bendahara	Kasman	Laki-laki	32 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	150	320	0,40 ha
Pengawas	Dhian Wahyudi									
Anggota	7 orang									
1	Simbo	Laki-Laki	52 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	300	400	0,50 ha
2	Jumiati	Perempuan	35 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	400	570	0,71 ha
3	Sarifuddin	Laki-Laki	28 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	500	680	0,85 ha
4	Susi	Perempuan	31 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	100	300	0,37 ha
5	Muliati	Perempuan	35 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	200	400	0,50 ha
6	Ira Sri Merly	Perempuan	32 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	150	230	0,28 ha
7	Mahmud Efendy	Laki-laki	21 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	100	250	0,31 ha
1. Penjemuran 1 Unit					Jumlah Aset Sebelum PUMP PB					
					Jumlah Aset Saat Ini					
					1. Penjemuran 3 Unit 2. Perahu 2 Unit 3. Mesin Tempel 15 PK 2 Unit 4. Mesin Alkon 3 Unit					

#### **D. Pokdakan Liang Bunyu Pantai 1**

Sesuai hasil observasi didapatkan Kelompok Pembudidaya Perikanan (POKDAKAN) Liang Bunyu Pantai 1 adalah salah satu kelompok yang ada di pulau Sebatik terletak di Desa Liang Bunyu Kecamatan sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang didirikan pada tanggal 10 Mei 2011. Kelompok yang berjumlah 10 orang ini merupakan salah satu Pokdakan yang telah sukses dalam melakukan usaha budidaya rumput pada awalnya mengalami pasang surut.

Kelompok Liang Bunyu Pantai 1 memiliki Kawasan Budidaya yang berada di daerah perairan Tanjung Harapan, hingga ke perairan lancang. Usaha budidaya rumput laut pokdakan Liang Bunyu Pantai 1 mengalami peningkatan usaha dari tahun ke tahun hal ini membuat anggota kelompok terus menggalakan usahanya dan asset kelompok terus bertambah. Kelompok Liang Bunyu Pantai 1 merupakan kelompok unggulan yang ada di pulau sebatik.

#### **2. Pemanfaatan PUMP PB Tahun 2012**

Penyaluran Dana PUMP PB Tahun 2012 untuk Kelompok Liang Bunyu Pantai selesai di laksanakan pada Tahun Anggaran 2012. Proses dan jadwal penyaluran Dana BLM PUMP PB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pemanfaatan bantuan BLM tersebut diatas disesuaikan dengan kebutuhan yang telah dirapatkan oleh anggota kelompok sebelumnya, dan telah sesuai dengan Rencana Umum Kelompok (RUK) dan Rencana Umum Bersama (RUB). Proses pemanfaatan Dana PUMP-PB digunakan untuk membeli sarana dan prasarana budidaya Rumput laut dan perlengkapan lainnya.

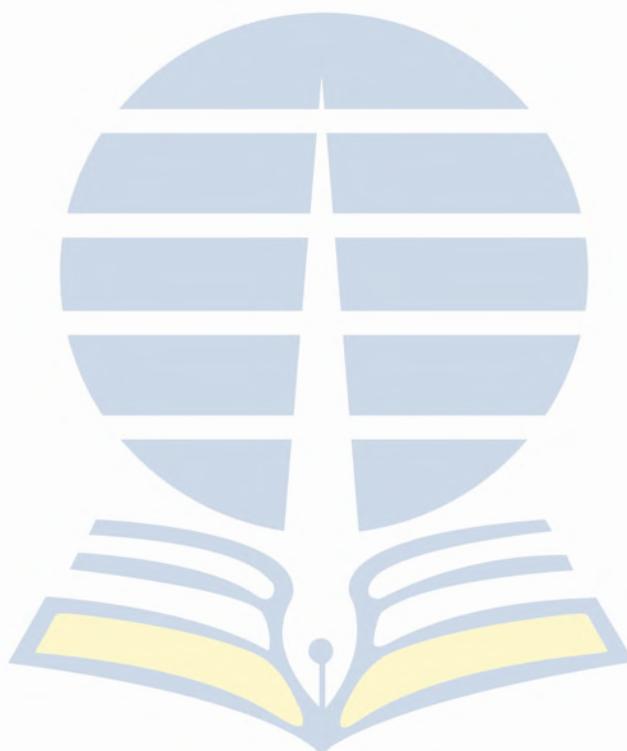
### 3. Hasil yang Dicapai

Kelompok Budidaya Perikanan (Pokdakan) Liang Bunyu Pantai 1, merupakan Kelompok Budidaya yang mendapatkan manfaat dari Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) Tahun 2012 yang dalam perkembangannya mengalami peningkatan, hal ini terus digalakan oleh anggota kelompok dengan membentuk manajerial kelompok pembudidaya rumput laut yang termenej dan terarah. Dengan jumlah bentangan rata rata sekitar 200 bentang rumput laut dengan panjang 25 meter, dari sebelumnya 170 bentang, dengan produksi rata rata perbulan mencapai 30 ton kering/siklus.

Budidaya Rumput Laut juga memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat disekitarnya, Para Petani Rumput laut juga mengupahkan pengisian rumput laut ke tali bentangan dengan nilai Rp 5.000 hingga Rp 6.000,- setiap bentangan. Dari Hasil pemantauan dilapangan, untuk sekarang ini segala bentuk pembelian yang menggunakan Dana PUMP PB masih berfungsi dengan baik dan digunakan sebagai inventaris kelompok.

Hubungan kerjasama antar kelompok terjalin dengan baik namun pokdakan belum melakukan akses permodalan yang telah disiapkan oleh pihak perbankan, mengingat mereka lebih cenderung untuk mengembangkan usaha mereka dengan biaya mereka sendiri. Kecendrungan mengembangkan usaha budidaya rumput laut dengan usaha dan biaya sendiri dan kelompok memberikan motivasi tersendiri disetiap anggota kelompok. Mereka melakukan pinjaman pada kas kelompok sendiri dengan pengembalian yang tentunya dapat menambah kas kelompok, hal ini terus dilaksanakan sehingga jumlah kas kelompok pun terus

bertambah. Selain itu asset kelompok juga dijadikan sebagai asset pinjaman oleh anggota kelompok itu sendiri dan dibebankan pengembalian uang yang di pinjam di kas kelompok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :



**Tabel 4.8 Perkembangan Usaha Kelompok Penerima Bantuan (Pokdakan) Liang Bunyu Pantai I**

Pokdakan		Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Usaha Budidaya		Jumlah Bentang Sebelum PUMP PB	Jumlah Bentang Setelah/Saat Ini	Luas Lahan
		L/P				Jenis Budidaya	Komoditas			
Kelompok	Liang Bunyu Pantai I									
Ketua	Alimuddin	Laki-Laki	39 thn	SMA	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	140	230	0,28 ha
Sekretaris	Wahe. R	Laki-Laki	41 thn	-	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	500	670	0,83 ha
Bendahara	Muh. Yusuf	Laki-laki	43 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	200	340	0,42 ha
Pengawas	Eko Syahrudi									
Anggota	7 orang									
1	Mistang	Laki-Laki	27thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	200	400	0,50 ha
2	Muh. Neng	Laki-laki	46 thn	-	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	400	540	0,67 ha
3	Musliadi	Laki-Laki	28 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	120	300	0,37 ha
4	Langsang	Laki-laki	48 thn	-	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	87	250	0,31 ha
5	Kamruddin	Laki-laki	29 thn	SD	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	300	480	0,60 ha
6	Kanna	Laki-Laki	55thn	-	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	200	320	0,40 ha
7.	Alimuddin	Laki-Laki	58 thn	-	Pembudidaya	Euchema C.	Rumput laut	300	400	0,50 ha
Jumlah Aset sebelum PUMP PB						Jumlah Aset Saat Ini				
1. Penjemuran 1 Unit 2. Mesin Alkon 1 Unit 3. Perahu 1 Unit						1. Penjemuran 3 Unit 2. Mesin Alkon 3 Unit 3. Perahu 2 Unit 4. Mesin Tempel 15 PK 2 Unit				

## **2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.**

Keseluruhan kelompok binaan program PUMP-PB mengatakan tidak mengalami hambatan dalam pemberian bantuan. Pernyataan ini diperkuat oleh informan Reski, S.Pi. selaku pelaksana Tim Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Nunukan sebagai Berikut:

Tidak ada hambatan, karena calon maupun penerima bantuan sebelumnya diseleksi dan diidentifikasi serta diverifikasi secara bersama oleh tim teknis Kabupaten Nunukan dan PPL Perikanan. (Wawancara 22 April 2016).

Hal yang sama juga disampaikan informan triangulasi Alimuddin dari kelompok PUMP-PB Liang Bunyu Pantai I dan rekan lainnya dari kelompok Wahana Hijau dan Anugerah yang mengatakan:

Tidak ada hambatan dalam pemberian bantuan. (Wawancara 22 April 2016).

Di sisi lain ada kelompok yang mengatakan adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan program PUMP-PB terkait kekompakan anggota. Hal ini disampaikan Aje selaku ketua kelompok PUMP-PB Ilham Jaya yang mengatakan demikian:

Sebelum menerima bantuan tidak ada masalah, tapi setelah menerima bantuan kelompok bubar yaitu sekitar setahun setelah menerima bantuan, penyebabnya anggota kelompok banyak yang tidak aktif dan tidak membuat laporan bulanan, sudah tidak lagi saling kerja sama dengan anggota yang lain, mementingkan diri sendiri. (Wawancara 22 April 2016).

Pernyataan ini diperkuat oleh informan triangulasi Aras selaku anggota dari kelompok PUMP-PB Ilham Jaya yang mengatakan:

Tidak ada masalah mulai dari awal penerimaan dan setelah menerima bantuan. Namun kelompok tidak aktif lagi pada tahun 2013 dikarenakan anggota kelompok banyak yang tidak aktif dan tidak membuat laporan bulanan dan banyak juga yang berhenti merumput laut karena harga rumput laut turun drastis. (Wawancara 22 April 2016).

Informasi terkini berdasarkan Laporan Jaringan Sumber Daya (JaSuDa.Net), yang merupakan situs jaringan sumber daya informasi dan teknologi rumput laut Indonesia, pergerakan harga rumput laut sepanjang Mei 2015 cenderung berfluktuatif di tingkat petani (*farmer*), pengumpul (*collector*) pedagang dan (*trader*). Pada perdagangan Mei 2015, petani rumput laut Kabupaten Nunukan mengeluhkan harga rumput laut yang turun. Padahal pada April 2015, sudah ada gerakan peningkatan harga dari Rp 6.500 menjadi Rp 7.000 hingga Rp 9.000 dan sampai Rp 10.400 per kg rumput laut kering. Pada akhir Mei 2015, harganya kembali turun hingga Rp7.500 per kg.

Menurut ARLI, rumput laut yang dihasilkan saat ini berbeda ketika awal kemunculannya dulu. Itu sangat mempengaruhi kualitas dari rumput laut yang disebabkan kebersihan dari rumput laut tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Tingkat kekeringan rumput laut yang dijual ke para pembeli juga tidak sepenuhnya sempurna. Kandungan air dari rumput laut tersebut masih cukup banyak, yang juga mempengaruhi harga jual dari rumput laut yang dihasilkan para petani. Selain itu, faktor lain yang turut mempengaruhi kestabilan harga rumput laut saat ini adalah pangsa pasar rumput laut Indonesia mulai menurun. Hal ini diperkuat dengan dihentikannya impor yang dilakukan Filipina terhadap rumput laut Indonesia.

### **3. Upaya –upaya untuk optimalisasi kebijakan pemberian bantuan rumput laut melalui program PUMP-PB Tahun 2012**

Berdasarkan hasil studi lapangan didapatkan beberapa hal yang dapat menghambat kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB Tahun 2012, diantaranya :

#### a) Faktor teknis

Faktor teknis umumnya yang dapat dijumpai adalah sifat individu anggota kelompok, karena memiliki pemahaman yang berbeda. Ada yang memiliki kebersamaan dalam kelompok dan ada yang acuh tak acuh terhadap kelompok. Hal ini perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus. Faktor lain adalah penyakit secara musiman dapat menyerang rumput laut, ini akan mengakibatkan tingkat produksi berkurang, secara otomatis akan mengurangi penghasilan pada tingkat pembudidaya. Jika penyakit lebih banyak akan memberikan peluang untuk mencari pekerjaan lain, dan faktor alam lainnya yaitu badai atau gelombang besar ini dapat berakibat fatal yaitu seluruh pondasi terangkat, mengakibatkan gagal produksi. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan kelompok Ilhan Jaya sebagai berikut :

Pokdakan Ilhan Jaya dapat melakukan produksi rumput laut hanya satu tahun, ini lebih dikarenakan oleh adanya badai gelombang besar yang mengakibatkan sebagian besar pondasi rumput laut terangkat. (Wawancara 20 April 2016)

#### b) Faktor non teknis

Faktor non teknis terutama terkait dengan harga rumput laut. Jika harga rendah mengakibatkan pembudidaya mengurangi jumlah tali atau bahkan ada yang beralih ke usaha lain. Ini dapat dipahami dengan harga rendah akan mengurangi tingkat pendapatan pembudidaya rumput laut. hal ini akan

memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut, karena tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pokdakan. Hal yang sama disampaikan oleh Pak Abidin Pokdakan Wahana Hijau

Harga rumput laut turun dan sangat rendah banyak anggota menurunkan sebagian tali bentangan rumput laut untuk menjaga kelangsungan hidup bahkan ada yang tidak menurunkan sama sekali dan beralih ke usaha lain sambil menunggu harga kembali normal. (Wawancara 22 April 2016).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga rumput laut, diantaranya :

1. Kualitas rumput laut, kualitas bagus sesuai yang dipersyaratkan tentunya tidak sama dengan harga yang tidak sesuai standar.
2. Pada tingkat pengumpul terdapat peluncur untuk mencari atau mendapatkan rumput laut, ditingkat peluncur biasanya tidak memperhatikan standar kualitas, hanya mencari volume sebanyak banyaknya, ini dapat dimengerti karena peluncur upah didapatkan berdasarkan komisi dari volume rumput laut yang didapatkan.
3. Mata rantai pemasaran yang panjang (dapat dilihat Bab II), menjadikan tidak efisien dan efektif.
4. Ekonomi dunia. Rumput laut merupakan komoditas dunia yang sangat dibutuhkan sangat bergantung pada industri terutama negara-negara yang sangat membuthkan seperti Eropah, Amerika dan China. Dapat dikatakan negara importir juga sangat menentukan tingkat harga rumput laut.

Diharapkan peran pemerintah dapat membantu menstabilkan harga rumput laut. perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan tersebut diatas.

### **C. Pembahasan Hasil**

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah

se wajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan.

Menurut (Rochyati, 2012), evaluasi bertujuan menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula dapat diketahui apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.

Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan masalah yang dituju.

Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda dilakukan untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kriteria atau indikator evaluasi yang dikembangkan oleh William N. Dunn, yaitu :

1. Efektifitas : (Apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai)

Seperti yang dikemukakan oleh Subarsono (2013), dengan adanya kriteria efektifitas ini, dapat diketahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kelompok penerima program PUMP-PB diketahui bahwa para pembudidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan sudah lebih maju terbukti dengan meningkatnya hasil produksi rumput laut, meningkatnya kesejahteraan serta ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik.

2. Efisiensi : (Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan)

Dalam bukunya yang berjudul Studi Kebijakan Pemerintah, Herabudin (2016) menuliskan bahwa evaluasi efisiensi (*efficiency evaluation*)

merupakan evaluasi mengenai perbandingan biaya dengan kinerja yang dicapai. Dalam penelitian ini, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang jumlahnya 65.000.000,- dioptimalkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana budidaya rumput laut. Selain itu, beberapa upaya yang dilakukan oleh tenaga pendamping PUMP yakni melakukan pendampingan secara teknis, serta memberikan bimbingan manajemen usaha, membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi serta pasar. Tugas tenaga pendamping juga melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian hasil yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasmiarti (2012) dengan temuan penelitian yang menunjukkan perlunya kerjasama diantara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar sebuah program dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

3. Kecukupan : (Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah)

PUMP merupakan program yang cetuskan pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan dalam budidaya rumput laut yang meliputi terbatasnya modal yang dimiliki masyarakat, rendahnya kualitas rumput laut, harga tidak menentu, sarana prasarana terbatas, masih terdapat masyarakat yang memiliki kemampuan dan pemahaman tentang rumput laut yang minim. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa kelompok pokdakan diketahui bahwa melalui PUMP tersebut, pokdakan di Kabupaten Nunukan mampu mengembangkan usaha budidaya rumput lautnya dengan

terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam budidaya rumput laut, bertambahnya pengetahuan pembudidayaan perikanan melalui bimbingan tenaga pendamping, serta meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi rumput laut. Hal ini sejalan dengan penelitian Risky (2013) yang menyatakan bahwa implementasi program pengembangan budidaya rumput laut ini membawa dampak peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut dimana hasil analisis menunjukkan bahwa ada peningkatan pendapatan bersih pembudidaya per bentang per siklus. Kriteria kecukupan ini merupakan salah satu tujuan dari evaluasi formatif yakni melihat sejauh mana sebuah program dapat mencapai tujuan yang diharapkan, dimana hasil dari implementasi kebijakan program PUMP di Kabupaten Nunukan telah memenuhi kriteria kecukupan dalam hal memecahkan permasalahan sarana dan prasarana yang selama ini dialami oleh pokdakan.

4. Pemerataan : (Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda)

Agustino (2006) menyatakan bahwa tindakan yang ditempuh oleh *Implementing Agencies* harus benar-benar efektif, responsive, akuntabel dan adil. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa barang yang diberikan kepada masing-masing pokdakan aktif yang terpilih semua berdasarkan usulan kelompok tersebut dan merupakan kebutuhan utama dalam melakukan budidaya. Kegiatan PUMP PB tahun 2012 adalah kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang jumlahnya 65.000.000,- dan diberikan pada masing-masing pokdakan untuk pengembangan budidaya

rumput laut. Sebagai hasil akhirnya, setiap pokdakan mengalami peningkatan produksi rumput laut.

5. Responsivitas : (Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu)

Hasil wawancara dengan pokdakan, penyuluh dan DKP menunjukkan bahwa hasil kebijakan yang diimplementasikan telah sesuai dengan preferensi pokdakan penerima PUMP. Hal tersebut terbukti dengan bertambahnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan (seperti bibit, tali, perahu, mesin perahu, mesin pompa air dan kelengkapan lainnya), bertambahnya SDM dengan pengetahuan budidaya yang lebih baik serta bertambahnya hasil produksi rumput laut untuk setiap pokdakan. Dengan demikian, hasil evaluasi kebijakan program PUMP tersebut telah memenuhi kebutuhan dalam budidaya rumput laut kelompok pokdakan yang terpilih di Kabupaten Nunukan.

6. Ketepatan : (Apakah hasil/tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai)

Evaluasi program PUMP yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana terlaksananya program tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Agustino (2006) mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan sarana dan prasarana budidaya rumput laut diberikan pada kelompok yang aktif melakukan budidaya perikanan di kabupaten Nunukan. Hasil dari program tersebut yaitu berkembangnya usaha produktif dibidang pembudidaya rumput laut yang

sangat berpengaruh pada peningkatan produksi, kemampuan dan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan wirausaha (pengembangan usaha) di bidang perikanan budidaya.

Suatu program yang telah dijalankan perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu suatu program mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan suatu evaluasi dan sangat berguna serta merupakan fungsi manajemen yang menentukan tercapainya tujuan didalam organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna. Evaluasi ini dapat diketahui keberhasilan dan kekurangannya pada suatu program dalam rangka penyempurnaan kebijakan yang terlebih dahulu, mempertimbangkan nilai-nilai positif, serta teknik yang digunakan untuk melakukan penilaian demi tercapainya tujuan di dalam organisasi tersebut.

Studi evaluasi, menurut Van Dusseldorp (1990), dapat dibedakan berdasarkan 2 (dua) kriteria pokok: siapa yang melaksanakan studi evaluasi itu dan pada tahapan perencanaan pembangunan yang manakah evaluasi tersebut dilaksanakan. Evaluasi penting kiranya untuk dibedakan secara tegas antara apa yang disebut sebagai kegagalan implementasi (*implementation failure*) yang justru menjadi tujuan monitoring untuk menghindarinya dan apa yang disebut sebagai kegagalan kebijakan (*policy failure*).

Menurut Arikunto, setiap kegiatan evaluasi biasanya dimaksudkan untuk mengembangkan kerangka berpikir dalam rangka pengambilan keputusan (1995:292). Suatu evaluasi dalam proses pengembangan dimaksudkan sebagai perbaikan sistem dengan tujuan, sebagai berikut :

- a) Pertanggung jawaban kepada pemerintah dan masyarakat.
- b) Penentuan tindak lanjut hasil pengembangan.

Dari uraian di atas, evaluasi perlu dilaksanakan terhadap suatu program atau kegiatan, dalam hal ini bukan untuk memberikan keseimbangan nilai benar atau salah, namun untuk melihat sejauh mana suatu program atau kegiatan tersebut diadakan penyempurnaan serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dan pada intinya tujuan utama evaluasi tersebut adalah tidak mencari kesalahan-kesalahan, tetapi bagaimana untuk memperbaiki hasil temuan-temuan yang diperoleh/didapatkan dalam evaluasi tersebut pada suatu program atau kegiatan lainnya.

Menurut Agustino (2006:188) Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi :

- a) Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
- b) Tindakan yang ditempuh oleh Implementing Agencies sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel dan adil ini. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga.
- c) Efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat meberdayakan output dan outcome yang dihasilkan

dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk member informasi yang valid dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga masyarakat.

### **1. Proses pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB tahun 2012 di Kabupaten Nunukan**

Pemerintah Melalui Menteri Perikanan telah menetapkan kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Perikanan Budidaya Nomor : KEP.45/DJ-PB/2012 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2012. Pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-PB) dengan pola dasar pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya dirancang untuk meningkatkan kemampuan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) dalam mengembangkan usaha produktif dibidang pembudidaya ikan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, kemampuan dan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan wirausaha (pengembangan usaha) dibidang perikanan budidaya. Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan untuk mendukung kegiatan tersebut menerbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor : 188.4/022/DKP/IV/2012 Tanggal 27 April 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana PUMP-PB Tahun 2012.

Adapun Komponen utama pelaksanaannya pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-PB) : (1) Keberadaan kelompok, (2) Keberadaan tenaga pendamping, (3) Sosialisasi dan pelatihan, (4) Penyaluran dan pemanfaatan bantuan dan (5) Pemantauan, evaluasi, pelaporan, dengan Strategi

pengembangan; (1) Peningkatan kemampuan kelembagaan kelompok dalam mengelola bantuan; (2) Optimalisasi potensi usaha perikanan budidaya di pedesaan; (3) Fasilitasi bantuan usaha bagi kelompok; (4) Peningkatan sumberdaya manusia tenaga pendamping dan (5) Pendampingan kelompok

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Tangkap Nomor 32/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mina Pedesaan. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan yang selanjutnya disebut PUMP adalah bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha perikanan tangkap sesuai dengan potensi sumber daya ikan. Pola Dasar PUMP dirancang untuk meningkatkan kemampuan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam mengembangkan usaha produktif dalam rangka peningkatan pendapatan dan kewirausahaan nelayan. Adapun Program PUMP-PB Kabupaten Nunukan adalah focus pada rumput laut sebagai komoditas yang dikembangkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pembudidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan akan lebih maju dan kesejahteraannya meningkat serta ekonomi rakyat di pedesaan akan berkembang dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bantuan PUMP sudah tersalurkan dengan baik di Kabupaten Nunukan, diketahui ada 4 kelompok yaitu Kelompok Ilham Jaya yang beranggotakan 21 orang, Wahana Hijau yang beranggotakan 19 orang, Kelompok Anugerah yang beranggotakan dan Liang Bunyu Pantai I yang beranggotakan 11 orang yang hingga saat ini sudah maju, mereka mendapat bantuan berupa uang tunai dengan jumlah yang sama untuk tiap kelompok yaitu sebesar Rp 65.000.000,- yang diterima melalui rekening

kelompok, kemudian dari uang tersebut ketua kelompok dan beberapa anggotanya membelikan barang sesuai yang di usulkan dalam rapat kelompok sebelumnya dengan didampingi oleh penyuluh pendamping. Tenaga pendamping yang diberikan oleh PUMP-PB telah melakukan pendampingan secara teknis, serta memberikan bimbingan manajemen usaha, membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi serta pasar. Tugas tenaga pendamping juga melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada Kepala Dinas sesuai Pedoman Teknis.

Proses dan jadwal penyaluran dana BLM PUMP PB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Dari Hasil pemantauan di lapangan, untuk sekarang ini segala bentuk pembelian yang menggunakan Dana PUMP PB masih berfungsi dengan baik dan digunakan sebagai inventaris kelompok. Hasil produksi rumput laut dalam sekali panen mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dari hasil panen awal sebelum mendapat bantuan.

## **2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program PUMP-PB tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.**

Faktor-faktor yang memiliki pengaruh sangat tinggi terhadap keberhasilan Program PUMP-PB di antaranya sebagai berikut:

- a. Faktor utama penentu keberhasilan (*input factors*):
  - (1) Tingkat dan akses teknologi budidaya
  - (2) Ketepatan pemilihan calon lokasi
  - (3) Ketepatan calon penerima bantuan

Hoogerworf (1983) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan belum memenuhi harapan masyarakat apabila masih belum efektifnya keterpaduan dalam penyaluran dana dan penentuan sasaran baik tingkat pusat, daerah dan lokal.

b. Faktor penghubung/pendukung keberhasilan (*stakes factors*):

- (1) Luas dan status lahan
- (2) Ketepatan turunnya bantuan
- (3) Dukungan kebijakan.

Hoogerworf (1983) menyatakan bahwa program pengentasan kemiskinan cenderung masih menjadi kewenangan pusat. Dengan demikian keenam faktor tersebut dapat dikatakan sebagai faktor dominan yang akan mempengaruhi atau menentukan tingkat keberhasilan Program PUMP-PB ke depan.

Sukadi, (2002) menyatakan bahwa faktor pemilihan lingkungan untuk budidaya sangat menentukan keberhasilan kegiatan budidaya, tergolong faktor independen. Faktor yang termasuk dalam *independent factors* yaitu pengalaman pembudidaya, hubungan ketua kelompok dengan anggotanya, dan ketepatan pemilihan komoditas. Faktor-faktor tersebut merupakan *output* dalam sistem yang dikaji, yang tidak mempunyai pengaruh dan sangat tergantung dari sistem.

Faktor-faktor ini merupakan *output* dari faktor-faktor lainnya yang berada dalam *input* dan *stakes*. Kemudian faktor-faktor yang termasuk dalam *autonomous factors* yaitu : jumlah pendamping, infrastruktur, alokasi biaya dan pengetahuan pendamping. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh dan ketergantungan yang rendah dalam sistem yang dikaji, sehingga dapat dianggap tidak diperhitungkan sebagai faktor penting (*unused factors*).

Indiarto (2014) mengungkapkan bahwa sehubungan dengan upaya PUMP-PB dalam mengelola hasil budidaya dan sejumlah permasalahan yang umum dihadapi, maka terdapat beberapa aspek yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan PUMP-PB antara lain :

### 1. Faktor Pendukung

#### a) Potensi produksi perikanan

Charles (2001) menyatakan pentingnya pendekatan sistem bagi pengelolaan perikanan dan kelautan. Dalam konteks ini, perikanan adalah sebuah sistem karena banyak faktor dan fenomena yang terkait secara bersama-sama dan saling bergantung di dalamnya. Sumber daya pesisir dan lautan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik jenis maupun potensinya. Potensi sumber daya tersebut ada yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, dan *OTEC* (*Ocean Thermal Energy Conversion*); dan energi yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan seperti pariwisata bahari, industri, jasa angkutan, dan sebagainya (Dahuri, 2002).

#### b) Motivasi usaha

Maslow dalam Davis (1982) mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarah kepada perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (perwujudan diri).

Dessler dalam Rivai (2005) menyatakan bahwa orang-orang pada dasarnya termotivasi atau terdorong untuk berperilaku dalam cara tertentu yang dirasakan mengarah kepada perolehan ganjaran atau untuk mencapai hasil, motivasi dimulai dari kebutuhan dirasakan lalu kemudian menyebabkan usaha-usaha mencapai sasaran atau tujuan.

Motivasi masyarakat di Kabupaten Nunukan terlibat dalam kegiatan kelompok usaha dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Teori Kebutuhan Berprestasi Tinggi (Need for achievement) dari David Mc. Clelland yang dikembangkan dikenal dengan hirarki kebutuhan yaitu :

- 1) *Basic physiological needs* yaitu kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya
- 2) *Safety and security needs* yaitu kebutuhan manusia akan keselamatan dan keamanan. Bagi seseorang, keamanan dapat berarti “job security” dalam arti mendapat perlakuan yang manusiawi
- 3) *Belonging and social needs*, dalam tingkat ini seseorang ingin diterima dalam kelompok, ingin memperoleh perhatian, ingin disayang serta ingin memberikan perhatian kepada orang lain
- 4) *Esteem and status needs*. Esteem merupakan suatu kebutuhan akan penghargaan atas keberhasilan yang sifatnya terus menerus ingin dipertahankan oleh manusia dan dari penghargaan ini akhirnya menuntut bentuk status

5) *Self actualization and fulfillment* yaitu kebutuhan untuk mewujudkan potensi, bakat atau kecakapan yang ada pada dirinya, sehingga dapat memuaskan dirinya sendiri.

#### c) Partisipasi Masyarakat (anggota kelompok)

Umumnya program pemberdayaan biasa diistilahkan dengan program pengembangan partisipasi baik dalam bidang sosial, budaya, lingkungan maupun ekonomi yang berupa pengelolaan usaha secara bersama (KUBE). Tujuan utama program pemberdayaan adalah memunculkan keberdayaan masyarakat dari sisi sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi dari ketidakberdayaannya. Konsep inilah yang melatarbelakangi diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat (Arief,2002).

Dikatakan Ohama (2001), konsep participatory juga menekankan pentingnya teknik-teknik dalam menggali dan menemukan maupun mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada pada masyarakat dengan mendudukan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif, bukan penerima yang pasif. Partisipasi juga mampu menggerakkan daya inisiatif dan kreasi masyarakat.

Dengan strategi pokok memberikan kekuatan (*power*) kepada masyarakat yang tidak berdaya (*powerless*). Masyarakat yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahannya harus diberdayakan agar lebih mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya, merumuskan rencana-rencananya serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya.

## 2. Faktor Penghambat

### a) Pendidikan yang rendah

Masalah mendasar yang menghambat kemajuan ekonomi di kalangan keluarga dan masyarakat pesisir adalah rendahnya pendidikan dan pengalaman usaha. Masyarakat pesisir dengan karakteristik sosial budaya dan ekonominya banyak menghadapi persoalan kesenjangan dan kemiskinan akibat kurang mampu mengembangkan kegiatan usaha pada diri dan keluarganya. Hal ini dimaksudkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman usaha yang rendah menyebabkan penggunaan teknologi modern susah untuk diterapkan.

Hasil penelitian Indiarto (2014) menyatakan bahwa umumnya kelompok masyarakat masih cenderung mempertahankan pengalaman-pengalaman berdasarkan tradisinya sehingga sikap mental dan pengetahuan yang dimiliki kurang mampu mengadopsi pendekatan teknologi, sehingga dinilai sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan program PUMP.

b) Lemahnya manajemen usaha dan kurangnya pembinaan secara berkelanjutan oleh instansi terkait.

Manajemen merupakan unsur penting dalam tata kelola suatu usaha. Menurut diantaranya Terry dalam Winardi (2005) mengemukakan bahwa manajemen adalah usaha seseorang atau sekumpulan orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Terpahami bahwa manajemen merupakan upaya secara kolektif dengan menggunakan peralatan dan dana untuk mencapai tujuan, misi dan sasaran organisasi melalui pendekatan perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*implementation*), pengendalian (*controlling*), pengawasan (*monitoring*) dan evaluasi (*evaluation*).

### **3. Upaya – upaya untuk optimalisasi kebijakan pemberian bantuan rumput laut melalui program PUMP-PB**

Salah satu kendala dalam pelaksanaan program PUMP-PB di Kabupaten Nunukan tahun 2012 terkait pendapatan bagi para kelompok produsen rumput laut binaan yaitu adanya fluktuasi harga pasar dari rumput laut itu sendiri. Kadang mengalami kenaikan, kadang mengalami penurunan. Harga rumput laut tergantung dari beberapa faktor diantaranya: Kualitas rumput laut dan mata rantai pemasaran yang panjang (dapat dilihat Bab II) sehingga harga yang jatuh di tingkat produsen cukup rendah. Kondisi ini kurang efisien dan efektif. Perlu peran pemerintah untuk dapat membantu menstabilkan harga rumput laut dengan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan tersebut.

Di lain sisi, penentuan strategi untuk peningkatan keberhasilan Program PUMP-PB juga dapat dilakukan untuk mengatasi hal hal seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Penentuan strategi dapat pula dilakukan berdasarkan enam faktor penentu terhadap keberhasilan program tersebut (sebagaimana dihasilkan dari analisis sebelumnya). Dalam prosesnya, faktor-faktor penentu tersebut digunakan dalam pengembangan skenario pelaksanaan Program PUMP-PB ke depan yang dikaitkan dengan strategi yang semetinya digunakan. Pengembangan skenario tersebut dapat dilakukan melalui *brainstorming* dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion – FGD*) untuk menghasilkan perkiraan kondisi dari masing-masing variabel penentu pada masa yang akan datang (Godet, 2010).

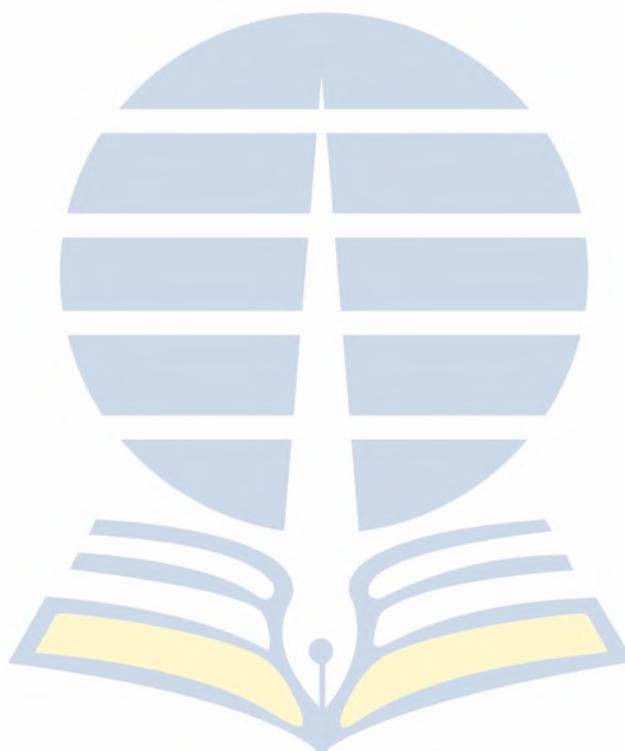
Pengembangan skenario dalam penentuan strategi tersebut, dimaksudkan untuk memprediksi kemungkinan yang dapat terjadi pada faktor tersebut di masa mendatang, apakah akan berkembang ke arah yang lebih baik dari sekarang,

tetap, atau akan semakin buruk dari keadaan sekarang. Hasil ini dapat memberikan kewaspadaan bagi pengambil kebijakan untuk menjalankan strategi yang dipilih. Hoogerworf (1983) menyatakan bahwa empat faktor yang sangat menentukan efektivitasnya kebijakan yaitu: akurasi rumusan kebijakan, kelengkapan informasi oleh pelaksana kebijakan, dukungan publik dan kualitas intelektual pelaksana kebijakan.

Menurut Hikmayani (2013), setelah tersusun skenario pelaksanaan program PUMP-PB, tahap selanjutnya adalah untuk mendapatkan strategi peningkatan keberhasilan pelaksanaan program PUMP-PB yang dapat dilakukan dengan mengekstraksi keadaan-keadaan yang mungkin dilaksanakan pada masa depan, dikaitkan dengan skenario pelaksanaan program tersebut pada masa datang. Dengan langkah-langkah tersebut akan diperoleh hasil analisis prospektif terkait dengan penentuan strategi/upaya peningkatan program PUMP-PB untuk keseluruhan komoditas.

Dengan mempertimbangkan spektrum keadaan Program PUMP-PB pada masa datang, yang dikaitkan dengan skenario pelaksanaannya, dapat dinilai bahwa program PUMP-PB pada masa datang memiliki prospek yang baik (optimis). Diharapkan Program PUMP PB akan mampu memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan produksi, pendapatan, nilai tambah, penumbuhan wirausaha dan fungsi kelembagaan, sehingga dinilai akan mampu mencapai tujuan utamanya pada masa datang. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa strategi peningkatan keberhasilan pelaksanaan Program PUMP-PB keseluruhan komoditas pada masa datang adalah mengikuti skenario optimis, yaitu: (1) Meningkatkan fasilitas pemanfaatan teknologi oleh pembudidaya

seoptimal mungkin. Menurut Zuhail, (2010), Sumberdaya Manusia yang menguasai IPTEK merupakan kekuatan intelektual dan IPTEK merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi (2) Mendorong akselerasi program pelatihan untuk pembudidaya; dan (3) Meningkatkan dukungan dari institusi terkait untuk perluasan pasar produk ikan/rumput laut yang dihasilkan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program PUMP-PB Kabupaten Nunukan tahun 2012 secara keseluruhan memiliki keberhasilan yang baik dalam mencapai tujuan utamanya. Hal tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya kriteria evaluasi yang mengacu pada aspek kinerja menurut William N. Dunn yang meliputi enam kriteria yaitu (a) efektivitas, yang ditunjukkan dengan meningkatnya hasil produksi rumput laut, meningkatnya kesejahteraan serta ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik; (b) efisiensi, dimana hasil penelitian menunjukkan kesesuaian antara biaya yang dianggarkan dengan pemenuhan sarana dan prasarana budidaya rumput laut; (c) kecukupan, dimana hasil dari implementasi kebijakan program PUMP-PB di Kabupaten Nunukan telah memenuhi kriteria kecukupan dalam hal memecahkan permasalahan sarana dan prasarana yang selama ini dialami oleh pokdakan; (d) pemerataan, terlihat bahwa pemerataan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan sesuai anggaran yang telah ditentukan berdampak pada peningkatan produksi rumput laut oleh kelompok pokdakan; (e) responsivitas, yang menunjukkan bahwa hasil evaluasi kebijakan program PUMP tersebut telah memenuhi kebutuhan dalam budidaya rumput laut kelompok pokdakan yang terpilih di Kabupaten Nunukan; dan (f) ketepatan, yang menunjukkan bahwa hasil dari

program PUMP-PB tersebut yaitu berkembangnya usaha produktif dibidang pembudidaya rumput laut yang sangat berpengaruh pada peningkatan produksi, kemampuan dan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan wirausaha (pengembangan usaha) dibidang perikanan budidaya.

2. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi/panen dan meningkatkan penghasilan melalui program PUMP-PB di Kabupaten Nunukan tahun 2012 sudah cukup efisien. Program ini dapat meningkatkan (1) jumlah rata-rata bentangan pokdokan Ilham Jaya sebelum PUMP-PB yaitu 139 meter dan setelah PUMP-PB menjadi 296 meter, peningkatan rata-rata harga produksi dari sebelum PUMP-PB sebesar Rp.40.120 dan sesudah PUMP-PB menjadi Rp.85.510, peningkatan jumlah rata-rata pendapatan pun akhirnya meningkat dari Rp.435.356.00 menjadi Rp.966.263.000; (2) jumlah rata-rata bentangan pokdokan Anugerah sebelum PUMP-PB yaitu 260 meter dan dan setelah PUMP-PB menjadi 415 meter, peningkatan rata-rata harga produksi dari sebelum PUMP-PB sebesar Rp.11.208 dan sesudah PUMP-PB menjadi Rp.17.890, peningkatan rata-rata jumlah pendapatan pun akhirnya meningkat dari Rp.126.652.578 menjadi Rp.202.157.000; (3) jumlah rata-rata bentangan pokdokan Wahana Hijau sebelum PUMP-PB yaitu 201 meter dan dan setelah PUMP-PB menjadi 344 meter, peningkatan rata-rata harga produksi dari sebelum PUMP-PB sebesar Rp.64.980 dan sesudah PUMP-PB menjadi Rp.111.726, peningkatan rata-rata jumlah pendapatan pun akhirnya meningkat dari Rp.734.274.00 menjadi Rp.1.262.503.800; dan (4) jumlah rata-rata bentangan pokdokan Liang Bunyu Pantai 1 sebelum PUMP-PB yaitu 245 meter dan dan setelah PUMP-PB menjadi 393 meter, peningkatan rata-

rata harga produksi dari sebelum PUMP-PB sebesar Rp.24.470 dan sesudah PUMP-PB menjadi Rp.39.300, peningkatan rata-rata jumlah pendapatan pun akhirnya meningkat dari Rp.276.511.000 menjadi Rp.444.090.000. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, biaya dan manfaat yang didistribusikan pun sudah merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Dari hasil wawancara kepada beberapa anggota kelompok binaan, hasil kebijakan cukup memuaskan dan tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkan serta sangat berguna dan bernilai bagi masyarakat sasaran tersebut.

3. Salah satu kendala dalam pelaksanaan program PUMP-PB terkait pendapatan bagi para kelompok produsen rumput laut binaan yaitu adanya fluktuasi harga pasar dari rumput laut. Kadang mengalami kenaikan, kadang mengalami penurunan. Harga rumput laut tergantung dari beberapa faktor diantaranya: Kualitas rumput laut dan mata rantai pemasaran yang panjang sehingga harga yang jatuh di tingkat produsen cukup rendah. Kondisi ini kurang efisien dan efektif. Perlu peran pemerintah untuk dapat membantu menstabilkan harga rumput laut dengan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan tersebut.
4. Program PUMP-PB secara keseluruhan dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu: (1) Tingkat dan akses teknologi budidaya, (2) Ketepatan lokasi, (3) Ketepatan calon penerima bantuan (4) Luas dan status lahan (5) Ketepatan turunnya bantuan, (6) Dukungan kebijakan daerah.
5. Upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi kebijakan pemberian bantuan rumput laut melalui program PUMP-PB adalah dengan menyusun strategi peningkatan keberhasilan pelaksanaan program dengan mengikuti skenario

optimis, yaitu: (1) Meningkatkan fasilitas pemanfaatan teknologi oleh pembudidaya seoptimal mungkin; (2) Mendorong akselerasi program pelatihan untuk pembudidaya; dan (3) Meningkatkan dukungan dari institusi terkait untuk perluasan pasar produk rumput laut yang dihasilkan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian pada kesimpulan, maka dapat disarankan beberapa hal oleh peneliti sebagai berikut:

1. Program PUMP-PB yang sudah dilaksanakan harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaannya, yaitu tingkat dan akses teknologi budidaya, ketepatan lokasi, ketepatan calon penerima bantuan, luas dan status lahan, ketepatan turunnya bantuan dan dukungan kebijakan daerah.
2. Secara keseluruhan dari strategi yang diusulkan akan berimplikasi pada kebijakan penyediaan pelayanan akses teknologi, verifikasi calon lokasi, calon penerima program harus dilakukan secara lebih baik. Sementara, pada tahap implementasi di lokasi harus memperhatikan koordinasi dan pelibatan seluruh unsur dan para pihak. Disamping itu, sistem penganggaran perlu dilihat kembali dan disesuaikan dengan kalender musim budidaya rumput laut untuk setiap lokasi yang dikuatkan dengan peningkatan partisipasi pemerintah daerah dalam program PUMP-PB diperlukan upaya koordinasi dan sinkronisasi program pusat dan daerah lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (1997). Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Andi Parenrengi dkk, (2012). Budidaya Rumput Laut : Penghasil Karaginan. Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air payau Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Anonim. (2013). Buku Statistik Perikanan Tahun 2011. Nunukan : Dinas Kelautan dan Perikanan
- Anonim. (2013). Membangun Daerah Perbatasan Dengan Rumput Laut. Samarinda : Bank Indonesia Perwakilan Samarinda
- Chalid, P (2011). Teori dan Isu Pembangunan. Buku Materi Pokok. Edisi Kesatu. Jakarta : Universitas Terbuka
- Erwan Agus Purwanto dkk, 2012. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Implementasi Kebijakan Publik : Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Hikmayani, Y., Deswati, R. H. dan Nasution, Z. 2013. Evaluasi dan Strategi Peningkatan Keberhasilan Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP PB): Pendekatan Analisis Prospektif. Jurnal Kebijakan Sosek KP Vol. 3 No. 1 Tahun 2013
- Hoogerworf, A. 1983. Ilmu Pemerintah. Penerjemah R.L.L Tobing. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Indiarto, M. A. 2014. Analisis Tahapan Implementasi Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) (Studi Kasus di Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang). Makassar: Universitas Hasanuddin
- Jana T. Anggadiredja dkk, 2011. Seri Agribisnis. Rumput Laut : Penebar Swadaya. Jakarta
- Made, S., dkk. 2001. Optimalisasi Pengembangan Usaha Sumberdaya Rumput Laut (*Eucheuma Cottonii*) di Kabupaten Takalar. Jurusan perikanan. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Makassar
- Mardiasmo (2004). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Serial Otonomi Daerah : Yogyakarta. Andi Yogyakarta

- Ohama, Yutaka, 2001. "Participatory Approach" , Makalah dalam "Training on PLSD: Theories dan Practices". JICA: Nagoya.
- Prasetya Irawan, 2012. Metodologi Penelitian Administrasi : Universitas Terbuka. Jakarta.
- Riant Nugroho, 2014. Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. Public Policy : Gramedia. Jakarta
- Rochyati. 2012. Evaluasi Kebijakan Publik. <http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id>. Diakses 12 Mei 2016.
- Shalihin, M. 2015. Evaluasi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di desa Sebung Pereh Kecamatan Teluk Sebung Kabupaten Bintan.Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Haji.
- Solichin Abdul Wahab, 1997. Evaluasi Kebijakan Publik : Universitas Brawijaya. Malang
- Sri Suwitri, dkk (2014). Analisis Kebijakan Publik : Jakarta Universitas terbuka
- Sukadi, F. 2002. Peningkatan Teknologi Budidaya Perikanan. Jurnal Iktiologi Indonesia Vol 2 (2) : 61-66
- Sulistijo. 2006. Budidaya rumput laut dan upaya pengembangannya.Makalah pada kipnas iv. Jakarta.
- Susi Pudjiastuti, 2015. Menteri Susi Atur Ekspor Rumput Laut. ANTARA News. Jakarta
- Wahyu, F. 2013. Evaluasi Program Bantuan Departemen Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Rumput Laut (*Eucheumacottoni*)di Kabupaten Bantaeng. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Gupta PK, Varshney RK, Sharma, PC, Ramesh B. 1999. Molecular markers and their application in wheat breeding. *Plant Breeding* 118:369-390.
- Nei, M. & Kumar. 2000. *Molecular Evolution and Phylogenetics*. Oxford University Press : UK
- Page, R.D.M.. 1996. TREEVIEW: An application to display phylogenetic trees on personal computers. *Computer Applications in the Biosciences* 12: 357-358.



## Lampiran 1

## PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Pembudidaya / anggota kelompok penerima bantuan sarana prasana rumput laut melalui program Pump\_Pb Tahun 2012

A. Kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan- Perikanan Budidaya (PUMP-PB) Tahun 2012 ?
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui pemberian bantuan sarana prasana rumput laut ? seberapa banyak tahunnya ?
3. Apakah pernah disosialisasikan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 ? Jika Ya. Siapa yang diundang atau dilibatkan ?
4. Apakah pelaksanaan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 sesuai apa yang disampaikan? Seperti jumlahnya, penerimanya, spesifikasinya, kondisinya, dan waktunya!
5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara tahu penerima bantuan yang sama dengan Bapak/Ibu/Saudara dalam kelompok Bapak ? orang lain atau kelompok lain yang menerima ?
6. Apa kegiatan Bapak/Ibu/Saudara sebelum menerima bantuan ?
7. Apa yang dirasakan setelah menerima bantuan ?

8. Sebelum menerima bantuan. Sarana prasarana apa yang Bapak/Ibu/Saudara miliki ? setelah menerima bantuan ! Jika memungkinkan tolong diberitahukan penambahan sarana prasarananya ?
9. Apakah ada instansi atau dari pegawai propinsi atau pusat mengunjungi bapak ? kalau ada apa yang dilakukan mereka ?
10. Berapa jumlah anggota yang bekerja pada Bapak sebelum menerima bantuan ? setelah menerima bantuan?
11. Berapa pendapatan rata-rata Bapak sebelum menerima bantuan? Setelah menerima bantuan?
12. Produksi rumput laut Bapak sebelum menerima bantuan ? setelah menerima bantuan ?
13. Apa ada masalah mulai dari awal penerimaan, proses penerimaan, dan setelah menerima bantuan ?

#### **B. Tata Cara dan Prosedur Pemberian Bantuan**

1. Apa ada persyaratan kelompok calon penerima bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan ?
2. Apakah dilakukan pendampingan ? atau adakah petugas khusus yang melakukan pendampingan ?
3. Apa Bapak/Ibu/Saudara tahu cara atau prosedur penyaluran bantuan sarana prasarana rumput laut ?

Informan : Penyuluh Perikanan

A. Kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan- Perikanan Budidaya (PUMP-PB) Tahun 2012 ?
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut ? seberapa banyak tahunnya ?
3. Apakah pernah disosialisasikan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 ? Jika Ya. Siapa yang diundang atau dilibatkan ?
4. Apakah pelaksanaan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 sesuai apa yang disampaikan? Seperti jumlahnya, penerimanya, spesifikasinya, kondisinya, dan waktunya!
5. Apakah ada seleksi calon penerima bantuan ?
6. Menurut Bapak. Bagaimana respon masyarakat terhadap bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb ?
7. Apakah ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya ?
8. Apakah Bapak tahu penerima bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb ?

## B. Tata Cara dan Prosedur Pemberian Bantuan

1. Apakah ada persyaratan kelompok calon penerima bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan ?
2. Apakah ada petunjuk atau pedoman seleksi calon penerima bantuan ?
3. Apakah dilakukan seleksi untuk calon penerima bantuan ?
4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara tahu cara atau prosedur penyaluran bantuan sarana prasana rumput laut ?



Informan : Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan

- A. Kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012
1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan- Perikanan Budidaya (PUMP-PB) Tahun 2012 ?
  2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui pemberian bantuan sarana prasana rumput laut ? seberapa banyak tahunnya ?
  3. Apakah pernah disosialisasikan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 ? Jika Ya. Siapa yang diundang atau dilibatkan ?
  4. Apakah pelaksanaan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 sesuai apa yang disampaikan? Seperti jumlahnya, penerimanya, spesifikasinya, kondisinya, dan waktunya!
  5. Apakah ada pedoman, juknis mengenai bantuan tersebut ?
  6. Apa kendala atau hambatan dalam pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut ?
  7. Apakah dilakukan monev secara berkala ?
  8. Apa hasil yang dirasakan oleh masyarakat dengan bantuan ini ? (dibuat terukur )
  9. Apakah ada tim atau petugas khusus menangani kegiatan ini ?

## B. Tata Cara dan Prosedur Pemberian Bantuan

1. Apakah ada persyaratan kelompok calon penerima bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan ?
2. Apakah ada petunjuk atau pedoman seleksi calon penerima bantuan ?
3. Apakah dilakukan seleksi untuk calon penerima bantuan ?
4. Apakah ada SOP pemberian bantuan ?



## Lampiran 1

## PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Pembudidaya / anggota kelompok penerima bantuan sarana prasana rumput laut melalui program Pump\_Pb Tahun 2012

A. Kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan- Perikanan Budidaya (PUMP-PB) Tahun 2012 ?
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui pemberian bantuan sarana prasana rumput laut ? seberapa banyak tahunnya ?
3. Apakah pernah disosialisasikan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 ? Jika Ya. Siapa yang diundang atau dilibatkan ?
4. Apakah pelaksanaan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 sesuai apa yang disampaikan? Seperti jumlahnya, penerimanya, spesifikasinya, kondisinya, dan waktunya!
5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara tahu penerima bantuan yang sama dengan Bapak/Ibu/Saudara dalam kelompok Bapak ? orang lain atau kelompok lain yang menerima ?
6. Apa kegiatan Bapak/Ibu/Saudara sebelum menerima bantuan ?
7. Apa yang dirasakan setelah menerima bantuan ?

8. Sebelum menerima bantuan. Sarana prasarana apa yang Bapak/Ibu/Saudara miliki ? setelah menerima bantuan ! Jika memungkinkan tolong diberitahukan penambahan sarana prasarananya ?
9. Apakah ada instansi atau dari pegawai propinsi atau pusat mengunjungi bapak ? kalau ada apa yang dilakukan mereka ?
10. Berapa jumlah anggota yang bekerja pada Bapak sebelum menerima bantuan ? setelah menerima bantuan?
11. Berapa pendapatan rata-rata Bapak sebelum menerima bantuan? Setelah menerima bantuan?
12. Produksi rumput laut Bapak sebelum menerima bantuan ? setelah menerima bantuan ?
13. Apa ada masalah mulai dari awal penerimaan, proses penerimaan, dan setelah menerima bantuan ?

#### B. Tata Cara dan Prosedur Pemberian Bantuan

1. Apa ada persyaratan kelompok calon penerima bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan ?
2. Apakah dilakukan pendampingan ? atau adakah petugas khusus yang melakukan pendampingan ?
3. Apa Bapak/Ibu/Saudara tahu cara atau prosedur penyaluran bantuan sarana prasarana rumput laut ?

Informan : Penyuluh Perikanan

A. Kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan- Perikanan Budidaya (PUMP-PB) Tahun 2012 ?
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut ? seberapa banyak tahunnya ?
3. Apakah pernah disosialisasikan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 ? Jika Ya. Siapa yang diundang atau dilibatkan ?
4. Apakah pelaksanaan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 sesuai apa yang disampaikan? Seperti jumlahnya, penerimanya, spesifikasinya, kondisinya, dan waktunya!
5. Apakah ada seleksi calon penerima bantuan ?
6. Menurut Bapak. Bagaimana respon masyarakat terhadap bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb ?
7. Apakah ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya ?
8. Apakah Bapak tahu penerima bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb ?

## B. Tata Cara dan Prosedur Pemberian Bantuan

1. Apakah ada persyaratan kelompok calon penerima bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan ?
2. Apakah ada petunjuk atau pedoman seleksi calon penerima bantuan ?
3. Apakah dilakukan seleksi untuk calon penerima bantuan ?
4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara tahu cara atau prosedur penyaluran bantuan sarana prasana rumput laut ?



Informan : Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan

A. Kebijakan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan- Perikanan Budidaya (PUMP-PB) Tahun 2012 ?
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui pemberian bantuan sarana prasana rumput laut ? seberapa banyak tahunnya ?
3. Apakah pernah disosialisasikan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 ? Jika Ya. Siapa yang diundang atau dilibatkan ?
4. Apakah pelaksanaan pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 sesuai apa yang disampaikan? Seperti jumlahnya, penerimanya, spesifikasinya, kondisinya, dan waktunya!
5. Apakah ada pedoman, juknis mengenai bantuan tersebut ?
6. Apa kendala atau hambatan dalam pemberian bantuan sarana prasarana rumput laut ?
7. Apakah dilakukan monev secara berkala ?
8. Apa hasil yang dirasakan oleh masyarakat dengan bantuan ini ? (dibuat terukur )
9. Apakah ada tim atau petugas khusus menangani kegiatan ini ?

## B. Tata Cara dan Prosedur Pemberian Bantuan

1. Apakah ada persyaratan kelompok calon penerima bantuan sarana prasarana rumput laut melalui program Pump-Pb Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan ?
2. Apakah ada petunjuk atau pedoman seleksi calon penerima bantuan ?
3. Apakah dilakukan seleksi untuk calon penerima bantuan ?
4. Apakah ada SOP pemberian bantuan ?



## Lampiran 2

## PEDOMAN OBSERVASI

Hal – hal yang perlu dilakukan dalam observasi :

1. Keadaan sosial ekonomi masyarakat
2. Tingkat perilaku masyarakat
3. Kondisi atau medan dilapangan (topografi wilayah)
4. Kondisi rumah tangga informan
5. Aparat setempat yang melakukan aktivitas selalalu berhubungan dengan informan
6. Sarana prasarana yang dimiliki dalam melakukan aktivitas sehari-hari
7. Tingkat pendidikan informan
8. Sarana umum sekitar lokasi observasi
9. Menyiapkan kebutuhan dan kelengkapan dalam melakukan observasi

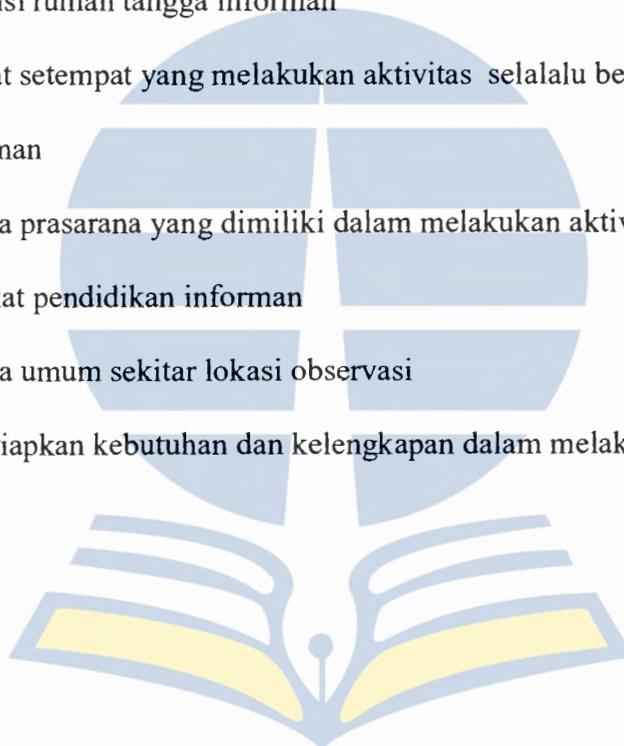




PHOTO WAWANCARA

